

0402 1798

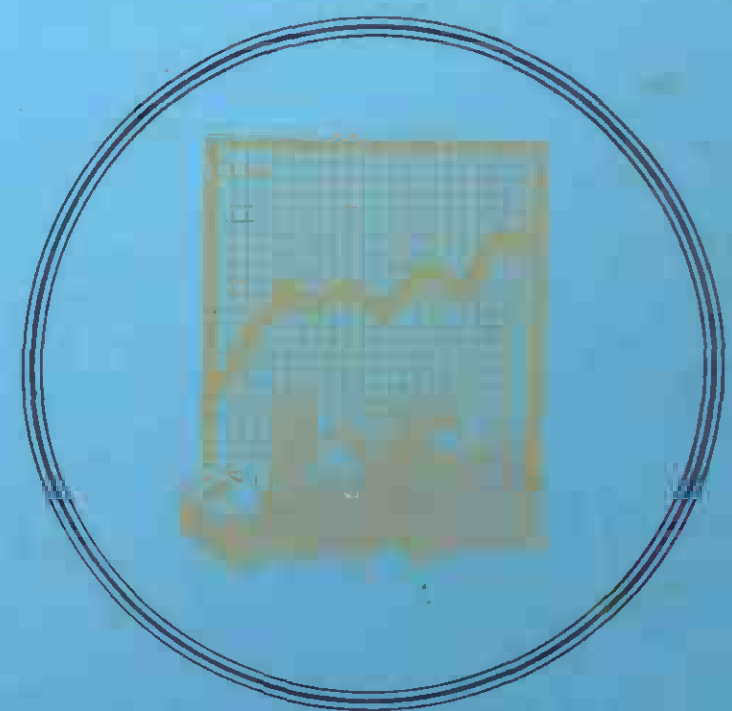
LABEL SEMENTARA SENSUS BARANG 2014			
Ruang	ID	Lokasi	Petugas
8202	123.004.0593-1	G816	SM

WILDA : 35000



7405.3500

STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TINGKAT II (KABUPATEN/KOTA)
PROPINSI JAWA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 1999/2000 - 2000



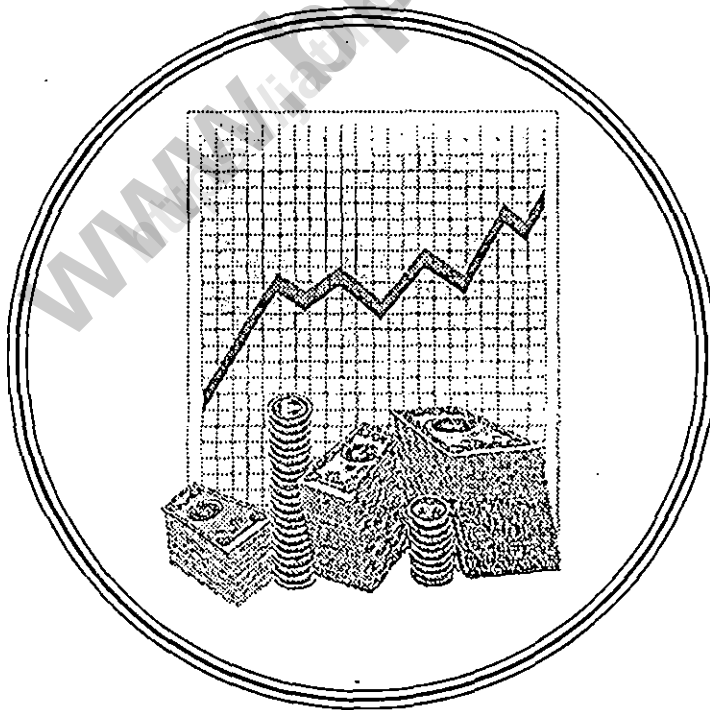
36.021
Sta
Ind.
BPS Badan Pusat Statistik

BPS PROPINSI JAWA TIMUR



7405.3500

STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TINGKAT II (KABUPATEN/KOTA)
PROPINSI JAWA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 1999/2000 - 2000



BPS PROPINSI JAWA TIMUR

STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TINGKAT II (KABUPATEN/KOTA) PROPINSI JAWA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 1999/2000 – 2000

ISSN :

No. Publikasi : 35542.02.01

Katalog BPS : 7405.3500

Ukuran Buku : 21 cm x 28 cm

Jumlah Halaman : 92 Halaman

Naskah :

Seksi Statistik Keuangan dan Harga Produsen

Bidang Distribusi

Gambar Kulit :

Seksi Statistik Keuangan dan Harga Produsen

Bidang Distribusi

Diterbitkan oleh :

BPS Propinsi Jawa Timur

Dicetak oleh :

CV Mitra Guna Bahagia

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya.

KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat II tahun anggaran 1999/2000 - 2000 ini diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan akan data Statistik Keuangan Pemerintah Daerah yang telah memasuki era otonomi daerah.

Tabel-tabel data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Tingkat II tahun anggaran 1999/2000 - 2000 yang disajikan merupakan hasil kompilasi dan akumulasi data yang diterima dari daerah. Untuk memudahkan pemakai dalam menganalisa data, maka disajikan penjelasan tentang konsep, definisi, metode pengumpulan data serta ulasan ringkas.

Kami menyadari akan keterbatasan dalam menyajikan publikasi yang bisa diterima semua pihak, kami berupaya untuk mengembangkan dan menyempurnakan publikasi ini sebaik mungkin. Segala saran dan kritik demi perbaikan publikasi sangat diharapkan.

Surabaya, Desember 2001

Kepala BPS Propinsi Jawa Timur



MUKADI HADIWIDJOJO, M.Sc.

NIP. 340003227

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
I. PENJELASAN UMUM	V
II. ULASAN RINGKAS	XII

DAFTAR TABEL

1.1	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah TK. II Kab. Pacitan	1
1.2	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah TK. II Kab. Pacitan	2
1.3	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah TK. II Kab. Ponorogo	3
1.4	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah TK. II Kab. Ponorogo	4
1.5	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah TK. II Kab. Trenggalek	5
1.6	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah TK. II Kab. Trenggalek	6
1.7	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah TK. II Kab. Tulungagung	7
1.8	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah TK. II Kab. Tulungagung	8
1.9	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah TK. II Kab. Blitar	9
1.10	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah TK. II Kab. Blitar	10
1.11	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah TK. II Kab. Kediri	11
1.12	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah TK. II Kab. Kediri	12
1.13	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah TK. II Kab. Malang	13
1.14	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah TK. II Kab. Malang	14
1.15	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah TK. II Kab. Lumajang	15
1.16	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah TK. II Kab. Lumajang	16
1.17	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah TK. II Kab. Jember	17
1.18	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah TK. II Kab. Jember	18
1.19	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah TK. II Kab. Banyuwangi	19
1.20	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah TK. II Kab. Banyuwangi	20
1.21	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah TK. II Kab. Bondowoso	21
1.22	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah TK. II Kab. Bondowoso	22
1.23	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah TK. II Kab. Situbondo	23
1.24	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah TK. II Kab. Situbondo	24
1.25	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah TK. II Kab. Probolinggo	25
1.26	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah TK. II Kab. Probolinggo	26
1.27	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah TK. II Kab. Pasuruan	27
1.28	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah TK. II Kab. Pasuruan	28
1.29	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah TK. II Kab. Sidoarjo	29
1.30	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah TK. II Kab. Sidoarjo	30
1.31	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah TK. II Kab. Mojokerto	31
1.32	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah TK. II Kab. Mojokerto	32
1.33	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah TK. II Kab. Jombang	33
1.34	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah TK. II Kab. Jombang	34

	Halaman
1.35 Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah TK. II Kab. Nganjuk	35
1.36 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah TK. II Kab. Nganjuk	36
1.37 Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah TK. II Kab. Madiun	37
1.38 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah TK. II Kab. Madiun	38
1.39 Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah TK. II Kab. Magetan	39
1.40 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah TK. II Kab. Magetan	40
1.41 Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah TK. II Kab. Ngawi	41
1.42 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah TK. II Kab. Ngawi	42
1.43 Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah TK. II Kab. Bojonegoro	43
1.44 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah TK. II Kab. Bojonegoro	44
1.45 Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah TK. II Kab. Tuban	45
1.46 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah TK. II Kab. Tuban	46
1.47 Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah TK. II Kab. Lamongan	47
1.48 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah TK. II Kab. Lamongan	48
1.49 Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah TK. II Kab. Gresik	49
1.50 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah TK. II Kab. Gresik	50
1.51 Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah TK. II Kab. Bangkalan	51
1.52 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah TK. II Kab. Bangkalan	52
1.53 Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah TK. II Kab. Sampang	53
1.54 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah TK. II Kab. Sampang	54
1.55 Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah TK. II Kab. Pamekasan	55
1.56 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah TK. II Kab. Pamekasan	56
1.57 Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah TK. II Kab. Sumenep	57
1.58 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah TK. II Kab. Sumenep	58
1.59 Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah TK. II Kota Kediri	59
1.60 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah TK. II Kota Kediri	60
1.61 Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah TK. II Kota Blitar	61
1.62 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah TK. II Kota Blitar	62
1.63 Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah TK. II Kota Malang	63
1.64 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah TK. II Kota Malang	64
1.65 Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah TK. II Kota. Probolinggo	65
1.66 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah TK. II Kota. Probolinggo	66
1.67 Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah TK. II Kota. Pasuruan	67
1.68 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah TK. II Kota. Pasuruan	68
1.69 Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah TK. II Kota. Mojokerto	69
1.70 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah TK. II Kota. Mojokerto	70
1.71 Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah TK. II Kota. Madiun	71
1.72 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah TK. II Kota. Madiun	72
1.73 Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah TK. II Kota. Surabaya	73
1.74 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah TK. II Kota. Surabaya	74

2.1	Sumber Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2000	
	Berdasarkan Daerah Tingkat II se Jawa Timur.....	75
2.2	Sumber Penerimaan PAD Tahun Anggaran 2000	
	Berdasarkan Daerah Tingkat II se Jawa Timur.....	76
2.3	Sumber Penerimaan Pendapatan dari Pemerintah Tahun Anggaran 2000	
	Berdasarkan Daerah Tingkat II se Jawa Timur.....	77
2.4	Suber Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2000	
	Berdasarkan Daerah Tingkat II se Jawa Timur.....	78
2.5	Persentase Sumber Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2000	
	Berdasarkan Daerah Tingkat II se Jawa Timur.....	79
2.6	Persentase Sumber Penerimaan PAD Tahun Anggaran 2000	
	Berdasarkan Daerah Tingkat II se Jawa Timur.....	80
2.7	Persentase Sumber Pendapatan dari Pemerintah Tahun Anggaran 2000	
	Berdasarkan Daerah Tingkat II se Jawa Timur.....	81
2.8	Persentase Suber Pinjaman Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2000	
	Berdasarkan Daerah Tingkat II se Jawa Timur.....	82
2.9	Pengeluaran Pemerintah Daerah Tahun 2000	
	Berdasarkan Daerah Tingkat II se Jawa Timur.....	83
3.1	Sumber Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 1999/2000	
	Berdasarkan Daerah Tingkat II se Jawa Timur.....	84
3.2	Sumber Penerimaan PAD Tahun Anggaran 1999/2000	
	Berdasarkan Daerah Tingkat II se Jawa Timur.....	85
3.3	Sumber Penerimaan Pendapatan dari Pemerintah Tahun Anggaran 1999/2000	
	Berdasarkan Daerah Tingkat II se Jawa Timur.....	86
3.4	Suber Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 1999/2000	
	Berdasarkan Daerah Tingkat II se Jawa Timur.....	87
3.5	Persentase Sumber Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 1999/2000	
	Berdasarkan Daerah Tingkat II se Jawa Timur.....	88
3.6	Persentase Sumber Penerimaan PAD Tahun Anggaran 1999/2000	
	Berdasarkan Daerah Tingkat II se Jawa Timur.....	89
3.7	Persentase Sumber Pendapatan dari Pemerintah Tahun Anggaran 1999/2000	
	Berdasarkan Daerah Tingkat II se Jawa Timur.....	90
3.8	Persentase Suber Pinjaman Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 1999/2000	
	Berdasarkan Daerah Tingkat II se Jawa Timur.....	91
3.9	Pengeluaran Pemerintah Daerah Tahun 1999/2000	
	Berdasarkan Daerah Tingkat II se Jawa Timur.....	92

BAB I

PENJELASAN UMUM

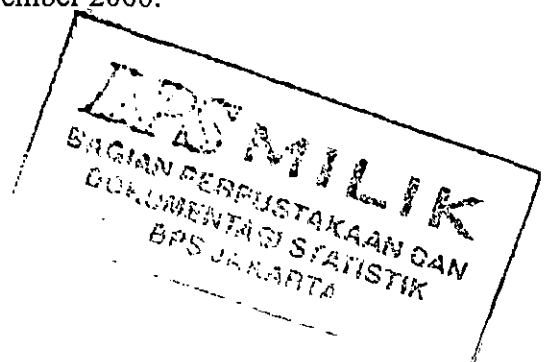
1. Pendahuluan

Seperti tahun-tahun sebelumnya, Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat II yang diterbitkan setiap tahun menyajikan data realisasi penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah Tingkat II seluruh Jawa Timur tahun anggaran 1999/2000 - 2000. Selain untuk memenuhi kebutuhan akan data Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat II terutama melihat potensi daerah dari sisi penerimaan dan pengeluaran, publikasi ini dapat dimanfaatkan dalam membuat kebijakan umum yang rinci dan tepat waktu, sekaligus untuk mendukung kebijaksanaan pada era otonomi daerah saat ini.

Seperti publikasi tahun lalu, publikasi kali ini tetap menyajikan satu tabel untuk keadaan dua tahun anggaran yang berbeda dalam format penerimaan dan pengeluaran, dengan maksud untuk mempermudah analisis dari tahun ke tahun.

2. Ruang lingkup survei

Sumber data Statistik Keuangan ini diperoleh dari Bagian Keuangan Kantor Pemerintah Daerah Tingkat II di Propinsi Jawa Timur. Data ini meliputi kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahun anggaran. Dengan adanya perubahan tahun anggaran, untuk tahun anggaran 2000 hanya mempunyai masa periode selama 9 bulan dimulai pada 1 April dan berakhir pada 31 Desember 2000.



3. Konsep dan Definisi

Daftar isian keuangan Daerah Tingkat II (K-2) digunakan untuk mencatat data statistik keuangan yang meliputi realisasi penerimaan dan realisasi pengeluaran Pemerintah Daerah Tingkat II.

3.1. Penerimaan Daerah

3.1.1 Sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu

Adalah bagian sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu yang masuk didalam perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode tahun anggaran berikutnya.

3.1.2 Pendapatan asli daerah

Adalah penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari : pajak daerah; retribusi daerah, laba usaha daerah dan penerimaan lain-lain.

3.1.2.1 Pajak daerah

Adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ditetapkan melalui peraturan daerah. Pungutan ini dikenakan kepada semua obyek pajak seperti orang/badan, dan benda bergerak/tak bergerak.

3.1.2.2 Retribusi daerah

Adalah pungutan daerah sebagai pembayaran/pemakaian karena memperoleh jasa yang diberikan oleh daerah atau dengan kata lain retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan sehubungan

dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan secara langsung dan nyata.

3.1.2.3 Bagian laba usaha daerah

Adalah penerimaan dari dinas-dinas yang tidak merupakan penerimaan dari pajak dan restribusi daerah, misalnya : Dinas Pertanian, Peternakan, Kesehatan, Perikanan dan lain-lain.

3.1.2.4 Penerimaan lain-lain

Adalah penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang milik daerah, penjualan barang-barang bekas, cicilan kendaraan bermotor roda empat dan roda dua, cicilan rumah yang dibangun oleh pemerintah daerah, penerimaan jasa giro (kas daerah) dan lain-lain.

3.1.3 Bagian pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah dan atau instansi yang lebih tinggi.

Adalah penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah yaitu : bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, subsidi daerah otonom, bantuan pembangunan dan penerimaan lain-lain baik dari pusat maupun Tingkat I atau dari daerah itu sendiri .

3.1.3.1 Bagi hasil pajak

Adalah penerimaan yang diperoleh dari pajak seperti : PBB, pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan bagi hasil pajak lainnya menurut undang-undang/aturan yang sah.

3.1.3.2 Bagi hasil bukan pajak

Adalah penerimaan bagi hasil bukan pajak diantaranya : Iuran hasil hutan (IHH), Iuran hasil pengusahaan hutan (IHPH), pemberian hak atas tanah negara, landrent, penerimaan dari iuran eksplorasi/eksploitasi/royalty dan bagi hasil bukan pajak lainnya.

3.1.3.3 Subsidi daerah otonom

Adalah penerimaan yang diberikan pemerintah Pusat, Tingkat I diantaranya subsidi belanja pegawai, non pegawai dan sumbangan lainnya dari pemerintah pusat.

3.1.3.4 Bantuan pembangunan

Adalah bantuan yang digunakan untuk pembangunan sarana maupun prasarana bagi daerah tingkat II seperti : Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II, Penunjang jalan, Sarana Pendidikan Sekolah Dasar, Kesehatan, Pembangunan Desa dan lain-lain.

3.1.3.5 Pinjaman pemerintah daerah

Adalah penerimaan yang berasal dari pinjaman baik dari Pemerintah Pusat, Lembaga keuangan dalam negeri maupun dari pinjaman luar negeri.

3.2 Pengeluaran Rutin

Adalah pengeluaran yang harus dapat dibiayai dari pendapatan daerah sendiri sesuai dengan pasal 64 ayat (5) UU No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah.

Dari pos-pos pengeluaran yang ada kemudian dirinci menurut sepuluh jenis belanja rutin yaitu : Belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja lain-lain, angsuran pinjaman/hutang dan bunga, ganjaran, subsidi, dan sumbangan kepada daerah bawahan, pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain, dan pengeluaran tidak tersangka.

3.2.1 Belanja pegawai

Adalah pengeluaran untuk keperluan pegawai yang termasuk di dalamnya yaitu gaji dan tunjangan lainnya, tunjangan beras, honorarium dan vakasi, uang lembur, upah pegawai harian tetap, biaya perawatan dan pengobatan lokal yang semuanya dibayarkan kepada pegawai daerah otonom.

3.2.2 Belanja barang

Adalah pengeluaran yang dipergunakan untuk ongkos kantor yang meliputi ATK, barang cetakan, pakaian kerja, pengamanan kantor dan rumah pejabat, jasa perkantoran, langganan listrik, telpon, air minum dan gas, sewa gedung dan kepanitiaan lainnya. Juga termasuk dalam belanja barang adalah pembelian inventaris kantor, barang pendidikan, biaya perpustakaan, biaya hansip, pembelian peralatan dokter, alat-alat perlengkapan laboratorium, inventaris ruangan pasien, perlengkapan dapur rumah sakit dan sebagainya.

3.2.3 Biaya pemeliharaan

Adalah biaya yang meliputi pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas, asrama, mess, kendaraan dinas KDH dan wakil KDH, kendaraan dinas lainnya, pemeliharaan inventaris kantor dan lain sebagainya.

3.2.4 Belanja perjalanan dinas

Adalah biaya yang meliputi perjalanan dinas, perjalanan dinas tetap, perjalanan pindah dan pemulangan pegawai yang dipesiunkan dan perjalanan dinas lainnya.

3.2.5 Belanja lain-lain

Adalah pengeluaran yang meliputi perangsang / insentip, penguburan bagi yang tidak mampu, observasi dan penyuluhan sosial, operasional, penerangan dan pameran serta dokumentasi, pembibitan tanaman atau hewan, komunikasi, pengangkutan barang, sewa gudang, kesejahteraan pegawai, pemungutan PBB, inventaris barang daerah, tamu, rumahtangga kepala daerah dan lain-lain.

3.2.6 Angsuran pinjaman/hutang dan bunga

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk membayar kewajiban pinjaman/hutang beserta bunganya.

3.2.7 Ganjaran/Subsidi/sumbangan kepada daerah bawahan

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk subsidi daerah bawahan, penyesuaian PBB daerah tingkat II kepada desa, penyesuaian pajak dan restribusi kepada desa/keurahan dan lain-lain.

3.2.8 Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain

Pengeluaran yang digunakan untuk membantu instansi vertikal Departemen Dalam Negeri dan lainnya, organisasi profesi maupun sosial dan lain-lain.

3.3. Pengeluaran Pembangunan

Pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran yang ditujukan untuk pembiayaan proses perubahan, yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju kearah yang dicapai. Pada umumnya biaya pembangunan tersebut sudah diprogramkan dalam Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) yang diperuntukkan pada kebutuhan pembangunan sektor/sub sektor.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan di seluruh Daerah Tingkat II di Propinsi Jawa Timur dengan menggunakan daftar K-2 yang disusun oleh Badan Pusat Statistik. Sumber data diperoleh dari bagian Keuangan Kantor Bupati/Walikota Daerah Tingkat II di Jawa Timur.

BAB II

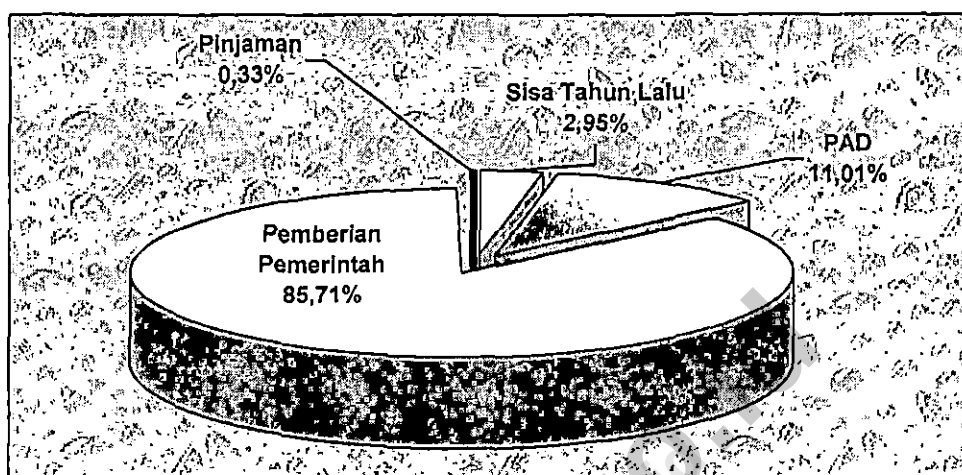
ULASAN RINGKAS

1. Penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tingkat II

Pada kondisi perekonomian yang masih belum ada tanda-tanda membaik saat ini, sedangkan program pembangunan di segala bidang baik ekonomi, hukum, keamanan dan sebagainya tetap harus dilaksanakan terutama yang menyangkut peningkatan kesejahteraan masyarakat, mengharuskan pemerintah daerah berupaya seoptimal mungkin untuk menggali dan mengembangkan sumber daya yang ada di setiap daerahnya. Hal tersebut selaras dengan kebijaksanaan di era otonomi yang telah bergulir dengan memberi kewenangan lebih luas kepada daerah untuk memanfaatkan penerimaan daerah dalam mendukung pengembangan perekonomian setempat.

Dengan jumlah 37 daerah tingkat II, Propinsi Jawa Timur secara administrasi terbagi atas 29 Kabupaten dan 8 Kotamadya, dengan kondisi alam dan budaya yang relatif berbeda antara satu dengan lainnya. Perbedaan kondisi alam ini menyebabkan potensi sumber daya alam juga berbeda antara daerah yang satu dengan lainnya. Dengan adanya kebijaksanaan otonomi daerah, diharapkan masing-masing pemerintah daerah mampu menggali potensi daerahnya untuk berkompetisi dengan daerah tingkat II yang lain dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Grafik A. Komposisi Penerimaan APBD Tk. II se Jawa Timur
Tahun Anggaran 1999/2000



Bagian sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu menunjukkan selisih antara Penerimaan dan Pengeluaran dari anggaran tahun sebelumnya. Dari grafik di atas, penerimaan APBD Tingkat II se Jawa Timur Tahun Anggaran 1999/2000 yang berasal dari sumber ini hanya sebesar 2,95 persen. Sedangkan penerimaan yang berasal dari Pinjaman Pemerintah Daerah juga relatif kecil yaitu hanya sebesar 0,33 persen.

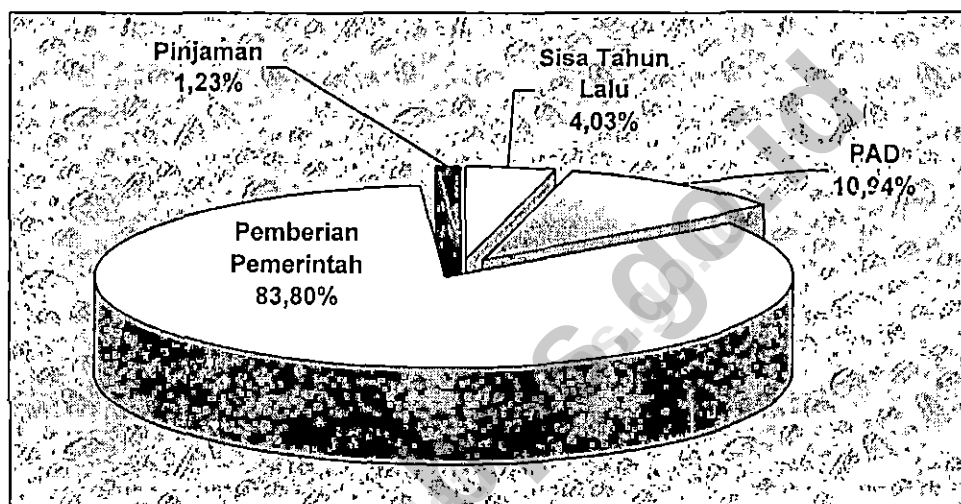
Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 1999/2000 memberi kontribusi terhadap penerimaan daerah sebesar 10,94 persen, dengan dukungan dari penerimaan sub bagian Pajak Daerah 43,62 persen, Retribusi Daerah 40,86 persen, Laba Usaha Daerah 4,52 persen dan Penerimaan Lain-lain sebesar 11,00 persen.

Bagian pendapatan yang berasal dari Pemberian Pemerintah dan atau instansi yang lebih tinggi memberi kontribusi terbesar terhadap penerimaan daerah yaitu sebesar 85,71 persen. Kontribusi ini didukung antara lain oleh penerimaan sub bagian Subsidi Daerah Otonomi 66,93 persen, sub bagian Bantuan Pembangunan

20,18 persen dan sub bagian Bagi Hasil Pajak 11,83 persen. Sedangkan sisanya didukung oleh sub bagian Bagi Hasil Bukan Pajak dan Penerimaan Lainnya masing-masing sebesar 0,20 persen dan 0,86 persen.

Grafik B. Komposisi Penerimaan APBD Tk. II se Jawa Timur

Tahun 2000



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa komposisi penerimaan APBD Tingkat II se Jawa Timur Tahun 2000 tidak berbeda jauh dengan tahun sebelumnya. Untuk penerimaan yang berasal dari Pemberian Pemerintah dan atau Instansi yang lebih tinggi masih merupakan sumber paling dominan yaitu sebesar 83,79 persen. Data ini dapat menggambarkan bahwa untuk mendanai kebutuhan daerah, baik belanja rutin maupun belanja pembangunan, Pemda tingkat II masih mengandalkan pendapatan dari pemberian pemerintah dan atau instansi yang lebih tinggi.

Pendapatan Asli Daerah tahun 2000 memberi kontribusi terhadap penerimaan APBD Tingkat II se Jawa Timur sebesar 10,94 persen, sedangkan

sisanya berasal dari Bagian Sisa Lebih penghitungan tahun lalu dan Pinjaman Pemerintah Daerah masing-masing sebesar 4,03 persen dan 1,23 persen.

Dari komposisi penerimaan APBD Tingkat II di atas, Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan dari Pemberian Pemerintah nampaknya selalu memberikan kontribusi lebih besar dibanding dua bagian yang lain. Untuk lebih mengetahui tentang dua sumber yang mempunyai kontribusi besar dari penerimaan tersebut, dan sekaligus melihat keberhasilan daerah dalam menggali potensi yang dimilikinya yang diwujudkan dalam PAD, berikut ini disampaikan uraian tentang kontribusi dari sumber-sumber tersebut terhadap total penerimaan APBD Tingkat II Tahun 2000.

1.1 Bagian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu

Jika dilihat dari bagian ini, dari seluruh daerah tingkat II di Jawa Timur hanya ada dua kabupaten yang sisa anggaran tahun sebelumnya memberikan kontribusi besar terhadap total penerimaan, yakni Kabupaten Lumajang yang sisa anggarannya sebesar 9,77 persen dan Kabupaten Tuban yang sisa anggarannya mencapai 10,55 persen. Sebaliknya terdapat 4 daerah tingkat II yang sisa anggaran tahun sebelumnya di bawah angka 1,00 persen terhadap total penerimaan daerah, yakni Kabupaten Ponorogo 0,66 persen, Kabupaten Malang 0,71 persen, Kabupaten Sumenep 0,93 persen dan Kota Pasuruan dengan sisa anggaran hanya 0,61 persen.

1.2 Pendapatan Asli Daerah

Pada tahun anggaran 2000, rata-rata kontribusi PAD terhadap total penerimaan masing-masing daerah tingkat II di Jawa Timur, sebesar 10,94 persen. Dengan demikian dapat diartikan bahwa untuk mendanai seluruh

kebutuhan/ pengeluaran, sekitar 10,94 persen diantaranya dapat dikumpulkan dari PAD.

Dari seluruh daerah tingkat II, Kota Surabaya merupakan daerah tingkat II yang kontribusi PAD-nya paling tinggi hingga mencapai sekitar 31,17 persen dari total penerimaan daerahnya. Sementara Kabupaten Sidoarjo menempati posisi kedua dengan kontribusi sekitar 23,72 persen. Disusul kemudian Kabupaten Gresik dan Kota Malang pada posisi ketiga dan keempat dengan kontribusi PAD yang hampir sama yaitu sekitar 17 persen. Sedangkan daerah tingkat II yang kontribusi PAD-nya paling kecil adalah Kabupaten Ponorogo dan Sumenep masing-masing hanya 3,57 persen dan 2,76 persen.

1.2.1 Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber dari penerimaan PAD, memiliki kontribusi yang bervariasi pada masing-masing tingkat II. Daerah yang mempunyai kontribusi terbesar untuk pajak daerah pada Tahun 2000 terhadap total penerimaan adalah Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik yang masing - masing memiliki kontribusi sebesar 16,45 persen dan 11,06 persen. Pajak daerah untuk Kota Surabaya banyak didukung dari pajak Hotel dan Restoran dan Pajak Penerangan Jalan, sedangkan Pajak Daerah Kabupaten Gresik banyak didukung dari pajak penerangan jalan. Sebanyak 8 Kabupaten yang kontribusi Pajak daerahnya kurang dari 1,00 persen terhadap total penerimaan daerah berturut-turut Kabupaten Pacitan (0,85 %), Ponorogo (0,96 %), Trenggalek (0,88 %), Blitar (0,95 %), Bojonegoro (0,90 %), Bangkalan

(0,79 %), Sampang (0,63 %) dan Kabupaten Sumenep dengan kontribusi pajak daerahnya hanya 0,80 %.

1.2.2 Retribusi Daerah

Kota Surabaya masih merupakan daerah tingkat II di Jawa Timur yang memiliki kontribusi retribusi daerah terbesar terhadap total penerimaan sebesar 11,42 persen disusul Kabupaten Sidoarjo dengan kontribusi sebesar 10,77 persen. Retribusi di Kota Surabaya banyak didukung oleh retribusi kebersihan dan retribusi pemakaian kekayaan daerah. Sedangkan Kabupaten Blitar dan Kabupaten Sumenep merupakan daerah tingkat II terkecil untuk kontribusi retribusi daerah terhadap total penerimaan yang masing-masing hanya mencapai 1,11 persen dan 1,34 persen.

1.2.3 Bagian Laba Usaha Daerah

Bagian Laba Usaha Daerah juga merupakan salah satu sumber dari penerimaan PAD. Ternyata hanya ada dua daerah tingkat II yang kontribusinya lebih dari dua persen, yaitu Kota Surabaya dan Kota Malang yang masing-masing memiliki kontribusi sebesar 2,11 persen dan 2,09 persen terhadap total penerimaan daerah. Baik Kota Surabaya maupun Kota Malang Laba usaha banyak disumbangkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Sedangkan sebanyak enam daerah diantaranya Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Pasuruan, Kota Kediri, Kota Blitar dan Kota Pasuruan tidak mempunyai kontribusi sama sekali.

1.2.4 Penerimaan Lain-lain

Kontribusi tertinggi untuk pos penerimaan lain-lain, adalah Kabupaten Jombang yang mencapai 7,85 persen. Penerimaan ini dapat berasal dari penerimaan dinas. Kota Kediri menempati posisi kedua dengan kontribusi sebesar 6,52 persen, penerimaan terutama berasal dari RSU Swadana Daerah.

1.3 Bagian Pendapatan yang Berasal dari Pemberian Pemerintah dan atau Instansi yang Lebih Tinggi

Sumber penerimaan pada bagian ini masih memberikan kontribusi yang cukup dominan terhadap total penerimaan daerah. Berikut disampaikan ulasan dari masing-masing pos pada bagian ini.

1.3.1 Bagi Hasil Pajak

Kota Surabaya kembali menempati posisi teratas dalam kontribusi bagi hasil pajak terhadap total penerimaan yang mencapai 20,70 persen, disusul Kabupaten Sumenep yang memberikan kontribusi sebesar 16,33 persen. Penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan serta Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan merupakan pendukung utama Penerimaan bagi hasil pajak di Kota Surabaya. Sedangkan Penerimaan bagi hasil pajak di Kabupaten Sumenep banyak didukung oleh Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

1.3.2 Bagi Hasil Bukan Pajak

Kontribusi dari Bagi Hasil Bukan Pajak relatif sangat kecil dibandingkan pos yang lain. Kota Surabaya yang memiliki kontribusi terbesar yang berasal dari sub bagian ini dibanding daerah tingkat II lainnya, hanya berada pada angka sebesar 0,74 persen. Penerimaan bagi hasil bukan pajak ini lebih banyak didukung oleh penerimaan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.

1.3.3 Subsidi Daerah Otonom

Subsidi daerah otonom merupakan pos penerimaan yang mempunyai kontribusi paling besar terhadap total penerimaan. Kota Surabaya untuk subsidi daerah otonomi merupakan daerah tingkat II terkecil kontribusinya terhadap total penerimaan yang hanya mencapai 20,53 persen. Sebaliknya Kabupaten Madiun dan Kabupaten Tulungagung merupakan dua daerah tingkat II yang mempunyai kontribusi terbesar untuk pos subsidi daerah otonom yang mencapai masing-masing 70,49 persen dan 69,46 persen terhadap total penerimaan daerah. Untuk Kab. Madiun subsidi daerah otonom 100 persen berasal dari Sumbangan lainnya dari pemerintah pusat. Sedangkan Kabupaten Tulungagung penerimaan subsidi daerah otonomi banyak didukung oleh penerimaan subsidi Belanja Pegawai.

1.3.4 Bantuan Pembangunan

Sama seperti pos subsidi daerah otonom, pada pos bantuan pembangunan Kota Surabaya kembali menjadi daerah tingkat II yang

memiliki Kontribusi terkecil terhadap total penerimaan dari sumber ini yang hanya mencapai 9,69 persen. Dibanding tiga daerah tingkat II yang memiliki kontribusi terbesar untuk bantuan pembangunan masing-masing Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Situbondo dan Kota Pasuruan dengan kontribusi sebesar 35,34 persen, 31,03 persen dan 31,64 persen. Kota Ponorogo bantuan pembangunan lebih banyak berasal dari bantuan lainnya, sedangkan Kabupaten Situbondo dan Kota Pasuruan bantuan pembangunan lebih banyak didukung dari Bantuan Pembangunan Dati II.

1.3.5 Penerimaan Lainnya

Pos Sumber penerimaan lainnya merupakan salah satu sumber yang paling kecil dibandingkan dengan sumber-sumber yang lain. Bahkan dari seluruh daerah tingkat II, hanya 12 daerah tingkat II yang mendapatkan penerimaan dari sumber ini. Penerimaan ini meliputi Penerimaan dari Pemerintah Pusat, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat I. Dari 12 daerah tingkat II tersebut, kontribusi terbesar dari pos ini adalah Kabupaten Bondowoso yang mencapai 1,10 persen, yang sebagian besar penerimaan ini berasal dari Pemerintah Pusat.

2. Pengeluaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tingkat II

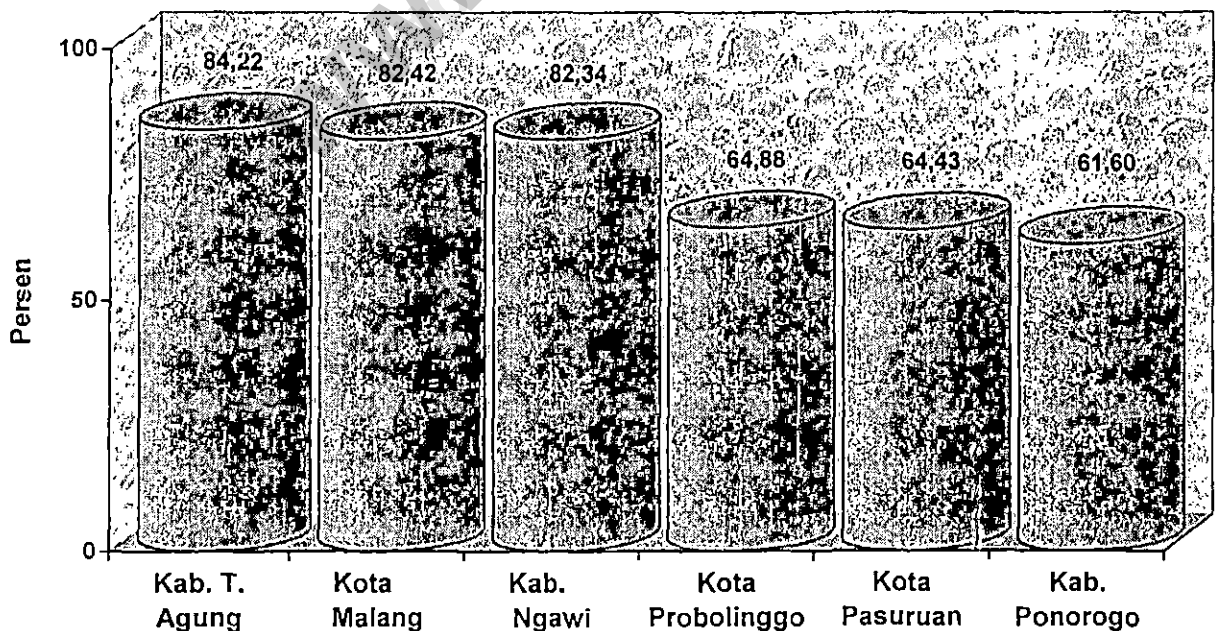
Pos Pengeluaran secara garis besar dikelompokkan menjadi dua bagian yakni Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan. Namun apabila diuraikan lebih rinci, sebenarnya pos pengeluaran ini mempunyai cukup banyak pos pengeluaran baik pada bagian pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Pada uraian berikut

akan disampaikan beberapa pos pengeluaran yang cukup besar saja, yaitu dengan mengacu pada persentase dari masing-masing sub-sub bagian pengeluaran.

2.1 Pengeluaran Rutin

Dari seluruh Daerah Tingkat II, persentase Pengeluaran Rutin lebih besar jika dibandingkan Pengeluaran Pembangunan. Kabupaten Tulungagung merupakan daerah tingkat II yang proporsi pengeluaran rutinnya tertinggi hingga mencapai 84,22 persen dari total pengeluaran, disusul Kabupaten Ngawi yang mencapai 82,34 persen dan Kota Malang mencapai 82,42 persen. Sedangkan Kabupaten Ponorogo merupakan daerah tingkat II yang paling kecil proporsi pengeluaran rutinnya yaitu sebesar 61,60 persen, disusul Kota Pasuruan dan Kota Probolinggo yang proporsi pengeluaran rutinnya mencapai 64,43 persen dan 64,88 persen.

Grafik C. Persentase Pengeluaran Rutin Terhadap Total Pengeluaran
Beberapa Daerah Tingkat II Tahun 2000



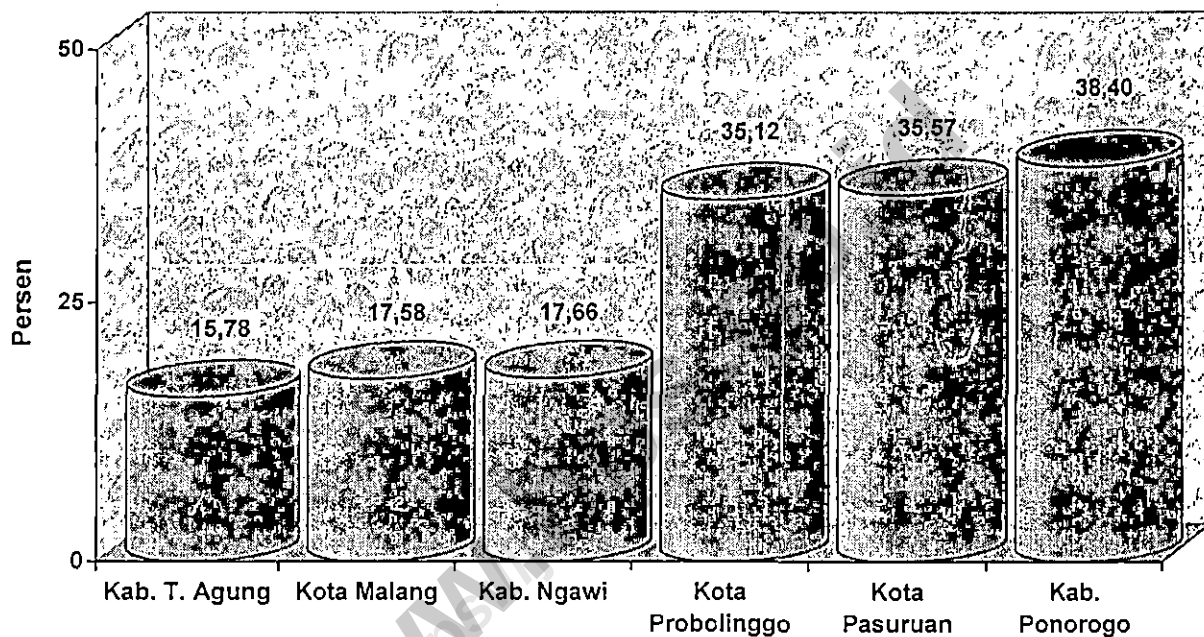
Alokasi Pengeluaran belanja rutin yang cukup besar antara lain untuk : belanja pegawai, belanja barang, biaya pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja lain-lain. Kabupaten Trenggalek merupakan dati II yang prosentase belanja pegawai terhadap total belanja rutin tertinggi dibanding dati II lainnya yang dipakai terutama untuk menutupi pembayaran gaji dan tunjangan pegawai. Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Probolinggo pada posisi berikutnya dalam prosentase belanja pegawai. Sementara Kota Surabaya merupakan dati II tertinggi bila dibanding daerah tingkat II yang lainnya pada prosentase belanja barang terutama barang-barang operasional kantor, disusul Kota Kediri. Kota Surabaya kembali menempati peringkat teratas untuk persentase penggunaan anggaran untuk biaya pemeliharaan terutama keperluan pemeliharaan gedung dan kantor, sedangkan Kabupaten Sidoarjo menduduki peringkat ke dua yang digunakan untuk biaya pemeliharaan kantor dan operasional kendaraan. Sekali lagi Kota Surabaya menjadi daerah tingkat II tertinggi dalam prosentase penggunaan anggaran untuk belanja lain-lain yang dirupakan sebagai uang perangsang / insentip, dan Kabupaten Sidoarjo pada urutan berikutnya dalam penggunaan anggaran untuk biaya operasional.

2.2. Belanja Pembangunan.

Dari seluruh pengeluaran APBD Tingkat II se Jawa Timur, 25,45 persen diantaranya dibelanjakan untuk pengeluaran pembangunan. Jika dilihat dari masing-masing daerah tingkat II, Kabupaten Tulungagung merupakan daerah tingkat II yang proporsi pengeluaran pembangunannya terendah yaitu sebesar 15,78 persen dari total pengeluaran, disusul Kabupaten Ngawi yang mencapai

17,66 persen dan Kota Malang mencapai 17,58 persen. Sedangkan Kabupaten Ponorogo merupakan daerah tingkat II yang paling besar proporsi pengeluaran pembangunannya yaitu sebesar 38,40 persen.

Grafik D. Persentase Pengeluaran Pembangunan Terhadap Total Pengeluaran Beberapa Daerah Tingkat II Tahun 2000



Dari seluruh pos pengeluaran dalam pengeluaran pembangunan, sektor transportasi merupakan pos pengeluaran paling besar yang mencapai 24,22 persen dari total pengeluaran pembangunan. Selanjutnya pengeluaran sebesar 16,26 persen dialokasikan untuk belanja pembangunan daerah dan pemukiman. Pada posisi ketiga ditempati pos untuk aparatur pemerintah yang mencapai 11,79 persen.

Persentase pos transportasi terhadap belanja pembangunan untuk Kabupaten Sampang, Kota Madiun dan Kabupaten Pamekasan adalah yang terbesar, terutama digunakan untuk meningkatkan prasarana jalan yang mencapai

lebih dari 40 persen dari total pengeluaran pembangunan. Sedangkan Kabupaten Ngawi merupakan daerah tingkat II terbesar dalam pengalokasian belanja pembangunan untuk meningkatkan aparatur pemerintahnya.

[www.bps.go.id](http://bps.go.id)

TABEL 1.1. REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH TK II

Kabupaten Pacitan
(000 RUPIAH)

Jenis Penerimaan		1999/2000	2000
(1)		(2)	(3)
A. PENERIMAAN DAERAH		80.048.491	82.149.787
1.	Bagian Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu	3.308.973	2.689.132
2.	Bagian Pendapatan asli daerah	3.399.391	4.133.847
2.1	Pajak Daerah	648.667	701.663
2.2	Retribusi Daerah	2.381.006	2.544.082
2.3	Bagian Laba Usaha Daerah/Penerimaan dari dinas-dinas	3.000	3.000
2.4	Penerimaan Lain-lain	366.718	885.102
3.	Bagian Pendapatan Yang Berasal dari Pemberian Pemerintah Dan Atau Instansi Yang Lebih Tinggi	73.340.127	75.326.808
3.1	Bagi Hasil Pajak	5.292.354	5.664.480
3.2	Bagi Hasil Bukan Pajak	95.814	32.845
3.3	Subsidi Daerah Otonom	51.733.929	47.604.044
3.4	Bantuan Pembangunan	15.914.398	21.826.040
3.5	Penerimaan Lainnya	303.632	199.399
4.	Pinjaman Pemerintah Daerah	-	-
4.1	Pinjaman Dari Pemerintah Pusat	-	-
4.2	Pinjaman Dari Lembaga Keuangan Dalam Negeri	-	-
4.3	Pinjaman Dari Luar Negeri	-	-
B. BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP)		10.935.573	5.852.301

TABEL 1.2. REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TK II

Kabupaten Pacitan
(000 RUPIAH)

Jenis Pengeluaran	1999/2000	2000
(1)	(2)	(3)
A. PENGELUARAN RUTIN	58.724.169	53.874.793
1. Belanja Pegawai	50.708.343	46.925.597
2. Belanja Barang	3.513.210	2.954.009
3. Biaya Pemeliharaan	741.719	702.132
4. Belanja Perjalanan Dinas	238.405	369.785
5. Belanja Lain-lain	2.461.162	1.830.071
6. Angsuran Pinjaman / Hutang Dan Bunga	-	-
7. Ganjaran/ Subsidi / Sumbangan Kepada Daerah Bawahan	807.085	821.045
8. Pengeluaran Yang Tidak Termasuk Bagian Lain	254.245	247.415
9. Pengeluaran Tidak Tersangku	-	24.739
B. PENGELUARAN PEMBANGUNAN	18.632.189	24.665.254
1. Industri	104.360	119.710
2. Pertanian Dan Kehutanan	821.579	1.153.643
3. Sumber Daya Air Dan Irigasi	88.797	335.832
4. Tenaga Kerja	13.000	21.750
5. Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan daerah dan koperasi	1.048.236	283.169
6. Transportasi	4.496.964	8.577.308
7. Pertambangan Dan Energi	53.308	125.420
8. Pariwisata Dan Telekomunikasi Daerah	441.505	462.227
9. Pembangunan Daerah Dan Pemukiman	365.025	354.590
10. Lingkungan Hidup Dan Tata Ruang	1.756.117	1.113.543
11. Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Thd Tuhan YME, Pemuda & OR	1.406.718	2.195.765
12. Kependudukan Dan Keluarga Sejahtera ✓	24.825	15.000
13. Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan remaja ✓	350.708	425.790
14. Perumahan Dan Pemukiman ✓	4.874.199	7.785.690
15. Agama	50.000	75.500
16. Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	213.350	245.326
17. Hukum	65.000	75.000
18. Aparatur Pemerintah Dan Pengawasan	2.362.723	1.105.238
19. Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	165.865	124.753
20. Keamanan Dan Keterliban Umum	19.910	70.000
21. Subsidi Pembangunan Kepada Daerah Bawahan	-	-
C Jumlah A + B	77.356.358	78.540.047
D. URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP)	10.513.212	5.838.961

TABEL 1.3. REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH TK II

Kabupaten Ponorogo

(000 RUPIAH)

Jenis Penerimaan	1999/2000	2000
(1)	(2)	(3)
A. PENERIMAAN DAERAH	115.223.177	126.634.134
1. Bagian Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu	1.583.626	840.369
2. Bagian Pendapatan asli daerah	5.257.005	4.519.087
2.1 Pajak Daerah	1.533.754	1.221.829
2.2 Retribusi Daerah	2.974.766	2.662.034
2.3 Bagian Laba Usaha Daerah/Penerimaan dari dinas-dinas	98.820	115.701
2.4 Penerimaan Lain-lain	649.665	519.523
3. Bagian Pendapatan Yang Berasal dari Pemberian Pemerintah Dan Atau Instansi Yang Lebih Tinggi	104.636.296	120.025.928
3.1 Bagi Hasil Pajak	7.522.111	8.372.106
3.2 Bagi Hasil Bukan Pajak	86.634	83.170
3.3 Subsidi Daerah Otonom	71.795.719	66.582.619
3.4 Bantuan Pembangunan	25.231.832	44.753.786
3.5 Penerimaan Lainnya	-	234.247
4. Pinjaman Pemerintah Daerah	3.746.250	1.248.750
4.1 Pinjaman Dari Pemerintah Pusat	-	-
4.2 Pinjaman Dari Lembaga Keuangan Dalam Negeri	3.746.250	1.248.750
4.3 Pinjaman Dari Luar Negeri	-	-
B BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP)	13.338.539	5.549.631

TABEL 1.4. REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TK II
Kabupaten Ponorogo
(000 RUPIAH)

Jenis Pengeluaran	1999/2000	2000
(1)	(2)	(3)
A. PENGELUARAN RUTIN	82.069.858	75.982.983
1. Belanja Pegawai	70.828.993	65.782.838
2. Belanja Barang	5.049.684	6.945.952
3. Biaya Pemeliharaan	1.120.481	854.128
4. Belanja Perjalanan Dinas	577.991	587.442
5. Belanja Lain-lain	2.301.209	-
6. Angsuran Pinjaman / Hutang Dan Bunga	103.299	191.775
7. Ganjaran/ Subsidi / Sumbangan Kepada Daerah Bawahan	1.342.748	1.098.802
8. Pengeluaran Yang Tidak Termasuk Bagian Lain	562.475	522.046
9. Pengeluaran Tidak Tersangka	182.978	-
B. PENGELUARAN PEMBANGUNAN	32.312.950	47.356.302
1. Industri	550.000	325.000
2. Pertanian Dan Kehutanan	2.016.051	1.452.398
3. Sumber Daya Air Dan Irigasi	512.971	7.511
4. Tenaga Kerja	50.000	50.000
5. Perdagangan, Pengembang, Usaha Daerah, Keuangan daerah dan koperasi	1.197.204	209.980
6. Transportasi	8.226.767	3.429.310
7. Pertambangan Dan Energi	25.000	30.000
8. Pariwisata Dan Telekomunikasi Daerah	292.000	197.000
9. Pembangunan Daerah Dan Pemukiman	5.262.673	13.444.926
10. Lingkungan Hidup Dan Tata Ruang	1.105.815	1.015.237
11. Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Thd Tuhan YME, Pemuda & OR	4.254.402	3.918.146
12. Kependudukan Dan Keluarga Sejahtera	-	-
13. Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan remaja	3.583.932	2.677.513
14. Perumahan Dan Pemukiman	1.181.455	887.501
15. Agama	75.000	196.970
16. Ilmu Pengetahuan Dan Tehnologi	-	154.640
17. Hukum	90.000	86.000
18. Aparatur Pemerintah Dan Pengawasan	3.266.484	2.800.678
19. Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	72.500	87.925
20. Keamanan Dan Ketertiban Umum	79.200	45.000
21. Subsidi Pembangunan Kepada Daerah Bawahan	471.496	16.340.567
C Jumlah A + B	114.382.808	123.339.285
D. URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP)	13.338.539	5.549.631

TABEL 1.5. REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH TK II
Kabupaten Trenggalek
(000 RUPIAH)

Jenis Penerimaan		1999/2000	2000
(1)		(2)	(3)
A. PENERIMAAN DAERAH		92.958.476	93.659.489
1.	Bagian Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu	4.003.546	5.383.040
2.	Bagian Pendapatan asli daerah	3.767.084	4.170.670
2.1	Pajak Daerah	829.948	828.662
2.2	Retribusi Daerah	1.779.703	1.390.530
2.3	Bagian Laba Usaha Daerah	-	-
2.4	Penerimaan Lain-lain	1.157.434	1.951.478
3.	Bagian Pendapatan Yang Berasal dari Pemberian Pemerintah Dan Atau Instansi Yang Lebih Tinggi	85.187.845	84.105.779
3.1	Bagi Hasil Pajak	6.045.459	7.704.228
3.2	Bagi Hasil Bukan Pajak	19.924	23.942
3.3	Subsidi Daerah Otonom	64.514.108	58.904.924
3.4	Bantuan Pembangunan	12.823.083	16.933.322
3.5	Penerimaan Lainnya	1.785.271	539.363
4.	Pinjaman Pemerintah Daerah	-	-
4.1	Pinjaman Dari Pemerintah Pusat	-	-
4.2	Pinjaman Dari Lembaga Keuangan Dalam Negeri	-	-
4.3	Pinjaman Dari Luar Negeri	-	-
B. BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP)		13.131.775	5.776.722

TABEL 1.6. REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TK II

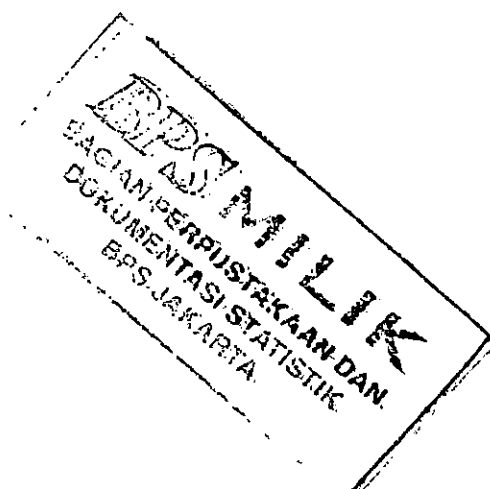
Kabupaten Trenggalek
(000 RUPIAH)

Jenis Pengeluaran	1999/2000	2000
(1)	(2)	(3)
A. PENGELUARAN RUTIN	72.011.497	65.932.930
1. Belanja Pegawai	63.694.976	59.872.508
2. Belanja Barang	3.284.730	3.864.795
3. Biaya Pemeliharaan	561.846	512.200
4. Belanja Perjalanan Dinas	245.542	282.525
5. Belanja Lain-lain	2.597.083	-
6. Angsuran Pinjaman / Hutang Dan Bunga	-	-
7. Ganjaran/ Subsidi / Sumbangan Kepada Daerah Bawahan	676.351	618.250
8. Pengeluaran Yang Tidak Termasuk Bagian Lain	950.969	782.653
9. Pengeluaran Tidak Tersangka	-	-
B. PENGELUARAN PEMBANGUNAN	15.563.038	19.574.792
1. Industri	69.900	84.900
2. Pertanian Dan Kehutanan	934.322	1.535.994
3. Sumber Daya Air Dan Irigasi	45.000	1.145.729
4. Tenaga Kerja	33.000	20.000
5. Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan daerah dan koperasi	1.391.463	170.675
6. Transportasi	2.364.595	4.001.006
7. Pertambangan Dan Energi	65.000	25.000
8. Pariwisata Dan Telekomunikasi Daerah	540.000	775.885
9. Pembangunan Daerah Dan Pemukiman	450.000	1.423.605
10. Lingkungan Hidup Dan Tata Ruang	1.920.277	873.180
11. Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Thd Tuhan YME, Pemuda & OR	1.500.556	1.117.640
12. Kependudukan Dan Keluarga Sejahtera	-	-
13. Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan remaja	612.305	878.112
14. Perumahan Dan Pemukiman	1.261.578	4.543.478
15. Agama	90.000	100.000
16. Ilmu Pengetahuan Dan Tehnologi	183.500	179.975
17. Hukum	37.000	30.000
18. Aparatur Pemerintah Dan Pengawasan	2.381.850	1.764.019
19. Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	60.000	240.000
20. Keamanan Dan Ketertiban Umum	118.808	15.000
21. Subsidi Pembangunan Kepada Daerah Bawahan	1.503.885	650.594
C Jumlah A + B	87.574.536	85.507.722
D. URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP)	13.382.720	5.760.517

TABEL 1.7. REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH TK II

Kabupaten Tulungagung
(000 RUPIAH)

Jenis Penerimaan		1999/2000	2000
(1)		(2)	(3)
A. PENERIMAAN DAERAH		123.677.511	111.061.679
1.	Bagian Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu	2.733.867	2.746.399
2.	Bagian Pendapatan asli daerah	7.801.870	6.855.722
2.1	Pajak Daerah	2.078.482	1.932.543
2.2	Retribusi Daerah	4.893.306	4.381.917
2.3	Bagian Laba Usaha Daerah	8.685	20.160
2.4	Penerimaan Lain-lain	821.397	521.102
3.	Bagian Pendapatan Yang Berasal dari Pemberian Pemerintah Dan Atau Instansi Yang Lebih Tinggi	112.255.545	101.459.558
3.1	Bagi Hasil Pajak	8.735.237	9.186.649
3.2	Bagi Hasil Bukan Pajak	84.447	60.923
3.3	Subsidi Daerah Otonom	86.226.013	77.139.365
3.4	Bantuan Pembangunan	17.209.848	15.072.621
3.5	Penerimaan Lainnya	-	-
4.	Pinjaman Pemerintah Daerah	886.229	-
4.1	Pinjaman Dari Pemerintah Pusat	886.229	-
4.2	Pinjaman Dari Lembaga Keuangan Dalam Negeri	-	-
4.3	Pinjaman Dari Luar Negeri	-	-
B. BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP)		15.243.129	6.876.688



TABEL 1.8. REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TK II
Kabupaten Tulungagung
(000 RUPIAH)

Jenis Pengeluaran		1999/2000	2000
(1)		(2)	(3)
A. PENGELUARAN RUTIN		99.424.728	91.062.445
1.	Belanja Pegawai	84.882.231	76.552.038
2.	Belanja Barang	6.630.576	6.678.515
3.	Biaya Pemeliharaan	1.230.885	1.192.006
4.	Belanja Perjalanan Dinas	715.414	682.264
5.	Belanja Lain-lain	2.949.429	2.144.003
6.	Angsuran Pinjaman / Hutang Dan Bunga	242.153	272.197
7.	Ganjaran/ Subsidi / Sumbangan Kepada Daerah Bawahan	955.870	809.947
8.	Pengeluaran Yang Tidak Termasuk Bagian Lain	1.770.670	1.287.495
9.	Pengeluaran Tidak Tersangka	47.500	1.443.980
B. PENGELUARAN PEMBANGUNAN		21.770.933	17.057.895
1.	Industri	544.986	40.000
2.	Pertanian Dan Kehutanan	2.132.028	1.816.020
3.	Sumber Daya Air Dan Irigasi	106.000	174.823
4.	Tenaga Kerja	30.000	60.000
5.	Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan daerah dan koperasi	686.615	560.426
6.	Transportasi	5.837.553	5.641.442
7.	Pertambangan Dan Energi	20.000	35.500
8.	Pariwisata Dan Telekomunikasi Daerah	486.000	203.000
9.	Pembangunan Daerah Dan Pemukiman	5.278.886	3.167.103
10.	Lingkungan Hidup Dan Tata Ruang	424.145	229.070
11.	Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Thd Tuhan YME, Pemuda & OR	1.464.236	879.183
12.	Kependudukan Dan Keluarga Sejahtera	5.000	5.000
13.	Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan remaja	2.273.794	1.212.027
14.	Perumahan Dan Pemukiman	40.000	243.959
15.	Agama	26.875	85.000
16.	Ilmu Pengetahuan Dan Tehnologi	404.300	385.700
17.	Hukum	105.000	89.754
18.	Aparatur Pemerintah Dan Pengawasan	1.339.270	1.987.974
19.	Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	451.245	211.914
20.	Keamanan Dan Ketertiban Umum	115.000	30.000
21.	Subsidi Pembangunan Kepada Daerah Bawahan	-	-
C Jumlah A + B		121.195.661	108.120.340
D. URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP)		15.243.129	6.876.688

TABEL 1.9. REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH TK II
Kabupaten Blitar
(000 RUPIAH)

Jenis Penerimaan		1999/2000	2000
(1)		(2)	(3)
A. PENERIMAAN DAERAH		153.757.516	141.445.921
1.	Bagian Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu	2.388.450	5.461.659
2.	Bagian Pendapatan asli daerah	6.302.183	6.513.609
2.1	Pajak Daerah	1.249.621	1.348.387
2.2	Retribusi Daerah	1.756.041	1.572.616
2.3	Bagian Laba Usaha Daerah	49.859	53.900
2.4	Penerimaan Lain-lain	3.246.661	3.538.706
3.	Bagian Pendapatan Yang Berasal dari Pemberian Pemerintah Dan Atau Instansi Yang Lebih Tinggi	144.778.510	129.470.652
3.1	Bagi Hasil Pajak	10.705.881	9.504.351
3.2	Bagi Hasil Bukan Pajak	52.883	46.221
3.3	Subsidi Daerah Otonom	92.709.208	84.989.139
3.4	Bantuan Pembangunan	41.310.539	34.930.942
3.5	Penerimaan Lainnya	-	-
4.	Pinjaman Pemerintah Daerah	288.373	-
4.1	Pinjaman Dari Pemerintah Pusat	-	-
4.2	Pinjaman Dari Lembaga Keuangan Dalam Negeri	238.373	-
4.3	Pinjaman Dari Luar Negeri	-	-
B BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP)		17.964.098	8.095.826

TABEL 1.10. REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TK II
Kabupaten Blitar
(000 RUPIAH)

Jenis Pengeluaran	1999/2000	2000
(1)	(2)	(3)
A. PENGELUARAN RUTIN	102.433.970	98.166.517
1. Belanja Pegawai	90.085.502	84.264.912
2. Belanja Barang	5.240.349	7.221.659
3. Biaya Pemeliharaan	964.105	1.107.965
4. Belanja Perjalanan Dinas	339.103	523.601
5. Belanja Lain-lain	4.723.537	3.413.729
6. Angsuran Pinjaman / Hutang Dan Bunga	20.809	34.478
7. Ganjaran/ Subsidi / Sumbangan Kepada Daerah Bawahan	798.755	715.745
8. Pengeluaran Yang Tidak Termasuk Bagian Lain	201.810	259.708
9. Pengeluaran Tidak Tersangka	60.000	624.720
B. PENGELUARAN PEMBANGUNAN	45.861.866	38.511.712
1. Industri	203.000	57.500
2. Pertanian Dan Kehutanan	1.628.774	1.333.751
3. Sumber Daya Air Dan Irigasi	226.941	339.500
4. Tenaga Kerja	611.375	-
5. Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan daerah dan koperasi	2.340.091	680.888
6. Transportasi	5.864.900	6.701.219
7. Pertambangan Dan Energi	61.470	126.232
8. Pariwisata Dan Telekomunikasi Daerah	315.090	497.614
9. Pembangunan Daerah Dan Pemukiman	13.483.351	14.585.530
10. Lingkungan Hidup Dan Tata Ruang	2.540.931	1.500.877
11. Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Thd Tuhan YME, Pemuda & OR	7.021.100	5.041.811
12. Kependudukan Dan Keluarga Sejahtera	109.718	75.600
13. Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan remaja	3.437.852	2.802.897
14. Perumahan Dan Pemukiman	3.672.215	1.354.685
15. Agama	53.500	345.000
16. Ilmu Pengetahuan Dan Tehnologi	261.500	156.485
17. Hukum	75.500	118.000
18. Aparatur Pemerintah Dan Pengawasan	3.003.985	2.556.985
19. Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	544.074	189.638
20. Keamanan Dan Ketertiban Umum	56.500	47.500
21. Subsidi Pembangunan Kepada Daerah Bawahan	350.000	
C Jumlah A + B	148.295.837	136.678.230
D. URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP)	17.964.098	8.095.826

TABEL 1.11. REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH TK II

Kabupaten Kediri

(000 RUPIAH)

Jenis Penerimaan		1999/2000	2000
(1)		(2)	(3)
A. PENERIMAAN DAERAH		148.720.901	146.522.951
1.	Bagian Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu	3.242.281	5.876.886
2.	Bagian Pendapatan asli daerah	9.633.889	12.458.409
2.1	Pajak Daerah	3.584.064	3.959.350
2.2	Retribusi Daerah	5.556.146	7.772.735
2.3	Bagian Laba Usaha Daerah	164.992	264.080
2.4	Penerimaan Lain-lain	328.687	462.244
3.	Bagian Pendapatan Yang Berasal dari Pemberian Pemerintah Dan Atau Instansi Yang Lebih Tinggi	135.844.731	128.187.656
3.1	Bagi Hasil Pajak	14.527.948	16.248.933
3.2	Bagi Hasil Bukan Pajak	64.084	79.156
3.3	Subsidi Daerah Otonom	99.915.992	92.673.075
3.4	Bantuan Pembangunan	21.336.707	19.186.492
3.5	Penerimaan Lainnya	-	-
4.	Pinjaman Pemerintah Daerah		
4.1	Pinjaman Dari Pemerintah Pusat	-	-
4.2	Pinjaman Dari Lembaga Keuangan Dalam Negeri	-	-
4.3	Pinjaman Dari Luar Negeri	-	-
B. BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP)		18.809.024	8.053.958

TABEL 1.12. REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TK II

Kabupaten Kediri

(000 RUPIAH)

Kabupaten : Kediri

Jenis Pengeluaran		1999/2000	2000
(1)		(2)	(3)
A. PENGELUARAN RUTIN		113.113.004	110.045.650
1.	Belanja Pegawai	98.195.016	91.034.714
2.	Belanja Barang	6.367.981	8.433.810
3.	Biaya Pemeliharaan	854.414	950.971
4.	Belanja Perjalanan Dinas	291.932	214.747
5.	Belanja Lain-lain	5.570.588	7.443.839
6.	Angsuran Pinjaman / Hutang Dan Bunga	-	-
7.	Ganjaran/ Subsidi / Sumbangan Kepada Daerah Bawahan	1.188.422	1.023.781
8.	Pengeluaran Yang Tidak Termasuk Bagian Lain	644.651	943.788
9.	Pengeluaran Tidak Tersangka	-	-
B. PENGELUARAN PEMBANGUNAN		29.474.132	27.440.197
1.	Industri	665.000	275.000
2.	Pertanian Dan Kehutanan	746.685	2.407.503
3.	Sumber Daya Air Dan Irigasi	90.000	915.000
4.	Tenaga Kerja	-	156.607
5.	Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan daerah dan koperasi	758.315	2.371.475
6.	Transportasi	1.035.509	4.612.553
7.	Pertambangan Dan Energi	47.463	84.745
8.	Pariwisata Dan Telekomunikasi Daerah	105.340	476.690
9.	Pembangunan Daerah Dan Pemukiman	15.525.674	1.556.463
10.	Lingkungan Hidup Dan Tata Ruang	969.776	1.149.337
11.	Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Thd Tuhan YME, Pemuda & OR	1.944.376	3.039.657
12.	Kependudukan Dan Keluarga Sejahtera	60.650	862.549
13.	Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan remaja	274.412	1.163.909
14.	Perumahan Dan Pemukiman	650.573	997.312
15.	Agama	2.983.600	2.300.000
16.	Ilmu Pengetahuan Dan Tehnologi	10.000	534.542
17.	Hukum	90.000	125.000
18.	Aparatur Pemerintah Dan Pengawasan	2.416.482	4.245.941
19.	Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	220.625	126.000
20.	Keamanan Dan Ketertiban Umum	879.653	39.914
21.	Subsidi Pembangunan Kepada Daerah Bawahan	-	-
C Jumlah A + B		142.587.136	137.485.847
D. URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP)		18.809.024	8.043.777

TABEL 1.13. REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH TK II
Kabupaten Malang
(000 RUPIAH)

Jenis Penerimaan		1999/2000	2000
(1)		(2)	(3)
A. PENERIMAAN DAERAH		215.034.843	186.619.828
1.	Bagian Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu	206.495	1.333.603
2.	Bagian Pendapatan asli daerah	18.478.925	13.149.269
2.1	Pajak Daerah	9.187.667	7.289.508
2.2	Retribusi Daerah	8.295.063	5.518.352
2.3	Bagian Laba Usaha Daerah	223.000	75.000
2.4	Penerimaan Lain-lain	773.195	266.409
3.	Bagian Pendapatan Yang Berasal dari Pemberian Pemerintah Dan Atau Instansi Yang Lebih Tinggi	196.349.423	172.136.956
3.1	Bagi Hasil Pajak	17.660.048	17.749.388
3.2	Bagi Hasil Bukan Pajak	164.451	186.208
3.3	Subsidi Daerah Otonom	134.353.709	125.556.506
3.4	Bantuan Pembangunan	43.313.215	28.501.354
3.5	Penerimaan Lainnya	858.000	143.500
4.	Pinjaman Pemerintah Daerah		
4.1	Pinjaman Dari Pemerintah Pusat	-	-
4.2	Pinjaman Dari Lembaga Keuangan Dalam Negeri	-	-
4.3	Pinjaman Dari Luar Negeri	-	-
B BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP)		30.836.994	16.858.121

TABEL 1.14. REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TK II
Kabupaten Malang
(000 RUPIAH)

Jenis Pengeluaran	1999/2000	2000
(1)	(2)	(3)
A. PENGELUARAN RUTIN	155.031.690	147.119.515
1. Belanja Pegawai	132.035.670	123.162.098
2. Belanja Barang	8.117.282	8.057.652
3. Biaya Pemeliharaan	1.079.114	1.022.070
4. Belanja Perjalanan Dinas	765.254	374.580
5. Belanja Lain-lain	7.051.468	8.151.752
6. Angsuran Pinjaman / Hutang Dan Bunga	328.258	-
7. Ganjaran/ Subsidi / Sumbangan Kepada Daerah Bawahan	1.462.025	1.231.928
8. Pengeluaran Yang Tidak Termasuk Bagian Lain	1.170.610	1.290.579
9. Pengeluaran Tidak Tersangka	3.022.009	3.828.856
B. PENGELUARAN PEMBANGUNAN	58.668.797	38.888.802
1. Industri	945.000	135.000
2. Pertanian Dan Kehutanan	1.331.105	1.170.932
3. Sumber Daya Air Dan Irigasi	5.050.697	720.050
4. Tenaga Kerja	30.000	40.000
5. Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan daerah dan koperasi	1.507.244	254.312
6. Transportasi	18.419.185	12.871.442
7. Pertambangan Dan Energi	17.500	250.000
8. Pariwisata Dan Telekomunikasi Daerah	508.618	1.608.500
9. Pembangunan Daerah Dan Pemukiman	4.518.295	4.095.746
10. Lingkungan Hidup Dan Tata Ruang	2.887.059	1.284.950
11. Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Thd Tuhan YME, Pemuda & OR	5.108.773	2.678.940
12. Kependudukan Dan Keluarga Sejahtera	3.005.500	316.368
13. Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan remaja	3.483.942	457.617
14. Perumahan Dan Pemukiman	589.629	1.391.635
15. Agama	1.785.450	690.000
16. Ilmu Pengetahuan Dan Tehnologi	942.658	1.070.000
17. Hukum	107.500	85.000
18. Aparatur Pemerintah Dan Pengawasan	7.052.842	8.839.109
19. Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	476.000	164.551
20. Keamanan Dan Ketertiban Umum	901.800	764.650
21. Subsidi Pembangunan Kepada Daerah Bawahan	-	-
C Jumlah A + B	213.700.487	186.008.317
D. URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP)	30.836.994	15.658.121

TABEL 1.15. REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH TK II
Kabupaten Lumajang
(000 RUPIAH)

Jenis Penerimaan		1999/2000	2000
(1)		(2)	(3)
A. PENERIMAAN DAERAH		102.640.029	106.144.742
1.	Bagian Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu	1.868.762	10.373.187
2.	Bagian Pendapatan asli daerah	9.214.932	8.034.134
2.1	Pajak Daerah	2.653.837	2.100.015
2.2	Retribusi Daerah	5.587.269	4.714.080
2.3	Bagian Laba Usaha Daerah	43.000	64.025
2.4	Penerimaan Lain-lain	930.826	1.156.013
3.	Bagian Pendapatan Yang Berasal dari Pemberian Pemerintah Dan Atau Instansi Yang Lebih Tinggi	91.556.335	87.737.422
3.1	Bagi Hasil Pajak	8.886.795	9.092.986
3.2	Bagi Hasil Bukan Pajak	156.562	107.146
3.3	Subsidi Daerah Otonom	68.241.107	62.763.578
3.4	Bantuan Pembangunan	14.001.161	15.756.972
3.5	Penerimaan Lainnya	270.710	16.740
4.	Pinjaman Pemerintah Daerah		
4.1	Pinjaman Dari Pemerintah Pusat	-	-
4.2	Pinjaman Dari Lembaga Keuangan Dalam Negeri	-	-
4.3	Pinjaman Dari Luar Negeri	-	-
B BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP)		12.738.149	5.290.026

TABEL 1.16. REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TK II
Kabupaten Lumajang
(000 RUPIAH)

Jenis Pengeluaran	1999/2000	2000
(1)	(2)	(3)
A. PENGELUARAN RUTIN	80.083.988	74.026.353
1. Belanja Pegawai	66.663.500	61.818.949
2. Belanja Barang	5.198.667	4.639.794
3. Biaya Pemeliharaan	806.058	619.910
4. Belanja Perjalanan Dinas	155.675	331.914
5. Belanja Lain-lain	5.486.076	4.969.226
6. Angsuran Pinjaman / Hutang Dan Bunga	159.579	125.347
7. Ganjaran/ Subsidi / Sumbangan Kepada Daerah Bawahan	719.974	759.652
8. Pengeluaran Yang Tidak Termasuk Bagian Lain	436.914	217.087
9. Pengeluaran Tidak Tersangka	457.545	544.475
B. PENGELUARAN PEMBANGUNAN	17.690.217	25.176.570
1. Industri	99.339	79.960
2. Pertanian Dan Kehutanan	1.214.850	1.029.308
3. Sumber Daya Air Dan Irigasi	362.380	164.749
4. Tenaga Kerja	150.940	189.996
5. Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan daerah dan koperasi	828.289	776.970
6. Transportasi	2.686.954	4.870.349
7. Pertambangan Dan Energi	17.000	-
8. Pariwisata Dan Telekomunikasi Daerah	214.250	274.905
9. Pembangunan Daerah Dan Pemukiman	2.426.000	3.119.527
10. Lingkungan Hidup Dan Tata Ruang	1.589.968	1.281.580
11. Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Thd Tuhan YME, Pemuda & OR	910.636	1.975.435
12. Kependudukan Dan Keluarga Sejahtera	174.164	270.180
13. Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan remaja	1.092.946	1.305.855
14. Perumahan Dan Pemukiman	1.084.969	2.826.803
15. Agama	207.500	116.000
16. Ilmu Pengetahuan Dan Tehnologi	750.240	700.462
17. Hukum	123.309	275.154
18. Aparatur Pemerintah Dan Pengawasan	3.190.500	5.788.698
19. Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	203.998	105.640
20. Keamanan Dan Ketertiban Umum	361.985	25.000
21. Subsidi Pembangunan Kepada Daerah Bawahan	-	-
C Jumlah A + B	97.774.205	99.202.923
D. URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP)	12.738.149	5.289.821

TABEL 1.17. REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH TK II
Kabupaten Jember
(000 RUPIAH)

Jenis Penerimaan	1999/2000	2000
(1)	(2)	(3)
A. PENERIMAAN DAERAH	203.346.622	211.582.921
1. Bagian Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu	6.344.071	7.191.395
2. Bagian Pendapatan asli daerah	24.974.914	16.981.627
2.1 Pajak Daerah	4.723.027	4.015.314
2.2 Retribusi Daerah	11.276.673	9.736.271
2.3 Bagian Laba Usaha Daerah	8.177.515	2.262.638
2.4 Penerimaan Lain-lain	797.699	967.404
3. Bagian Pendapatan Yang Berasal dari Pemberian Pemerintah Dan Atau Instansi Yang Lebih Tinggi	172.027.637	186.754.484
3.1 Bagi Hasil Pajak	13.849.591	15.836.878
3.2 Bagi Hasil Bukan Pajak	770.340	140.725
3.3 Subsidi Daerah Otonom	134.099.118	123.805.821
3.4 Bantuan Pembangunan	23.308.588	46.938.060
3.5 Penerimaan Lainnya	-	33.000
4. Pinjaman Pemerintah Daerah	-	655.415
4.1 Pinjaman Dari Pemerintah Pusat	-	655.415
4.2 Pinjaman Dari Lembaga Keuangan Dalam Negeri	-	-
4.3 Pinjaman Dari Luar Negeri	-	-
B BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP)	24.738.798	8.915.434

TABEL 1.18. REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TK II

Kabupaten Jember

(000 RUPIAH)

Jenis Pengeluaran	1999/2000	2000
(1)	(2)	(3)
A. PENGELUARAN RUTIN	162.524.086	148.762.932
1. Belanja Pegawai	130.208.249	120.370.562
2. Belanja Barang	12.913.490	11.368.947
3. Biaya Pemeliharaan	2.602.521	1.796.292
4. Belanja Perjalanan Dinas	820.338	344.141
5. Belanja Lain-lain	8.270.008	8.435.159
6. Angsuran Pinjaman / Hutang Dan Bunga	297.961	156.551
7. Ganjaran/ Subsidi / Sumbangan Kepada Daerah Bawahan	4.855.876	4.147.002
8. Pengeluaran Yang Tidak Termasuk Bagian Lain	1.626.004	1.270.998
9. Pengeluaran Tidak Tersangka	929.639	873.280
B. PENGELUARAN PEMBANGUNAN	33.631.142	54.396.329
1. Industri	511.000	805.000
2. Pertanian Dan Kehutanan	2.681.654	2.476.268
3. Sumber Daya Air Dan Irigasi	2.268.231	3.672.353
4. Tenaga Kerja	121.500	100.000
5. Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan daerah dan koperasi	1.020.246	1.545.105
6. Transportasi	3.799.336	7.905.213
7. Pertambangan Dan Energi	288.000	420.000
8. Pariwisata Dan Telekomunikasi Daerah	1.194.637	609.750
9. Pembangunan Daerah Dan Pemukiman	3.931.766	14.325.399
10. Lingkungan Hidup Dan Tata Ruang	1.291.837	853.423
11. Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Thd Tuhan YME, Pemuda & OR	1.224.550	8.799.590
12. Kependudukan Dan Keluarga Sejahtera	68.640	10.000
13. Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan remaja	2.310.788	4.929.900
14. Perumahan Dan Pemukiman	2.437.610	1.714.564
15. Agama	585.842	942.131
16. Ilmu Pengetahuan Dan Tehnologi	1.616.850	599.863
17. Hukum	209.000	121.170
18. Aparatur Pemerintah Dan Pengawasan	5.907.485	4.301.066
19. Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	1.304.545	140.104
20. Keamanan Dan Ketertiban Umum	697.875	125.430
21. Subsidi Pembangunan Kepada Daerah Bawahan	159.750	-
C Jumlah A + B	196.155.228	203.159.261
D. URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP)	24.738.798	8.915.434

TABEL 1.19. REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH TK II
Kabupaten Banyuwangi
(000 RUPIAH)

Jenis Penerimaan	1999/2000	2000
(1)	(2)	(3)
A. PENERIMAAN DAERAH	167.127.250	162.475.083
1. Bagian Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu	4.445.872	3.931.933
2. Bagian Pendapatan asli daerah	12.353.227	10.352.777
2.1 Pajak Daerah	3.578.874	3.773.181
2.2 Retribusi Daerah	8.183.931	5.915.442
2.3 Bagian Laba Usaha Daerah	90.950	125.000
2.4 Penerimaan Lain-lain	499.472	539.154
3. Bagian Pendapatan Yang Berasal dari Pemberian Pemerintah Dan Atau Instansi Yang Lebih Tinggi	150.328.151	148.021.149
3.1 Bagi Hasil Pajak	13.126.327	12.667.699
3.2 Bagi Hasil Bukan Pajak	206.946	188.249
3.3 Subsidi Daerah Otonom	103.307.549	94.444.036
3.4 Bantuan Pembangunan	33.413.079	40.271.829
3.5 Penerimaan Lainnya	274.250	449.336
4. Pinjaman Pemerintah Daerah		169.224
4.1 Pinjaman Dari Pemerintah Pusat	-	169.224
4.2 Pinjaman Dari Lembaga Keuangan Dalam Negeri	-	-
4.3 Pinjaman Dari Luar Negeri	-	-
B BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP)	19.684.324	8.577.569

TABEL 1.20. REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TK II
Kabupaten Banyuwangi
(000 RUPIAH)

Jenis Pengeluaran	1999/2000	2000
(1)	(2)	(3)
A. PENGELUARAN RUTIN	122.483.501	113.891.307
1. Belanja Pegawai	101.535.416	93.830.178
2. Belanja Barang	8.920.301	9.868.209
3. Biaya Pemeliharaan	1.808.617	2.036.053
4. Belanja Perjalanan Dinas	310.804	313.640
5. Belanja Lain-lain	7.453.655	5.233.950
6. Angsuran Pinjaman / Hutang Dan Bunga	229.947	158.143
7. Ganjaran/ Subsidi / Sumbangan Kepada Daerah Bawahan	546.516	746.081
8. Pengeluaran Yang Tidak Termasuk Bagian Lain	1.678.245	1.577.718
9. Pengeluaran Tidak Tersangka	-	127.335
B. PENGELUARAN PEMBANGUNAN	40.711.836	43.979.182
1. Industri	710.850	85.075
2. Pertanian Dan Kehutanan	1.909.165	1.117.047
3. Sumber Daya Air Dan Irigasi	442.341	337.358
4. Tenaga Kerja	356.695	-
5. Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan daerah dan koperasi	1.412.004	757.070
6. Transportasi	9.061.389	11.826.718
7. Pertambangan Dan Energi	48.935	-
8. Pariwisata Dan Telekomunikasi Daerah	262.754	160.030
9. Pembangunan Daerah Dan Pemukiman	2.204.960	9.568.932
10. Lingkungan Hidup Dan Tata Ruang	1.554.414	1.184.473
11. Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Thd Tuhan YME, Pemuda & OR	5.934.093	4.071.570
12. Kependudukan Dan Keluarga Sejahtera	1.337.290	900.000
13. Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan remaja	3.362.502	6.824.694
14. Perumahan Dan Pemukiman	5.366.274	3.166.165
15. Agama	245.750	280.000
16. Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	832.554	588.844
17. Hukum	164.776	72.500
18. Aparatur Pemerintah Dan Pengawasan	4.238.764	2.923.201
19. Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	338.801	23.000
20. Keamanan Dan Ketertiban Umum	927.525	92.505
21. Subsidi Pembangunan Kepada Daerah Bawahan	-	-
C Jumlah A + B	163.195.337	157.870.489
D. URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP)	10.513.212	10.513.212

TABEL 1.21. REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH TK II
Kabupaten Bondowoso
(000 RUPIAH)

Jenis Penerimaan		1999/2000	2000
(1)		(2)	(3)
A. PENERIMAAN DAERAH		84.603.797	78.170.841
1.	Bagian Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu	2.896.349	2.194.867
2.	Bagian Pendapatan asli daerah	4.176.604	4.162.785
2.1	Pajak Daerah	1.357.357	1.240.275
2.2	Retribusi Daerah	2.475.299	2.525.347
2.3	Bagian Laba Usaha Daerah	-	-
2.4	Penerimaan Lain-lain	343.948	397.163
3.	Bagian Pendapatan Yang Berasal dari Pemberian Pemerintah Dan Atau Instansi Yang Lebih Tinggi	77.530.844	71.813.189
3.1	Bagi Hasil Pajak	6.403.660	7.522.581
3.2	Bagi Hasil Bukan Pajak	20.512	24.075
3.3	Subsidi Daerah Otonom	54.880.480	51.333.902
3.4	Bantuan Pembangunan	15.558.142	12.073.394
3.5	Penerimaan Lainnya	668.050	859.237
4.	Pinjaman Pemerintah Daerah	-	-
4.1	Pinjaman Dari Pemerintah Pusat	-	-
4.2	Pinjaman Dari Lembaga Keuangan Dalam Negeri	-	-
4.3	Pinjaman Dari Luar Negeri	-	-
B BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP)		10.304.805	4.044.399

TABEL 1.22. REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TK II
Kabupaten Bondowoso
(000 RUPIAH)

Jenis Pengeluaran	1999/2000	2000
(1)	(2)	(3)
A. PENGELUARAN RUTIN	65.984.740	59.801.389
1. Belanja Pegawai	54.121.744	50.187.873
2. Belanja Barang	3.414.806	3.336.588
3. Biaya Pemeliharaan	821.626	631.008
4. Belanja Perjalanan Dinas	394.857	219.032
5. Belanja Lain-lain	5.187.783	3.700.704
6. Angsuran Pinjaman / Hutang Dan Bunga	655.276	375.190
7. Ganjaran/ Subsidi / Sumbangan Kepada Daerah Bawahan	556.280	502.792
8. Pengeluaran Yang Tidak Termasuk Bagian Lain	802.698	732.402
9. Pengeluaran Tidak Tersangka	29.670	115.800
B. PENGELUARAN PEMBANGUNAN	18.468.112	13.147.471
1. Industri	65.000	55.000
2. Pertanian Dan Kehutanan	970.297	861.599
3. Sumber Daya Air Dan Irigasi	354.451	512.283
4. Tenaga Kerja	40.000	-
5. Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan daerah dan koperasi	538.381	194.475
6. Transportasi	7.767.836	4.597.608
7. Pertambangan Dan Energi	501	2.500
8. Pariwisata Dan Telekomunikasi Daerah	34.650	42.654
9. Pembangunan Daerah Dan Pemukiman	786.856	721.455
10. Lingkungan Hidup Dan Tata Ruang	731.616	446.407
11. Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Thd Tuhan YME, Pemuda & OR	1.254.560	1.096.241
12. Kependudukan Dan Keluarga Sejahtera	4.000	-
13. Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan remaja	176.771	426.790
14. Perumahan Dan Pemukiman	2.409.711	1.393.119
15. Agama	380.500	60.000
16. Ilmu Pengetahuan Dan Tehnologi	274.935	375.914
17. Hukum	43.722	34.880
18. Aparatur Pemerintah Dan Pengawasan	2.449.325	2.286.666
19. Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	90.000	20.000
20. Keamanan Dan Ketertiban Umum	95.000	19.880
21. Subsidi Pembangunan Kepada Daerah Bawahan	-	-
C Jumlah A + B	84.452.852	72.948.860
D. URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP)	10.513.212	4.044.399

TABEL 1.23. REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH TK II
Kabupaten Situbondo
(000 RUPIAH)

Jenis Penerimaan	1999/2000	2000
(1)	(2)	(3)
A. PENERIMAAN DAERAH	79.647.732	91.385.225
1. Bagian Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu	3.259.396	2.814.442
2. Bagian Pendapatan asli daerah	4.476.013	4.628.037
2.1 Pajak Daerah	2.128.979	2.450.980
2.2 Retribusi Daerah	1.662.011	1.472.185
2.3 Bagian Laba Usaha Daerah	151.475	245.699
2.4 Penerimaan Lain-lain	533.548	459.173
3. Bagian Pendapatan Yang Berasal dari Pemberian Pemerintah Dan Atau Instansi Yang Lebih Tinggi	71.912.323	83.942.746
3.1 Bagi Hasil Pajak	7.482.994	7.800.880
3.2 Bagi Hasil Bukan Pajak	22.467	22.601
3.3 Subsidi Daerah Otonom	51.359.816	47.763.079
3.4 Bantuan Pembangunan	13.047.046	28.356.186
3.5 Penerimaan Lainnya	-	-
4. Pinjaman Pemerintah Daerah		
4.1 Pinjaman Dari Pemerintah Pusat	-	-
4.2 Pinjaman Dari Lembaga Keuangan Dalam Negeri	-	-
4.3 Pinjaman Dari Luar Negeri	-	-
B BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP)	8.977.099	4.074.653

TABEL 1.24. REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TK II
Kabupaten Situbondo
(000 RUPIAH)

Jenis Pengeluaran	1999/2000	2000
(1)	(2)	(3)
A. PENGELUARAN RUTIN	58.956.826	55.684.542
1. Belanja Pegawai	50.136.436	46.994.157
2. Belanja Barang	4.048.309	4.302.198
3. Biaya Pemeliharaan	695.667	753.041
4. Belanja Perjalanan Dinas	249.630	212.152
5. Belanja Lain-lain	2.224.877	2.290.117
6. Angsuran Pinjaman / Hutang Dan Bunga	80.515	115.573
7. Ganjaran/ Subsidi / Sumbangan Kepada Daerah Bawahan	394.280	366.510
8. Pengeluaran Yang Tidak Termasuk Bagian Lain	951.262	442.063
9. Pengeluaran Tidak Tersangka	175.850	208.731
B. PENGELUARAN PEMBANGUNAN	17.694.526	29.670.317
1. Industri	60.000	-
2. Pertanian Dan Kehutanan	1.098.850	1.142.366
3. Sumber Daya Air Dan Irigasi	208.991	673.508
4. Tenaga Kerja	60.000	-
5. Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan daerah dan koperasi	205.418	-
6. Transportasi	3.201.107	5.499.871
7. Pertambangan Dan Energi	-	72.840
8. Pariwisata Dan Telekomunikasi Daerah	26.817	5.000
9. Pembangunan Daerah Dan Pemukiman	2.976.311	9.743.819
10. Lingkungan Hidup Dan Tata Ruang	1.392.449	931.967
11. Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Thd Tuhan YME, Pemuda & OR	1.393.124	2.450.440
12. Kependudukan Dan Keluarga Sejahtera	-	-
13. Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan remaja	149.236	3.519.884
14. Perumahan Dan Pemukiman	1.730.783	2.870.897
15. Agama	124.900	230.400
16. Ilmu Pengetahuan Dan Tehnologi	198.634	17.500
17. Hukum	18.500	-
18. Aparatur Pemerintah Dan Pengawasan	3.674.841	2.409.125
19. Politik, Penerangan, Koinunikasi dan Media Massa	80.000	15.000
20. Keamanan Dan Ketertiban Umum	256.102	37.700
21. Subsidi Pembangunan Kepada Daerah Bawahan	838.463	50.000
C Jumlah A + B	76.651.352	85.354.859
D. URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP)	8.977.099	4.074.653

TABEL 1.25. REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH TK II
Kabupaten Probolinggo
(000 RUPIAH)

Jenis Penerimaan	1999/2000	2000
(1)	(2)	(3)
A. PENERIMAAN DAERAH	101.197.542	96.966.811
1. Bagian Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu	2.390.939	2.238.147
2. Bagian Pendapatan asli daerah	5.223.292	5.138.918
2.1 Pajak Daerah	3.049.870	2.475.462
2.2 Retribusi Daerah	1.735.597	1.997.775
2.3 Bagian Laba Usaha Daerah	15.100	13.350
2.4 Penerimaan Lain-lain	422.724	652.331
3. Bagian Pendapatan Yang Berasal dari Pemberian Pemerintah Dan Atau Instansi Yang Lebih Tinggi	93.583.311	89.589.746
3.1 Bagi Hasil Pajak	9.725.027	10.667.873
3.2 Bagi Hasil Bukan Pajak	42.278	53.079
3.3 Subsidi Daerah Otonom	65.462.890	63.813.983
3.4 Bantuan Pembangunan	18.353.116	15.054.811
3.5 Penerimaan Lainnya	-	-
4. Pinjaman Pemerintah Daerah		
4.1 Pinjaman Dari Pemerintah Pusat	-	-
4.2 Pinjaman Dari Lembaga Keuangan Dalam Negeri	-	-
4.3 Pinjaman Dari Luar Negeri	-	-
B BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP)	12.402.302	4.789.759

TABEL 1.27. REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH TK II
Kabupaten Pasuruan
(000 RUPIAH)

Jenis Penerimaan	1999/2000	2000
(1)	(2)	(3)
A. PENERIMAAN DAERAH	134.717.161	141.092.132
1. Bagian Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu	8.403.768	8.102.282
2. Bagian Pendapatan asli daerah	17.584.860	18.383.630
2.1 Pajak Daerah	12.289.357	13.565.088
2.2 Retribusi Daerah	4.527.883	4.035.924
2.3 Bagian Laba Usaha Daerah	-	-
2.4 Penerimaan Lain-lain	767.620	782.618
3. Bagian Pendapatan Yang Berasal dari Pemberian Pemerintah Dan Atau Instansi Yang Lebih Tinggi	108.728.533	114.606.220
3.1 Bagi Hasil Pajak	14.104.682	15.125.819
3.2 Bagi Hasil Bukan Pajak	66.760	54.033
3.3 Subsidi Daerah Otonom	74.565.257	71.337.159
3.4 Bantuan Pembangunan	19.991.835	28.089.209
3.5 Penerimaan Lainnya	-	-
4. Pinjaman Pemerintah Daerah		
4.1 Pinjaman Dari Pemerintah Pusat	-	-
4.2 Pinjaman Dari Lembaga Keuangan Dalam Negeri	-	-
4.3 Pinjaman Dari Luar Negeri	-	-
B BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP)	16.569.405	5.789.962

TABEL 1.28. REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TK II
Kabupaten Pasuruan
(000 RUPIAH)

Jenis Pengeluaran	1999/2000	2000
(1)	(2)	(3)
A. PENGELUARAN RUTIN	95.983.789	93.387.453
1. Belanja Pegawai	73.906.609	70.345.990
2. Belanja Barang	10.010.004	10.745.616
3. Biaya Pemeliharaan	1.866.065	1.646.399
4. Belanja Perjalanan Dinas	1.248.964	1.080.487
5. Belanja Lain-lain	6.867.188	7.513.798
6. Angsuran Pinjaman / Hutang Dan Bunga	114.811	82.011
7. Ganjaran/ Subsidi / Sumbangan Kepada Daerah Bawahan	1.574.869	1.339.298
8. Pengeluaran Yang Tidak Termasuk Bagian Lain	82.960	139.993
9. Pengeluaran Tidak Tersangka	312.319	493.863
B. PENGELUARAN PEMBANGUNAN	29.862.774	36.539.851
1. Industri	628.514	121.881
2. Pertanian Dan Kehutanan	1.747.568	1.159.167
3. Sumber Daya Air Dan Irigasi	1.167.994	4.760.747
4. Tenaga Kerja	137.500	86.999
5. Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan daerah dan koperasi	1.956.672	1.184.273
6. Transportasi	6.525.462	9.494.034
7. Pertambangan Dan Energi	30.000	38.891
8. Pariwisata Dan Telekomunikasi Daerah	526.777	428.638
9. Pembangunan Daerah Dan Pemukiman	1.393.993	1.220.875
10. Lingkungan Hidup Dan Tata Ruang	1.991.037	1.027.440
11. Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Thd Tuhan YME, Pemuda & OR	2.214.892	3.236.735
12. Kependudukan Dan Keluarga Sejahtera	43.924	70.791
13. Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan remaja	1.661.161	1.646.838
14. Perumahan Dan Pemukiman	1.674.193	4.651.015
15. Agama	399.898	769.095
16. Ilmu Pengetahuan Dan Tehnologi	576.485	465.580
17. Hukum	201.980	759.990
18. Aparatur Pemerintah Dan Pengawasan	5.099.135	4.767.912
19. Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	1.520.800	465.500
20. Keamanan Dan Ketertiban Umum	364.790	183.450
21. Subsidi Pembangunan Kepada Daerah Bawahan	-	-
C Jumlah A + B	125.846.562	129.927.304
D. URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP)	16.569.406	5.716.458

TABEL 1.29. REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH TK II
Kabupaten Sidoarjo
(000 RUPIAH)

Jenis Penerimaan	1999/2000	2000
(1)	(2)	(3)
A. PENERIMAAN DAERAH	179.863.650	175.642.495
1. Bagian Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu	10.672.562	12.487.442
2. Bagian Pendapatan asli daerah	40.533.588	41.662.147
2.1 Pajak Daerah	18.054.913	18.910.540
2.2 Retribusi Daerah	19.898.817	18.912.361
2.3 Bagian Laba Usaha Daerah	28.929	526.500
2.4 Penerimaan Lain-lain	2.550.929	3.312.746
3. Bagian Pendapatan Yang Berasal dari Pemberian Pemerintah Dan Atau Instansi Yang Lebih Tinggi	128.657.501	121.492.906
3.1 Bagi Hasil Pajak	25.286.656	26.197.746
3.2 Bagi Hasil Bukan Pajak	16.542	19.415
3.3 Subsidi Daerah Otonom	85.061.309	77.639.919
3.4 Bantuan Pembangunan	18.292.994	17.635.826
3.5 Penerimaan Lainnya	-	-
4. Pinjaman Pemerintah Daerah		
4.1 Pinjaman Dari Pemerintah Pusat	-	-
4.2 Pinjaman Dari Lembaga Keuangan Dalam Negeri	-	-
4.3 Pinjaman Dari Luar Negeri	-	-
B BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP)	20.683.630	8.915.172

TABEL 1.30. REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TK II
Kabupaten Sidoarjo
(p00 RUPIAH)

Jenis Pengeluaran	1999/2000	2000
(1)	(2)	(3)
A. PENGELUARAN RUTIN	125.377.155	119.349.742
1. Belanja Pegawai	85.530.218	78.808.190
2. Belanja Barang	16.868.806	16.607.076
3. Biaya Pemeliharaan	4.231.310	4.041.524
4. Belanja Perjalanan Dinas	1.890.618	3.832.329
5. Belanja Lain-lain	13.298.377	13.381.217
6. Angsuran Pinjaman / Hutang Dan Bunga	251.206	109.876
7. Ganjaran/ Subsidi / Sumbangan Kepada Daerah Bawahan	1.362.138	1.193.206
8. Pengeluaran Yang Tidak Termasuk Bagian Lain	1.531.483	969.726
9. Pengeluaran Tidak Tersangka	413.000	406.600
B. PENGELUARAN PEMBANGUNAN	41.999.101	37.390.556
1. Industri	593.111	509.712
2. Pertanian Dan Kehutanan	1.828.381	2.184.906
3. Sumber Daya Air Dan Irigasi	2.567.212	2.392.322
4. Tenaga Kerja	88.419	102.582
5. Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan daerah dan koperasi	6.271.693	3.542.529
6. Transportasi	12.789.349	11.425.786
7. Pertambangan Dan Energi	426.261	198.144
8. Pariwisata Dan Telekomunikasi Daerah	204.908	60.000
9. Pembangunan Daerah Dan Pemukiman	2.810.594	2.130.442
10. Lingkungan Hidup Dan Tata Ruang	2.560.569	1.378.882
11. Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Thd Tuhan YME, Pemuda & OR	2.152.231	2.741.224
12. Kependudukan Dan Keluarga Sejahtera	248.529	195.322
13. Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan remaja	1.877.743	1.890.290
14. Perumahan Dan Pemukiman	1.011.618	534.132
15. Agama	234.986	374.809
16. Ilmu Pengetahuan Dan Tehnologi	801.958	809.715
17. Hukum	88.024	119.297
18. Aparatur Pemerintah Dan Pengawasan	4.336.379	5.915.339
19. Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	478.578	438.682
20. Keamanan Dan Ketertiban Umum	628.557	446.445
21. Subsidi Pembangunan Kepada Daerah Bawahan	-	-
C Jumlah A + B	167.376.256	156.740.298
D. URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP)	20.675.354	8.915.172

TABEL 1.31. REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH TK II
Kabupaten Mojokerto
(000 RUPIAH)

Jenis Penerimaan	1999/2000	2000
(1)	(2)	(3)
A. PENERIMAAN DAERAH	111.683.591	96.688.599
1. Bagian Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu	5.516.957	6.405.246
2. Bagian Pendapatan asli daerah	11.784.034	11.623.278
2.1 Pajak Daerah	6.250.729	6.550.725
2.2 Retribusi Daerah	4.777.421	3.837.254
2.3 Bagian Laba Usaha Daerah	89.723	79.000
2.4 Penerimaan Lain-lain	666.161	1.156.299
3. Bagian Pendapatan Yang Berasal dari Pemberian Pemerintah Dan Atau Instansi Yang Lebih Tinggi	93.501.159	78.660.075
3.1 Bagi Hasil Pajak	10.103.331	10.543.273
3.2 Bagi Hasil Bukan Pajak	16.542	19.415
3.3 Subsidi Daerah Otonom	58.865.363	54.499.427
3.4 Bantuan Pembangunan	24.615.923	13.597.960
3.5 Penerimaan Lainnya	-	-
4. Pinjaman Pemerintah Daerah	781.441	-
4.1 Pinjaman Dari Pemerintah Pusat	-	-
4.2 Pinjaman Dari Lembaga Keuangan Dalam Negeri	-	-
4.3 Pinjaman Dari Luar Negeri	781.441	-
B. BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP)	12.524.019	5.662.891

TABEL 1.32. REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TK II

Kabupaten Mojokerto
(000 RUPIAH)

Jenis Penerimaan	1999/2000	2000
(1)	(2)	(3)
A. PENGELUARAN RUTIN	67.699.932	66.360.631
1. Belanja Pegawai	57.227.160	52.951.667
2. Belanja Barang	2.608.907	3.193.881
3. Biaya Pemeliharaan	900.871	1.055.026
4. Belanja Perjalanan Dinas	350.560	391.716
5. Belanja Lain-lain	4.220.222	5.452.098
6. Angsuran Pinjaman / Hutang Dan Bunga	-	91.583
7. Ganjaran/ Subsidi / Sumbangan Kepada Daerah Bawahan	1.677.910	1.608.382
8. Pengeluaran Yang Tidak Termasuk Bagian Lain	477.320	513.081
9. Pengeluaran Tidak Tersangka	236.982	1.103.197
B. PENGELUARAN PEMBANGUNAN	37.578.413	25.207.299
1. Industri	70.000	75.000
2. Pertanian Dan Kehutanan	1.887.813	1.756.110
3. Sumber Daya Air Dan Irigasi	309.463	711.053
4. Tenaga Kerja	150.000	174.717
5. Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan daerah dan koperasi	1.874.330	969.470
6. Transportasi	6.802.721	6.055.929
7. Pertambangan Dan Energi	218.897	259.998
8. Pariwisata Dan Telekomunikasi Daerah	325.000	68.735
9. Pembangunan Daerah Dan Pemukiman	15.754.523	5.740.214
10. Lingkungan Hidup Dan Tata Ruang	1.171.545	1.003.407
11. Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Thd Tuhan YME, Pemuda & OR	2.675.715	1.695.223
12. Kependudukan Dan Keluarga Sejahtera	107.500	72.500
13. Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan remaja	1.764.012	827.201
14. Perumahan Dan Pemukiman	539.150	1.325.533
15. Agama	99.998	200.000
16. Ilmu Pengetahuan Dan Tehnologi	294.710	388.825
17. Hukum	70.000	105.000
18. Aparatur Pemerintah Dan Pengawasan	2.479.375	3.108.625
19. Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	233.695	269.815
20. Keamanan Dan Ketertiban Umum	749.966	399.944
21. Subsidi Pembangunan Kepada Daerah Bawahan	-	-
C Jumlah A + B	105.278.345	91.567.930
D. URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP)	12.524.019	5.594.580

TABEL 1.33. REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH TK II
Kabupaten Jombang
(000 RUPIAH)

Jenis Penerimaan	1999/2000	2000
(1)	(2)	(3)
A. PENERIMAAN DAERAH	105.599.856	105.794.716
1. Bagian Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu	2.520.489	3.345.842
2. Bagian Pendapatan asli daerah	15.030.165	13.359.845
2.1 Pajak Daerah	3.150.746	2.502.988
2.2 Retribusi Daerah	2.706.559	2.316.339
2.3 Bagian Laba Usaha Daerah	131.200	234.000
2.4 Penerimaan Lain-lain	9.041.660	8.306.518
3. Bagian Pendapatan Yang Berasal dari Pemberian Pemerintah Dan Atau Instansi Yang Lebih Tinggi	88.049.202	89.089.029
3.1 Bagi Hasil Pajak	9.041.456	8.496.958
3.2 Bagi Hasil Bukan Pajak	33.084	38.831
3.3 Subsidi Daerah Otonom	58.269.146	65.501.968
3.4 Bantuan Pembangunan	20.705.516	15.051.272
3.5 Penerimaan Lainnya	-	-
4. Pinjaman Pemerintah Daerah		
4.1 Pinjaman Dari Pemerintah Pusat	-	-
4.2 Pinjaman Dari Lembaga Keuangan Dalam Negeri	-	-
4.3 Pinjaman Dari Luar Negeri	-	-
B BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP)	13.004.228	4.473.820

TABEL 1.34. REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TK II
Kabupaten Jombang
(000 RUPIAH)

Jenis Pengeluaran	1999/2000	2000
(1)	(2)	(3)
A. PENGELUARAN RUTIN	75.478.623	81.138.364
1. Belanja Pegawai	57.309.095	65.009.964
2. Belanja Barang	9.663.770	9.240.203
3. Biaya Pemeliharaan	1.043.295	1.714.686
4. Belanja Perjalanan Dinas	267.220	204.977
5. Belanja Lain-lain	4.134.908	3.425.268
6. Angsuran Pinjaman / Hutang Dan Bunga	1.196.628	229.225
7. Ganjaran/ Subsidi / Sumbangan Kepada Daerah Bawahan	1.003.576	682.856
8. Pengeluaran Yang Tidak Termasuk Bagian Lain	545.966	573.896
9. Pengeluaran Tidak Tersangka	314.165	57.289
B. PENGELUARAN PEMBANGUNAN	33.263.897	19.211.277
1. Industri	70.000	75.000
2. Pertanian Dan Kehutanan	2.593.663	1.594.723
3. Sumber Daya Air Dan Irigasi	162.000	1.185.540
4. Tenaga Kerja	6.495.000	560.000
5. Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan daerah dan koperasi	3.049.867	724.968
6. Transportasi	4.367.414	5.317.432
7. Pertambangan Dan Energi	-	411.946
8. Pariwisata Dan Telekomunikasi Daerah	436.875	138.510
9. Pembangunan Daerah Dan Pemukiman	6.240.595	1.073.167
10. Lingkungan Hidup Dan Tata Ruang	1.424.977	1.871.148
11. Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Thd Tuhan YME, Pemuda & OR	1.497.773	1.166.386
12. Kependudukan Dan Keluarga Sejahtera	39.620	34.875
13. Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan remaja	593.821	1.091.388
14. Perumahan Dan Pemukiman	1.550.000	595.789
15. Agama	319.990	299.993
16. Ilmu Pengetahuan Dan Tehnologi	433.500	938.938
17. Hukum	172.500	80.000
18. Aparatur Pemerintah Dan Pengawasan	1.351.870	1.117.850
19. Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	498.602	493.699
20. Keamanan Dan Ketertiban Umum	706.930	399.925
21. Subsidi Pembangunan Kepada Daerah Bawahan	1.258.900	40.000
C. Jumlah A + B	108.742.520	100.349.641
D. URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP)	13.004.228	4.473.820

TABEL 1.35. REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH TK II

Kabupaten Nganjuk
(000 RUPIAH)

Jenis Penerimaan	1999/2000	2000
(1)	(2)	(3)
A. PENERIMAAN DAERAH	126.052.673	110.376.396
1. Bagian Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu	4.382.369	4.674.834
2. Bagian Pendapatan asli daerah	7.237.409	7.918.060
2.1 Pajak Daerah	1.738.480	1.845.684
2.2 Retribusi Daerah	4.603.745	5.034.994
2.3 Bagian Laba Usaha Daerah	187.948	174.271
2.4 Penerimaan Lain-lain	707.236	863.111
3. Bagian Pendapatan Yang Berasal dari Pemberian Pemerintah Dan Atau Instansi Yang Lebih Tinggi	114.432.895	97.783.502
3.1 Bagi Hasil Pajak	10.376.630	10.453.320
3.2 Bagi Hasil Bukan Pajak	38.064	55.043
3.3 Subsidi Daerah Otonom	77.458.615	70.584.895
3.4 Bantuan Pembangunan	26.271.586	16.482.369
3.5 Penerimaan Lainnya	288.000	207.875
4. Pinjaman Pemerintah Daerah		
4.1 Pinjaman Dari Pemerintah Pusat	-	-
4.2 Pinjaman Dari Lembaga Keuangan Dalam Negeri	-	-
4.3 Pinjaman Dari Luar Negeri	-	-
B BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP)	15.313.215	7.240.428

TABEL 1.36. REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TK II

Kabupaten Nganjuk
(000 RUPIAH)

Jenis Pengeluaran	1999/2000	2000
(1)	(2)	(3)
A. PENGELUARAN RUTIN	89.812.668	82.479.968
1. Belanja Pegawai	76.336.667	69.610.351
2. Belanja Barang	5.208.359	5.711.811
3. Biaya Pemeliharaan	1.000.542	893.890
4. Belanja Perjalanan Dinas	639.955	678.089
5. Belanja Lain-lain	3.340.479	3.423.836
6. Angsuran Pinjaman / Hutang Dan Bunga	362.350	333.326
7. Ganjaran/ Subsidi / Sumbangan Kepada Daerah Bawahan	1.185.826	1.014.077
8. Pengeluaran Yang Tidak Termasuk Bagian Lain	1.738.490	789.589
9. Pengeluaran Tidak Tersangka	-	25.000
B. PENGELUARAN PEMBANGUNAN	31.565.172	22.055.474
1. Industri	134.250	144.030
2. Pertanian Dan Kehutanan	1.480.947	1.324.652
3. Sumber Daya Air Dan Irigasi	236.085	365.803
4. Tenaga Kerja	40.000	20.000
5. Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan daerah dan koperasi	1.959.696	732.510
6. Transportasi	10.106.992	7.633.340
7. Pertambangan Dan Energi	-	141.498
8. Pariwisata Dan Telekomunikasi Daerah	172.885	141.498
9. Pembangunan Daerah Dan Pemukiman	4.149.862	2.177.916
10. Lingkungan Hidup Dan Tata Ruang	2.709.131	1.615.032
11. Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Thd Tuhan YME, Pemuda & OR	1.953.554	1.857.045
12. Kependudukan Dan Keluarga Sejahtera	26.634	17.400
13. Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan remaja	260.853	1.058.426
14. Perumahan Dan Pemukiman	4.415.886	541.647
15. Agama	124.500	328.875
16. Ilmu Pengetahuan Dan Tehnologi	194.227	69.700
17. Hukum	111.530	95.108
18. Aparatur Pemerintah Dan Pengawasan	3.129.575	3.627.749
19. Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	168.500	94.921
20. Keamanan Dan Ketertiban Umum	165.082	68.324
21. Subsidi Pembangunan Kepada Daerah Bawahan	24.983	-
C. Jumlah A + B	121.377.840	104.535.442
D. URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP)	15.313.215	7.240.428

TABEL 1.37. REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH TK II
Kabupaten Madiun
(000 RUPIAH)

Jenis Penerimaan	1999/2000	2000
(1)	(2)	(3)
A. PENERIMAAN DAERAH	94.636.875	83.507.473
1. Bagian Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu	400.057	1.234.346
2. Bagian Pendapatan asli daerah	4.341.793	3.995.786
2.1 Pajak Daerah	1.378.264	1.197.073
2.2 Retribusi Daerah	1.583.136	2.638.499
2.3 Bagian Laba Usaha Daerah	15.396	12.500
2.4 Penerimaan Lain-lain	1.364.998	147.713
3. Bagian Pendapatan Yang Berasal dari Pemberian Pemerintah Dan Atau Instansi Yang Lebih Tinggi	88.186.804	78.277.341
3.1 Bagi Hasil Pajak	9.160.987	8.369.533
3.2 Bagi Hasil Bukan Pajak	149.539	175.516
3.3 Subsidi Daerah Otonom	63.374.270	58.864.484
3.4 Bantuan Pembangunan	15.502.009	10.867.808
3.5 Penerimaan Lainnya	-	-
4. Pinjaman Pemerintah Daerah	1.708.220	-
4.1 Pinjaman Dari Pemerintah Pusat	1.708.220	-
4.2 Pinjaman Dari Lembaga Keuangan Dalam Negeri	-	-
4.3 Pinjaman Dari Luar Negeri	-	-
B BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP)	12.405.457	5.184.266

TABEL 1.38. REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TK II
Kabupaten Madiun
(000 RUPIAH)

Jenis Pengeluaran	1999/2000	2000
(1)	(2)	(3)
A. PENGELUARAN RUTIN	71.677.010	66.557.331
1. Belanja Pegawai	61.425.895	57.162.278
2. Belanja Barang	3.044.365	3.018.469
3. Biaya Pemeliharaan	529.695	553.746
4. Belanja Perjalanan Dinas	319.580	294.107
5. Belanja Lain-lain	4.515.679	3.893.442
6. Angsuran Pinjaman / Hutang Dan Bunga	530.616	530.616
7. Ganjaran/ Subsidi / Sumbangan Kepada Daerah Bawahan	699.507	552.707
8. Pengeluaran Yang Tidak Termasuk Bagian Lain	409.175	312.225
9. Pengeluaran Tidak Tersangka	202.499	239.742
B. PENGELUARAN PEMBANGUNAN	22.135.716	14.840.010
1. Industri	854.073	11.000
2. Pertanian Dan Kehutanan	1.024.143	1.223.220
3. Sumber Daya Air Dan Irigasi	456.058	1.188.208
4. Tenaga Kerja	446.686	40.000
5. Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan daerah dan koperasi	869.219	106.500
6. Transportasi	4.432.994	3.468.137
7. Pertambangan Dan Energi	-	-
8. Pariwisata Dan Telekomunikasi Daerah	6.500	27.000
9. Pembangunan Daerah Dan Pemukiman	2.911.403	461.540
10. Lingkungan Hidup Dan Tata Ruang	1.060.605	738.850
11. Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Thd Tuhan YME, Pemuda & OR	1.261.420	924.673
12. Kependudukan Dan Keluarga Sejahtera	122.494	202.000
13. Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan remaja	1.734.173	454.361
14. Perumahan Dan Pemukiman	1.773.435	1.475.097
15. Agama	77.185	100.000
16. Ilmu Pengetahuan Dan Tehnologi	153.403	123.029
17. Hukum	35.000	26.000
18. Aparatur Pemerintah Dan Pengawasan	4.823.276	3.720.433
19. Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	77.650	65.000
20. Keamanan Dan Ketertiban Umum	16.000	10.000
21. Subsidi Pembangunan Kepada Daerah Bawahan	-	474.963
C. Jumlah A + B	93.812.726	81.397.341
D. URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP)	12.591.996	5.635.844

TABEL 1.39. REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH TK II
Kabupaten Magetan
(000 RUPIAH)

Jenis Penerimaan	1999/2000	2000
(1)	(2)	(3)
A. PENERIMAAN DAERAH	98.801.263	102.477.735
1. Bagian Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu	1.464.619	4.167.332
2. Bagian Pendapatan asli daerah	5.609.579	7.862.143
2.1 Pajak Daerah	1.229.853	1.484.802
2.2 Retribusi Daerah	2.296.211	4.173.823
2.3 Bagian Laba Usaha Daerah	225.000	95.000
2.4 Penerimaan Lain-lain	1.858.514	2.108.518
3. Bagian Pendapatan Yang Berasal dari Pemberian Pemerintah Dan Atau Instansi Yang Lebih Tinggi	91.557.320	90.448.260
3.1 Bagi Hasil Pajak	9.799.127	9.715.254
3.2 Bagi Hasil Bukan Pajak	17.802	19.416
3.3 Subsidi Daerah Otonom	68.397.248	63.785.750
3.4 Bantuan Pembangunan	13.343.144	16.927.840
3.5 Penerimaan Lainnya	-	-
4. Pinjaman Pemerintah Daerah	169.745	-
4.1 Pinjaman Dari Pemerintah Pusat	169.745	-
4.2 Pinjaman Dari Lembaga Keuangan Dalam Negeri	-	-
4.3 Pinjaman Dari Luar Negeri	-	-
B. BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP)	12.501.199	5.069.064

TABEL 1.40. REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TK II

Kabupaten Magetan

(000 RUPIAH)

Jenis Pengeluaran	1999/2000	2000
(1)	(2)	(3)
A. PENGELUARAN RUTIN	75.834.737	73.797.736
1. Belanja Pegawai	66.110.113	61.500.381
2. Belanja Barang	3.637.329	5.537.686
3. Biaya Pemeliharaan	552.447	678.194
4. Belanja Perjalanan Dinas	442.727	409.445
5. Belanja Lain-lain	1.909.008	2.800.072
6. Angsuran Pinjaman / Hutang Dan Bunga	293.628	133.946
7. Ganjaran/ Subsidi / Sumbangan Kepada Daerah Bawahan	1.192.226	1.656.326
8. Pengeluaran Yang Tidak Termasuk Bagian Lain	1.524.940	564.215
9. Pengeluaran Tidak Tersangka	172.321	517.471
B. PENGELUARAN PEMBANGUNAN	18.799.193	23.419.796
1. Industri	45.000	76.850
2. Pertanian Dan Kehutanan	2.767.053	2.568.056
3. Sumber Daya Air Dan Irigasi	69.880	267.094
4. Tenaga Kerja	3.440	3.613
5. Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan daerah dan koperasi	2.858.658	2.777.540
6. Transportasi	2.967.860	4.056.577
7. Pertambangan Dan Energi	-	-
8. Pariwisata Dan Telekomunikasi Daerah	551.900	581.779
9. Pembangunan Daerah Dan Pemukiman	3.455.215	4.867.459
10. Lingkungan Hidup Dan Tata Ruang	732.418	455.513
11. Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Thd Tuhan YME, Pemuda & OR	1.544.148	1.589.578
12. Kependudukan Dan Keluarga Sejahtera	20.500	50.000
13. Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan remaja	852.024	2.157.938
14. Perumahan Dan Pemukiman	66.000	479.811
15. Agama	83.297	239.379
16. Ilmu Pengetahuan Dan Tehnologi	170.789	209.000
17. Hukum	60.000	80.070
18. Aparatur Pemerintah Dan Pengawasan	2.352.022	2.776.091
19. Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	114.141	124.548
20. Keamanan Dan Ketertiban Umum	74.850	58.900
21. Subsidi Pembangunan Kepada Daerah Bawahan	-	-
C Jumlah A + B	94.633.931	97.217.532
D. URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP)	12.501.199	5.069.064

TABEL 1.41 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH TK II
Kabupaten Ngawi
(000 RUPIAH)

Jenis Penerimaan	1999/2000	2000
(1)	(2)	(3)
A. PENERIMAAN DAERAH	103.626.432	105.504.515
1. Bagian Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu	3.149.835	4.712.505
2. Bagian Pendapatan asli daerah	3.690.346	4.969.000
2.1 Pajak Daerah	1.575.726	1.559.475
2.2 Retribusi Daerah	2.016.893	2.287.989
2.3 Bagian Laba Usaha Daerah	-	50.811
2.4 Penerimaan Lain-lain	97.727	1.070.725
3. Bagian Pendapatan Yang Berasal dari Pemberian Pemerintah Dan Atau Instansi Yang Lebih Tinggi	96.786.251	95.823.010
3.1 Bagi Hasil Pajak	8.665.391	5.236.793
3.2 Bagi Hasil Bukan Pajak	79.376	53.500
3.3 Subsidi Daerah Otonom	72.543.366	74.004.994
3.4 Bantuan Pembangunan	15.498.118	16.527.723
3.5 Penerimaan Lainnya	-	-
4. Pinjaman Pemerintah Daerah		
4.1 Pinjaman Dari Pemerintah Pusat	-	-
4.2 Pinjaman Dari Lembaga Keuangan Dalam Negeri	-	-
4.3 Pinjaman Dari Luar Negeri	-	-
B. BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP)	12.153.817	-

TABEL 1.42. REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TK II

Kabupaten Ngawi
(000 RUPIAH)

Jenis Pengeluaran	1999/2000	2000
(1)	(2)	(3)
A. PENGELUARAN RUTIN	78.892.815	86.876.588
1. Belanja Pegawai	71.208.306	59.503.247
2. Belanja Barang	3.071.148	2.235.681
3. Biaya Pemeliharaan	517.818	768.261
4. Belanja Perjalanan Dinas	240.378	1.726.494
5. Belanja Lain-lain	2.074.818	1.230.352
6. Angsuran Pinjaman / Hutang Dan Bunga	351.172	425.000
7. Ganjaran/ Subsidi / Sumbangan Kepada Daerah Bawahan	813.020	787.915
8. Pengeluaran Yang Tidak Termasuk Bagian Lain	457.228	18.911.959
9. Pengeluaran Tidak Tersangka	158.927	1.287.679
B. PENGELUARAN PEMBANGUNAN	20.021.115	18.627.927
1. Industri	55.849	5.000
2. Pertanian Dan Kehutanan	1.065.140	1.305.223
3. Sumber Daya Air Dan Irigasi	454.099	875.000
4. Tenaga Kerja	80.000	80.000
5. Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan daerah dan koperasi	1.224.198	479.300
6. Transportasi	3.797.494	2.307.500
7. Pertambangan Dan Energi	5.000	10.000
8. Pariwisata Dan Telekomunikasi Daerah	177.460	65.000
9. Pembangunan Daerah Dan Pemukiman	1.639.136	4.382.315
10. Lingkungan Hidup Dan Tata Ruang	898.088	587.250
11. Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Thd Tuhan YME, Pemuda & OR	1.661.067	1.598.063
12. Kependudukan Dan Keluarga Sejahtera	32.500	40.000
13. Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan remaja	1.402.746	842.500
14. Perumahan Dan Pemukiman	2.178.000	625.000
15. Agama	207.500	130.000
16. Ilmu Pengetahuan Dan Tehnologi	420.672	493.095
17. Hukum	158.000	206.150
18. Aparatur Pemerintah Dan Pengawasan	3.886.045	4.384.531
19. Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	329.443	162.000
20. Keamanan Dan Ketertiban Umum	348.678	50.000
21. Subsidi Pembangunan Kepada Daerah Bawahan	-	-
C Jumlah A + B	98.913.930	105.504.515
D. URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP)	12.153.817	-

TABEL 1.43. REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH TK II
Kabupaten Bojonegoro
(000 RUPIAH)

Jenis Penerimaan	1999/2000	2000
(1)	(2)	(3)
A. PENERIMAAN DAERAH	116.471.572	107.247.334
1. Bagian Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu	3.775.211	4.346.189
2. Bagian Pendapatan asli daerah	6.681.933	6.723.317
2.1 Pajak Daerah	1.579.346	960.457
2.2 Retribusi Daerah	3.511.537	4.314.759
2.3 Bagian Laba Usaha Daerah	62.960	60.896
2.4 Penerimaan Lain-lain	1.528.090	1.387.205
3. Bagian Pendapatan Yang Berasal dari Pemberian Pemerintah Dan Atau Instansi Yang Lebih Tinggi	105.054.339	96.177.828
3.1 Bagi Hasil Pajak	10.037.317	10.254.004
3.2 Bagi Hasil Bukan Pajak	338.908	373.645
3.3 Subsidi Daerah Otonom	75.142.872	69.898.694
3.4 Bantuan Pembangunan	18.587.880	15.349.531
3.5 Penerimaan Lainnya	947.362	301.954
4. Pinjaman Pemerintah Daerah	960.089	-
4.1 Pinjaman Dari Pemerintah Pusat	960.089	-
4.2 Pinjaman Dari Lembaga Keuangan Dalam Negeri		
4.3 Pinjaman Dari Luar Negeri		
B BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP)	2.170.194	785.164

TABEL 1.44. REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TK II
Kabupaten Bojonegoro
(000 RUPIAH)

Jenis Pengeluaran	1999/2000	2000
(1)	(2)	(3)
A. PENGELUARAN RUTIN	86.659.014	79.156.145
1. Belanja Pegawai	75.631.011	68.879.144
2. Belanja Barang	5.146.747	4.232.822
3. Biaya Pemeliharaan	617.209	677.197
4. Belanja Perjalanan Dinas	169.526	304.991
5. Belanja Lain-lain	2.916.313	2.981.377
6. Angsuran Pinjaman / Hutang Dan Bunga	163.339	82.042
7. Ganjaran/ Subsidi / Sumbangan Kepada Daerah Bawahan	520.797	1.199.960
8. Pengeluaran Yang Tidak Termasuk Bagian Lain	1.201.572	797.362
9. Pengeluaran Tidak Tersangka	292.500	1.250
B. PENGELUARAN PEMBANGUNAN	24.909.428	18.941.830
1. Industri	183.575	77.500
2. Pertanian Dan Kehutanan	1.830.430	1.731.801
3. Sumber Daya Air Dan Irigasi	313.909	460.465
4. Tenaga Kerja	172.000	2.500
5. Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan daerah dan koperasi	1.473.074	1.331.465
6. Transportasi	5.745.931	6.431.961
7. Pertambangan Dan Energi	76.700	5.000
8. Pariwisata Dan Telekomunikasi Daerah	1.088.871	169.370
9. Pembangunan Daerah Dan Pemukiman	5.776.853	1.321.859
10. Lingkungan Hidup Dan Tata Ruang	1.233.420	668.503
11. Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Thd Tuhan YME, Pemuda & OR	2.015.281	1.131.175
12. Kependudukan Dan Keluarga Sejahtera	32.500	27.000
13. Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan remaja	651.094	1.234.366
14. Perumahan Dan Pemukiman	726.829	1.805.861
15. Agama	80.000	94.775
16. Ilmu Pengetahuan Dan Tehnologi	395.945	839.827
17. Hukum	70.000	55.000
18. Aparatur Pemerintah Dan Pengawasan	2.684.851	1.328.902
19. Politik, Penerangan,. Komunikasi dan Media Massa	103.000	131.500
20. Keamanan Dan Ketertiban Umum	255.165	93.000
21. Subsidi Pembangunan Kepada Daerah Bawahan		
C. Jumlah A + B	111.568.442	98.097.975
D. URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP)	2.170.194	785.164

TABEL 1.45. REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH TK II
Kabupaten Tuban
(000 RUPIAH)

Jenis Penerimaan	1999/2000	2000
(1)	(2)	(3)
A. PENERIMAAN DAERAH	122.329.309	127.804.859
1. Bagian Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu	7.039.997	13.477.961
2. Bagian Pendapatan asli daerah	14.108.312	17.853.442
2.1 Pajak Daerah	9.632.999	12.418.816
2.2 Retribusi Daerah	3.291.056	4.051.401
2.3 Bagian Laba Usaha Daerah	150.735	146.050
2.4 Penerimaan Lain-lain	1.033.522	1.237.175
3. Bagian Pendapatan Yang Berasal dari Pemberian Pemerintah Dan Atau Instansi Yang Lebih Tinggi	101.180.999	96.473.456
3.1 Bagi Hasil Pajak	12.539.090	12.090.125
3.2 Bagi Hasil Bukan Pajak	152.232	186.223
3.3 Subsidi Daerah Otonom	69.077.990	63.874.940
3.4 Bantuan Pembangunan	19.411.687	20.322.168
3.5 Penerimaan Lainnya	-	-
4. Pinjaman Pemerintah Daerah		
4.1 Pinjaman Dari Pemerintah Pusat	-	-
4.2 Pinjaman Dari Lembaga Keuangan Dalam Negeri	-	-
4.3 Pinjaman Dari Luar Negeri	-	-
B BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP)	14.622.730	5.930.817

TABEL 1.46. REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TK II
Kabupaten Tuban
(000 RUPIAH)

Jenis Pengeluaran	1999/2000	2000
(1)	(2)	(3)
A. PENGELUARAN RUTIN	84.266.911	79.054.079
1. Belanja Pegawai	68.765.526	64.534.484
2. Belanja Barang	5.775.704	5.996.748
3. Biaya Pemeliharaan	1.534.387	1.273.595
4. Belanja Perjalanan Dinas	520.030	829.715
5. Belanja Lain-lain	4.293.393	3.218.008
6. Angsuran Pinjaman / Hutang Dan Bunga	188.046	133.163
7. Ganjaran/ Subsidi / Sumbangan Kepada Daerah Bawahan	1.365.569	1.026.081
8. Pengeluaran Yang Tidak Termasuk Bagian Lain	882.330	1.149.665
9. Pengeluaran Tidak Tersangka	941.926	892.620
B. PENGELUARAN PEMBANGUNAN	24.583.409	26.823.598
1. Industri	87.000	85.000
2. Pertanian Dan Kehutanan	2.572.659	1.934.883
3. Sumber Daya Air Dan Irigasi	646.586	893.460
4. Tenaga Kerja	10.000	75.000
5. Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan daerah dan koperasi	1.966.343	1.861.406
6. Transportasi	7.070.627	7.399.643
7. Pertambangan Dan Energi	25.750	97.548
8. Pariwisata Dan Telekomunikasi Daerah	961.331	334.276
9. Pembangunan Daerah Dan Pemukiman	5.230.557	6.732.019
10. Lingkungan Hidup Dan Tata Ruang	341.551	196.596
11. Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Thd Tuhan YME, Pemuda & OR	1.358.582	1.353.039
12. Kependudukan Dan Keluarga Sejahtera	21.000	28.450
13. Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan remaja	338.101	1.034.517
14. Perumahan Dan Pemukiman	249.400	678.770
15. Agama	94.709	550.000
16. Ilmu Pengetahuan Dan Tehnologi	180.865	300.776
17. Hukum	72.450	100.000
18. Aparatur Pemerintah Dan Pengawasan	2.694.655	2.672.797
19. Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	253.813	385.618
20. Keamanan Dan Ketertiban Umum	287.645	70.000
21. Subsidi Pembangunan Kepada Daerah Bawahan	119.785	39.800
C Jumlah A + B	108.850.320	105.877.677
D. URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP)	14.081.461	5.379.782

TABEL 1.47. REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH OTONOM TK II
Kabupaten Lamongan
(000 RUPIAH)

Jenis Penerimaan	1999/2000	2000
(1)	(2)	(3)
A. PENERIMAAN DAERAH	125.471.221	123.729.305
1. Bagian Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu	3.122.112	2.828.970
2. Bagian Pendapatan asli daerah	6.573.908	6.340.258
2.1 Pajak Daerah	3.123.224	2.801.740
2.2 Retribusi Daerah	2.656.614	2.497.088
2.3 Bagian Laba Usaha Daerah	138.827	167.488
2.4 Penerimaan Lain-lain	655.243	873.942
3. Bagian Pendapatan Yang Berasal dari Pemberian Pemerintah Dan Atau Instansi Yang Lebih Tinggi	115.475.201	114.560.076
3.1 Bagi Hasil Pajak	9.556.279	10.484.129
3.2 Bagi Hasil Bukan Pajak	54.871	319.417
3.3 Subsidi Daerah Otonom	77.469.113	71.531.493
3.4 Bantuan Pembangunan	28.394.938	32.225.038
3.5 Penerimaan Lainnya	-	-
4. Pinjaman Pemerintah Daerah	300.000	-
4.1 Pinjaman Dari Pemerintah Pusat	300.000	-
4.2 Pinjaman Dari Lembaga Keuangan Dalam Negeri	-	-
4.3 Pinjaman Dari Luar Negeri	-	-
B BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP)	16.449.013	6.910.423

TABEL 1.48. REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TK II
Kabupaten Lamongan
(000 RUPIAH)

Jenis Pengeluaran	1999/2000	2000
(1)	(2)	(3)
A. PENGELUARAN RUTIN	88.208.333	81.168.843
1. Belanja Pegawai	75.356.880	71.665.249
2. Belanja Barang	4.989.494	5.932.846
3. Biaya Pemeliharaan	756.817	623.311
4. Belanja Perjalanan Dinas	333.918	390.691
5. Belanja Lain-lain	3.895.539	377.373
6. Angsuran Pinjaman / Hutang Dan Bunga	52.804	68.063
7. Ganjaran/ Subsidi / Sumbangan Kepada Daerah Bawahan	1.590.265	1.250.746
8. Pengeluaran Yang Tidak Termasuk Bagian Lain	1.232.616	860.564
9. Pengeluaran Tidak Tersangka	-	-
B. PENGELUARAN PEMBANGUNAN	34.433.916	36.448.614
1. Industri	60.000	74.999
2. Pertanian Dan Kehutanan	1.462.339	4.881.368
3. Sumber Daya Air Dan Irigasi	1.040.237	908.239
4. Tenaga Kerja	-	-
5. Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan daerah dan koperasi	1.997.914	1.540.588
6. Transportasi	4.844.094	6.070.218
7. Pertambangan Dan Energi	49.500	-
8. Pariwisata Dan Telekomunikasi Daerah	836.103	566.535
9. Pembangunan Daerah Dan Pemukiman	8.735.145	8.953.958
10. Lingkungan Hidup Dan Tata Ruang	1.180.560	692.887
11. Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Thd Tuhan YME, Pemuda & OR	4.923.827	3.810.223
12. Kependudukan Dan Keluarga Sejahtera	-	-
13. Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan remaja	1.852.472	2.112.264
14. Perumahan Dan Pemukiman	2.078.209	1.620.821
15. Agama	241.411	319.614
16. Ilmu Pengetahuan Dan Tehnologi	234.400	326.800
17. Hukum	25.000	65.000
18. Aparatur Pemerintah Dan Pengawasan	4.624.171	4.360.115
19. Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	180.000	124.995
20. Keamanan Dan Ketertiban Umum	68.534	19.990
21. Subsidi Pembangunan Kepada Daerah Bawahan	-	-
C. Jumlah A + B	122.642.249	117.617.457
D. URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP)	15.790.486	15.790.486

TABEL 1.49. REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH TK II

Kabupaten Gresik
(000 RUPIAH)

Jenis Penerimaan	1999/2000	2000
(1)	(2)	(3)
A. PENERIMAAN DAERAH	103.940.933	110.025.780
1. Bagian Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu	400.174	5.998.089
2. Bagian Pendapatan asli daerah	16.696.426	19.219.730
2.1 Pajak Daerah	8.135.000	12.171.239
2.2 Retribusi Daerah	3.477.738	2.587.452
2.3 Bagian Laba Usaha Daerah	5.276	2.000
2.4 Penerimaan Lain-lain	5.078.412	4.459.039
3. Bagian Pendapatan Yang Berasal dari Pemberian Pemerintah Dan Atau Instansi Yang Lebih Tinggi	86.844.333	84.807.961
3.1 Bagi Hasil Pajak	11.330.000	14.597.732
3.2 Bagi Hasil Bukan Pajak	63.000	33.687
3.3 Subsidi Daerah Otonom	56.759.767	52.773.998
3.4 Bantuan Pembangunan	18.691.566	17.402.544
3.5 Penerimaan Lainnya	-	-
4. Pinjaman Pemerintah Daerah	-	-
4.1 Pinjaman Dari Pemerintah Pusat	-	-
4.2 Pinjaman Dari Lembaga Keuangan Dalam Negeri	-	-
4.3 Pinjaman Dari Luar Negeri	-	-
B BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP)	12.998.460	4.557.122

TABEL 1.50. REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TK II

Kabupaten Gresik
(000 RUPIAH)

Jenis Pengeluaran	1999/2000	2000
(1)	(2)	(3)
A. PENGELUARAN RUTIN	78.088.742	74.403.028
1. Belanja Pegawai	54.867.833	51.620.949
2. Belanja Barang	5.983.173	7.427.922
3. Biaya Pemeliharaan	1.063.037	1.508.518
4. Belanja Perjalanan Dinas	190.646	232.245
5. Belanja Lain-lain	5.502.528	8.529.048
6. Angsuran Pinjaman / Hutang Dan Bunga	7.500.000	698.065
7. Ganjaran/ Subsidi / Sumbangan Kepada Daerah Bawahan	824.200	1.094.995
8. Pengeluaran Yang Tidak Termasuk Bagian Lain	1.276.000	1.531.427
9. Pengeluaran Tidak Tersangka	781.325	1.759.859
B. PENGELUARAN PEMBANGUNAN	23.432.486	21.681.645
1. Industri	580.000	169.981
2. Pertanian Dan Kehutanan	1.741.135	1.321.120
3. Sumber Daya Air Dan Irigasi	608.000	547.276
4. Tenaga Kerja	98.000	70.000
5. Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan daerah dan koperasi	2.015.000	2.281.601
6. Transportasi	5.570.728	6.764.095
7. Pertambangan Dan Energi	101.000	130.000
8. Pariwisata Dan Telekomunikasi Daerah	225.000	255.000
9. Pembangunan Daerah Dan Pemukiman	4.348.664	778.882
10. Lingkungan Hidup Dan Tata Ruang	992.105	522.875
11. Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Thd Tuhan YME, Pemuda & OR	1.629.412	1.240.000
12. Kependudukan Dan Keluarga Sejahtera	65.000	434.493
13. Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan remaja	991.150	1.290.390
14. Perumahan Dan Pemukiman	240.000	1.752.013
15. Agama	595.000	684.082
16. Ilmu Pengetahuan Dan Tehnologi	671.638	1.111.751
17. Hukum	20.000	125.000
18. Aparatur Pemerintah Dan Pengawasan	2.370.654	2.076.511
19. Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	535.000	107.575
20. Keamanan Dan Ketertiban Umum	35.000	19.000
21. Subsidi Pembangunan Kepada Daerah Bawahan	-	-
C Jumlah A + B	101.521.228	96.084.673
D. URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP)	12.298.460	4.557.122

TABEL 1.51. REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH TK II
Kabupaten Bangkalan
(000 RUPIAH)

Jenis Penerimaan	1999/2000	2000
(1)	(2)	(3)
A. PENERIMAAN DAERAH	87.878.991	82.957.562
1. Bagian Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu	3.507.900	1.828.395
2. Bagian Pendapatan asli daerah	4.245.928	4.976.207
2.1 Pajak Daerah	628.572	659.424
2.2 Retribusi Daerah	3.292.649	4.033.027
2.3 Bagian Laba Usaha Daerah	50.000	53.569
2.4 Penerimaan Lain-lain	274.707	230.187
3. Bagian Pendapatan Yang Berasal dari Pemberian Pemerintah Dan Atau Instansi Yang Lebih Tinggi	80.125.163	74.479.756
3.1 Bagi Hasil Pajak	5.653.709	6.043.853
3.2 Bagi Hasil Bukan Pajak	26.579	25.432
3.3 Subsidi Daerah Otonom	57.029.142	54.370.741
3.4 Bantuan Pembangunan	17.415.733	14.039.730
3.5 Penerimaan Lainnya	-	-
4. Pinjaman Pemerintah Daerah		1.673.204
4.1 Pinjaman Dari Pemerintah Pusat	-	1.673.204
4.2 Pinjaman Dari Lembaga Keuangan Dalam Negeri	-	-
4.3 Pinjaman Dari Luar Negeri	-	-
B BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP)	9.997.142	4.148.743

TABEL 1.52. REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TK II
Kabupaten Bangkalan
(000 RUPIAH)

Jenis Pengeluaran	1999/2000	2000
(1)	(2)	(3)
A. PENGELUARAN RUTIN	65.716.618	62.331.944
1. Belanja Pegawai	53.783.288	52.662.030
2. Belanja Barang	3.746.920	3.372.400
3. Biaya Pemeliharaan	470.641	431.037
4. Belanja Perjalanan Dinas	502.645	239.509
5. Belanja Lain-lain	2.133.195	2.136.310
6. Angsuran Pinjaman / Hutang Dan Bunga	-	-
7. Ganjaran/ Subsidi / Sumbangan Kepada Daerah Bawahan	2.817.010	1.308.143
8. Pengeluaran Yang Tidak Termasuk Bagian Lain	2.090.919	1.037.717
9. Pengeluaran Tidak Tersangka	172.000	1.144.797
B. PENGELUARAN PEMBANGUNAN	20.838.311	17.035.592
1. Industri	100.000	105.000
2. Pertanian Dan Kehutanan	1.324.908	729.776
3. Sumber Daya Air Dan Irigasi	331.757	264.174
4. Tenaga Kerja		15.000
5. Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan daerah dan koperasi	584.980	723.210
6. Transportasi	1.973.292	6.555.182
7. Pertambangan Dan Energi	30.000	30.000
8. Pariwisata Dan Telekomunikasi Daerah	96.998	448.903
9. Pembangunan Daerah Dan Pemukiman	7.202.251	1.838.188
10. Lingkungan Hidup Dan Tata Ruang	1.683.064	950.995
11. Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Thd Tuhan YME, Pemuda & OR	2.790.072	1.205.072
12. Kependudukan Dan Keluarga Sejahtera	63.000	-
13. Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan remaja	1.276.437	148.523
14. Perumahan Dan Pemukiman	123.300	898.028
15. Agama	46.300	-
16. Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	1.129.220	258.330
17. Hukum	411.500	90.500
18. Aparatur Pemerintah Dan Pengawasan	1.522.732	2.632.710
19. Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	113.500	132.000
20. Keamanan Dan Ketertiban Umum	35.000	10.000
21. Subsidi Pembangunan Kepada Daerah Bawahan	-	-
C. Jumlah A + B	86.554.929	79.367.536
D. URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP)	9.997.143	-

TABEL 1.53. REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH TK II

Kabupaten Sampang

(000 RUPIAH)

Jenis Penerimaan	1999/2000	2000
(1)	(2)	(3)
A. PENERIMAAN DAERAH	61.796.542	65.804.061
1. Bagian Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu	2.898.625	2.710.874
2. Bagian Pendapatan asli daerah	2.584.699	2.485.167
2.1 Pajak Daerah	383.637	413.372
2.2 Retribusi Daerah	1.754.431	1.832.711
2.3 Bagian Laba Usaha Daerah	3.469	3.988
2.4 Penerimaan Lain-lain	443.162	235.096
3. Bagian Pendapatan Yang Berasal dari Pemberian Pemerintah Dan Atau Instansi Yang Lebih Tinggi	56.313.218	60.608.020
3.1 Bagi Hasil Pajak	6.522.082	6.930.550
3.2 Bagi Hasil Bukan Pajak	17.483	20.114
3.3 Subsidi Daerah Otonom	34.342.706	38.012.801
3.4 Bantuan Pembangunan	15.430.947	15.644.555
3.5 Penerimaan Lainnya	-	-
4. Pinjaman Pemerintah Daerah		
4.1 Pinjaman Dari Pemerintah Pusat	-	-
4.2 Pinjaman Dari Lembaga Keuangan Dalam Negeri	-	-
4.3 Pinjaman Dari Luar Negeri	-	-
B. BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP)	7.512.514	3.061.142

TABEL 1.54. REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TK II
Kabupaten Sampang
(000 RUPIAH)

Jenis Pengeluaran	1999/2000	2000
(1)	(2)	(3)
A. PENGELUARAN RUTIN	42.667.700	44.395.417
1. Belanja Pegawai	32.577.067	36.371.895
2. Belanja Barang	3.283.516	3.381.904
3. Biaya Pemeliharaan	653.704	368.036
4. Belanja Perjalanan Dinas	210.234	119.104
5. Belanja Lain-lain	3.170.286	2.590.174
6. Angsuran Pinjaman / Hutang Dan Bunga	-	-
7. Ganjaran/ Subsidi / Sumbangan Kepada Daerah Bawahan	728.340	525.360
8. Pengeluaran Yang Tidak Termasuk Bagian Lain	1.346.500	1.038.944
9. Pengeluaran Tidak Tersangka	698.053	-
B. PENGELUARAN PEMBANGUNAN	16.417.968	15.478.124
1. Industri	700.000	165.000
2. Pertanian Dan Kehutanan	872.270	684.833
3. Sumber Daya Air Dan Irigasi	315.625	134.619
4. Tenaga Kerja	-	-
5. Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan daerah dan koperasi	945.462	553.020
6. Transportasi	3.923.203	7.072.832
7. Pertambangan Dan Energi	-	-
8. Pariwisata Dan Telekomunikasi Daerah	25.000	-
9. Pembangunan Daerah Dan Pemukiman	770.244	876.636
10. Lingkungan Hidup Dan Tata Ruang	1.301.950	754.875
11. Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Thd Tuhan YME, Pemuda & OR	2.261.928	1.483.233
12. Kependudukan Dan Keluarga Sejahtera	-	-
13. Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan remaja	606.195	698.274
14. Perumahan Dan Pemukiman	2.039.437	1.127.499
15. Agama	150.000	-
16. Ilmu Pengetahuan Dan Tehnologi	610.000	379.599
17. Hukum	80.000	100.000
18. Aparatur Pemerintah Dan Pengawasan	1.816.654	1.447.704
19. Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	-	-
20. Keamanan Dan Ketertiban Umum	-	-
21. Subsidi Pembangunan Kepada Daerah Bawahan	-	-
C. Jumlah A + B	59.085.668	59.873.541
D. URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP)	7.512.514	60.254.467

TABEL 1.55. REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH TK II

Kabupaten Pamekasan
(000 RUPIAH)

Jenis Penerimaan	1999/2000	2000
(1)	(2)	(3)
A. PENERIMAAN DAERAH	75.721.957	88.212.278
1. Bagian Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu	2.129.651	2.456.679
2. Bagian Pendapatan asli daerah	4.160.626	6.361.692
2.1 Pajak Daerah	886.183	1.133.512
2.2 Retribusi Daerah	2.639.909	4.878.898
2.3 Bagian Laba Usaha Daerah	366.011	12.821
2.4 Penerimaan Lain-lain	268.523	336.461
3. Bagian Pendapatan Yang Berasal dari Pemberian Pemerintah Dan Atau Instansi Yang Lebih Tinggi	69.431.680	79.393.907
3.1 Bagi Hasil Pajak	6.638.077	7.107.929
3.2 Bagi Hasil Bukan Pajak	17.728	24.671
3.3 Subsidi Daerah Otonom	50.448.324	57.612.228
3.4 Bantuan Pembangunan	12.016.301	14.649.079
3.5 Penerimaan Lainnya	311.250	-
4. Pinjaman Pemerintah Daerah		
4.1 Pinjaman Dari Pemerintah Pusat	-	-
4.2 Pinjaman Dari Lembaga Keuangan Dalam Negeri	-	-
4.3 Pinjaman Dari Luar Negeri	-	-
B BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP)	31.151.146	10.229.850

TABEL 1.56. REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TK II

Kabupaten Pamekasan
(000 RUPIAH)

Jenis Pengeluaran	1999/2000	2000
(1)	(2)	(3)
A. PENGELUARAN RUTIN	58.723.139	65.200.381
1. Belanja Pegawai	49.009.326	56.121.817
2. Belanja Barang	2.275.160	3.545.919
3. Biaya Pemeliharaan	559.642	558.073
4. Belanja Perjalanan Dinas	244.990	212.495
5. Belanja Lain-lain	4.232.640	3.073.179
6. Angsuran Pinjaman / Hutang Dan Bunga	-	-
7. Ganjaran/ Subsidi / Sumbangan Kepada Daerah Bawahan	712.617	645.899
8. Pengeluaran Yang Tidak Termasuk Bagian Lain	784.177	515.027
9. Pengeluaran Tidak Tersangka	904.587	527.972
B. PENGELUARAN PEMBANGUNAN	14.176.128	16.353.015
1. Industri	595.000	35.000
2. Pertanian Dan Kehutanan	751.255	825.126
3. Sumber Daya Air Dan Irigasi	216.315	714.504
4. Tenaga Kerja	-	-
5. Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan daerah dan koperasi	227.982	174.578
6. Transportasi	3.141.233	6.735.477
7. Pertambangan Dan Energi	39.900	-
8. Pariwisata Dan Telekomunikasi Daerah	79.972	11.190
9. Pembangunan Daerah Dan Pemukiman	1.869.289	749.450
10. Lingkungan Hidup Dan Tata Ruang	1.412.906	991.054
11. Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Thd Tuhan YME, Pemuda & OR	2.451.222	1.210.720
12. Kependudukan Dan Keluarga Sejahtera	-	-
13. Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan remaja	430.355	284.557
14. Perumahan Dan Pemukiman	142.720	1.544.074
15. Agama	550.000	250.000
16. Ilmu Pengetahuan Dan Tehnologi	434.900	95.000
17. Hukum	19.820	115.000
18. Aparatur Pemerintah Dan Pengawasan	1.703.259	2.566.285
19. Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	40.000	51.000
20. Keamanan Dan Ketertiban Umum	70.000	-
21. Subsidi Pembangunan Kepada Daerah Bawahan	-	-
C. Jumlah A + B	72.899.267	81.553.396
D. URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP)	10.513.212	9.673.516

TABEL 1.57. REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH TK II
Kabupaten Sumenep
(000 RUPIAH)

Jenis Penerimaan	1999/2000	2000
(1)	(2)	(3)
A. PENERIMAAN DAERAH	129.560.291	108.803.841
1. Bagian Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu	1.174.733	1.013.179
2. Bagian Pendapatan asli daerah	2.919.117	3.001.770
2.1 Pajak Daerah	785.792	872.599
2.2 Retribusi Daerah	1.855.044	1.462.578
2.3 Bagian Laba Usaha Daerah	-	23.000
2.4 Penerimaan Lain-lain	278.282	643.594
3. Bagian Pendapatan Yang Berasal dari Pemberian Pemerintah Dan Atau Instansi Yang Lebih Tinggi	124.969.460	104.788.892
3.1 Bagi Hasil Pajak	17.029.815	17.772.185
3.2 Bagi Hasil Bukan Pajak	17.369	20.386
3.3 Subsidi Daerah Otonom	74.243.577	68.830.383
3.4 Bantuan Pembangunan	33.678.699	18.165.938
3.5 Penerimaan Lainnya	-	-
4. Pinjaman Pemerintah Daerah	496.980	-
4.1 Pinjaman Dari Pemerintah Pusat	496.980	-
4.2 Pinjaman Dari Lembaga Keuangan Dalam Negeri	-	-
4.3 Pinjaman Dari Luar Negeri	-	-
B. BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP)	14.856.408	34.263.584

TABEL 1.58. REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TK II
Kabupaten Sumenep
(000 RUPIAH)

Jenis Pengeluaran	1999/2000	2000
(1)	(2)	(3)
A. PENGELUARAN RUTIN	90.563.947	82.357.178
1. Belanja Pegawai	71.810.460	67.589.704
2. Belanja Barang	3.578.169	3.054.392
3. Biaya Pemeliharaan	946.977	605.600
4. Belanja Perjalanan Dinas	624.330	559.340
5. Belanja Lain-lain	8.341.246	8.217.582
6. Angsuran Pinjaman / Hutang Dan Bunga	556.870	641.654
7. Ganjaran/ Subsidi / Sumbangan Kepada Daerah Bawahan	1.165.280	772.540
8. Pengeluaran Yang Tidak Termasuk Bagian Lain	2.992.151	858.409
9. Pengeluaran Tidak Tersangka	548.465	57.957
B. PENGELUARAN PEMBANGUNAN	37.983.165	20.868.627
1. Industri	77.500	75.000
2. Pertanian Dan Kehutanan	2.460.457	1.594.723
3. Sumber Daya Air Dan Irigasi	1.087.776	1.185.540
4. Tenaga Kerja	190.000	560.000
5. Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan daerah dan koperasi	836.936	724.968
6. Transportasi	6.000.193	5.317.432
7. Pertambangan Dan Energi	97.597	411.946
8. Pariwisata Dan Telekomunikasi Daerah	78.430	138.510
9. Pembangunan Daerah Dan Pemukiman	12.063.608	1.093.936
10. Lingkungan Hidup Dan Tata Ruang	347.329	1.073.167
11. Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Thd Tuhan YME, Pemuda & OR	5.364.202	1.871.148
12. Kependudukan Dan Keluarga Sejahtera	2.997.564	40.000
13. Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan remaja	-	363.263
14. Perumahan Dan Pemukiman	23.390	2.112.145
15. Agama	480.400	237.066
16. Ilmu Pengetahuan Dan Tehnologi	486.192	811.479
17. Hukum	50.000	100.000
18. Aparatur Pemerintah Dan Pengawasan	5.121.591	2.747.458
19. Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	172.500	265.846
20. Keamanan Dan Ketertiban Umum	47.500	145.000
21. Subsidi Pembangunan Kepada Daerah Bawahan	-	-
C Jumlah A + B	128.547.112	103.225.805
D. URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP)	14.856.408	34.263.584

TABEL 1.59. REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH TK II
Kota Kediri
(000 RUPIAH)

Jenis Penerimaan	1999/2000	2000
(1)	(2)	(3)
A. PENERIMAAN DAERAH	56.611.081	55.784.995
1. Bagian Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu	2.802.191	2.655.380
2. Bagian Pendapatan asli daerah	7.775.510	7.871.025
2.1 Pajak Daerah	2.332.316	2.498.038
2.2 Retribusi Daerah	1.896.620	1.735.212
2.3 Bagian Laba Usaha Daerah	50.000	
2.4 Penerimaan Lain-lain	3.496.574	3.637.775
3. Bagian Pendapatan Yang Berasal dari Pemberian Pemerintah Dan Atau Instansi Yang Lebih Tinggi	45.748.125	45.258.589
3.1 Bagi Hasil Pajak	6.258.565	6.899.614
3.2 Bagi Hasil Bukan Pajak	62.736	77.080
3.3 Subsidi Daerah Otonom	26.105.330	24.400.684
3.4 Bantuan Pembangunan	13.321.494	13.881.211
3.5 Penerimaan Lainnya	-	-
4. Pinjaman Pemerintah Daerah	285.255	-
4.1 Pinjaman Dari Pemerintah Pusat	285.255	
4.2 Pinjaman Dari Lembaga Keuangan Dalam Negeri	-	-
4.3 Pinjaman Dari Luar Negeri	-	-
B BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP)	4.893.789	2.745.031

TABEL 1.60. REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TK II
Kota Kediri
(000 RUPIAH)

Jenis Penerimaan	1999/2000	2000
(1)	(2)	(3)
A. PENGELUARAN RUTIN	38.000.502	37.244.383
1. Belanja Pegawai	25.877.230	23.799.302
2. Belanja Barang	4.355.945	5.485.261
3. Biaya Pemeliharaan	944.119	566.718
4. Belanja Perjalanan Dinas	364.390	406.437
5. Belanja Lain-lain	3.914.313	3.381.484
6. Angsuran Pinjaman / Hutang Dan Bunga	141.042	102.306
7. Ganjaran/ Subsidi / Sumbangan Kepada Daerah Bawahan	227.520	690.301
8. Pengeluaran Yang Tidak Termasuk Bagian Lain	2.175.943	2.812.574
9. Pengeluaran Tidak Tersangka	-	-
B. PENGELUARAN PEMBANGUNAN	15.955.199	14.996.747
1. Industri	16.000	10.000
2. Pertanian Dan Kehutanan	651.750	340.212
3. Sumber Daya Air Dan Irigasi	-	1.039.404
4. Tenaga Kerja	9.500	2.449
5. Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan daerah dan koperasi	585.664	662.429
6. Transportasi	4.047.575	3.569.984
7. Pertambangan Dan Energi	-	-
8. Pariwisata Dan Telekomunikasi Daerah	128.900	72.500
9. Pembangunan Daerah Dan Pemukiman	2.431.778	1.059.382
10. Lingkungan Hidup Dan Tata Ruang	355.879	20.000
11. Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Thd Tuhan YME, Pemuda & OR	2.554.455	1.219.038
12. Kependudukan Dan Keluarga Sejahtera	12.000	25.000
13. Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan remaja	274.267	475.791
14. Perumahan Dan Pemukiman	1.235.891	4.580.354
15. Agama	50.008	30.000
16. Ilmu Pengetahuan Dan Tehnologi	432.584	175.000
17. Hukum	27.000	29.500
18. Aparatur Pemerintah Dan Pengawasan	1.418.271	1.598.779
19. Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	196.500	46.925
20. Keamanan Dan Ketertiban Umum	209.278	40.000
21. Subsidi Pembangunan Kepada Daerah Bawahan	1.317.900	
C Jumlah A + B	53.955.701	52.241.130
D. URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP)	4.893.789	4.893.789

TABEL 1.61. REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH TK II
Kota Blitar
(000 RUPIAH)

Jenis Penerimaan	1999/2000	2000
(1)	(2)	(3)
A. PENERIMAAN DAERAH	36.042.812	35.018.805
1. Bagian Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu	1.626.536	602.529
2. Bagian Pendapatan asli daerah	3.166.692	3.166.692
2.1 Pajak Daerah	768.402	932.074
2.2 Retribusi Daerah	2.097.087	1.862.911
2.3 Bagian Laba Usaha Daerah	-	-
2.4 Penerimaan Lain-lain	301.204	490.046
3. Bagian Pendapatan Yang Berasal dari Pemberian Pemerintah Dan Atau Instansi Yang Lebih Tinggi	31.249.584	31.249.584
3.1 Bagi Hasil Pajak	3.464.400	4.566.924
3.2 Bagi Hasil Bukan Pajak	16.542	19.415
3.3 Subsidi Daerah Otonom	16.085.860	14.847.087
3.4 Bantuan Pembangunan	11.682.782	8.159.897
3.5 Penerimaan Lainnya	-	-
4. Pinjaman Pemerintah Daerah		
4.1 Pinjaman Dari Pemerintah Pusat	-	-
4.2 Pinjaman Dari Lembaga Keuangan Dalam Negeri	-	-
4.3 Pinjaman Dari Luar Negeri	-	-
B BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP)	4.785.638	2.230.909

TABEL 1.62. REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TK II
Kota Blitar
(000 RUPIAH)

Jenis Penerimaan	1999/2000	2000
(1)	(2)	(3)
A. PENGELUARAN RUTIN	20.688.725	19.629.796
1. Belanja Pegawai	15.493.772	13.896.001
2. Belanja Barang	2.282.346	2.604.870
3. Biaya Pemeliharaan	371.698	195.823
4. Belanja Perjalanan Dinas	126.877	114.062
5. Belanja Lain-lain	1.240.023	1.271.216
6. Angsuran Pinjaman / Hutang Dan Bunga	350.000	350.000
7. Ganjaran/ Subsidi / Sumbangan Kepada Daerah Bawahan	50.000	37.500
8. Pengeluaran Yang Tidak Termasuk Bagian Lain	774.009	1.160.325
9. Pengeluaran Tidak Tersangka	-	-
B. PENGELUARAN PEMBANGUNAN	14.624.886	9.383.152
1. Industri	76.000	48.424
2. Pertanian Dan Kehutanan	230.595	204.584
3. Sumber Daya Air Dan Irigasi	75.000	25.000
4. Tenaga Kerja	19.000	18.863
5. Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan daerah dan koperasi	666.249	528.389
6. Transportasi	4.971.320	3.095.870
7. Pertambangan Dan Energi	100.000	150.000
8. Pariwisata Dan Telekomunikasi Daerah	15.000	212.950
9. Pembangunan Daerah Dan Pemukiman	280.866	440.877
10. Lingkungan Hidup Dan Tata Ruang	424.347	562.711
11. Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Thd Tuhan YME, Pemuda & OR	1.584.144	1.397.528
12. Kependudukan Dan Keluarga Sejahtera	7.000	5.250
13. Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan remaja	130.738	446.466
14. Perumahan Dan Pemukiman	3.815.161	692.191
15. Agama	66.465	74.295
16. Ilmu Pengetahuan Dan Tehnologi	387.727	501.700
17. Hukum	41.000	39.000
18. Aparatur Pemerintah Dan Pengawasan	1.650.610	866.655
19. Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	46.165	49.900
20. Keamanan Dan Ketertiban Umum	37.500	22.500
21. Subsidi Pembangunan Kepada Daerah Bawahan	-	-
C Jumlah A + B	35.313.612	29.012.949
D. URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP)	4.785.638	2.230.902

TABEL 1.63. REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH TK II
Kota Malang
(000 RUPIAH)

Jenis Penerimaan	1999/2000	2000
(1)	(2)	(3)
A. PENERIMAAN DAERAH	106.158.205	96.186.649
1. Bagian Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu	4.890.180	3.778.193
2. Bagian Pendapatan asli daerah	17.580.349	16.542.143
2.1 Pajak Daerah	7.905.628	7.030.318
2.2 Retribusi Daerah	6.553.740	6.004.283
2.3 Bagian Laba Usaha Daerah	2.240.000	2.014.146
2.4 Penerimaan Lain-lain	880.981	1.493.396
3. Bagian Pendapatan Yang Berasal dari Pemberian Pemerintah Dan Atau Instansi Yang Lebih Tinggi	80.586.130	75.866.313
3.1 Bagi Hasil Pajak	11.359.396	12.481.743
3.2 Bagi Hasil Bukan Pajak	16.542	19.415
3.3 Subsidi Daerah Otonom	54.396.542	50.018.758
3.4 Bantuan Pembangunan	14.188.650	12.900.537
3.5 Penerimaan Lainnya	625.000	445.860
4. Pinjaman Pemerintah Daerah	3.101.546	-
4.1 Pinjaman Dari Pemerintah Pusat	3.101.546	
4.2 Pinjaman Dari Lembaga Keuangan Dalam Negeri		
4.3 Pinjaman Dari Luar Negeri		
B. BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP)	10.746.203	4.745.527

TABEL 1.64. REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TK II
Kota Malang
(000 RUPIAH)

Jenis Penerimaan	1999/2000	2000
(1)	(2)	(3)
A. PENGELUARAN RUTIN	79.902.927	74.570.904
1. Belanja Pegawai	54.875.622	49.981.330
2. Belanja Barang	8.351.633	8.572.646
3. Biaya Pemeliharaan	1.376.002	1.318.481
4. Belanja Perjalanan Dinas	612.073	415.960
5. Belanja Lain-lain	10.572.389	10.121.005
6. Angsuran Pinjaman / Hutang Dan Bunga	1.975.000	1.900.000
7. Ganjaran/ Subsidi / Sumbangan Kepada Daerah Bawahan	335.400	292.675
8. Pengeluaran Yang Tidak Termasuk Bagian Lain	1.239.517	1.230.793
9. Pengeluaran Tidak Tersangka	565.291	738.014
B. PENGELUARAN PEMBANGUNAN	22.477.085	15.908.469
1. Industri	420.000	27.000
2. Pertanian Dan Kehutanan	260.775	204.411
3. Sumber Daya Air Dan Irigasi	-	7.500
4. Tenaga Kerja	3.000	10.000
5. Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan daerah dan koperasi	855.337	590.000
6. Transportasi	4.177.894	4.922.211
7. Pertambangan Dan Energi	-	-
8. Pariwisata Dan Telekomunikasi Daerah	36.000	75.000
9. Pembangunan Daerah Dan Pemukiman	9.105.361	3.380.523
10. Lingkungan Hidup Dan Tata Ruang	956.482	320.000
11. Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Thd Tuhan YME, Pemuda & OR	1.556.545	894.911
12. Kependudukan Dan Keluarga Sejahtera	27.600	75.780
13. Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan remaja	432.789	2.321.263
14. Perumahan Dan Pemukiman	821.065	444.605
15. Agama	74.925	60.000
16. Ilmu Pengetahuan Dan Tehnologi	222.350	182.557
17. Hukum	30.000	60.000
18. Aparatur Pemerintah Dan Pengawasan	3.041.787	1.759.347
19. Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	140.500	279.500
20. Keamanan Dan Ketertiban Umum	226.265	194.061
21. Subsidi Pembangunan Kepada Daerah Bawahan	88.410	99.800
C. Jumlah A + B	102.380.012	90.479.373
D. URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP)	10.746.203	5.245.527

TABEL 1.65. REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH TK II
Kota Probolinggo
(000 RUPIAH)

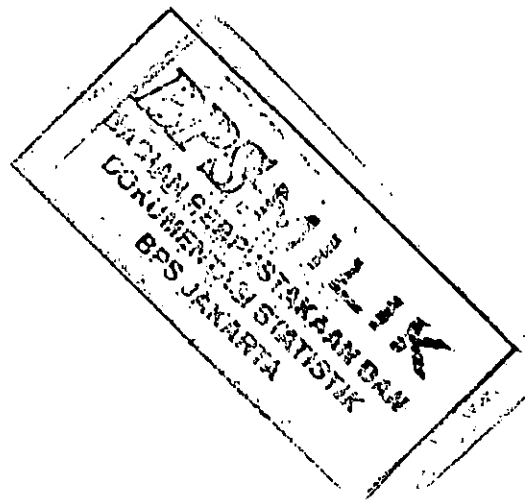
Jenis Penerimaan	1999/2000	2000
(1)	(2)	(3)
A. PENERIMAAN DAERAH	40.413.988	35.709.218
1. Bagian Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu	2.122.109	1.881.412
2. Bagian Pendapatan asli daerah	3.133.499	3.457.389
2.1 Pajak Daerah	1.372.310	1.333.884
2.2 Retribusi Daerah	1.505.153	1.929.327
2.3 Bagian Laba Usaha Daerah	55.000	55.000
2.4 Penerimaan Lain-lain	201.036	139.178
3. Bagian Pendapatan Yang Berasal dari Pemberian Pemerintah Dan Atau Instansi Yang Lebih Tinggi	35.158.380	30.370.417
3.1 Bagi Hasil Pajak	3.897.995	4.356.415
3.2 Bagi Hasil Bukan Pajak	39.884	36.803
3.3 Subsidi Daerah Otonom	19.494.864	16.667.980
3.4 Bantuan Pembangunan	11.725.637	9.309.219
3.5 Penerimaan Lainnya	-	-
4. Pinjaman Pemerintah Daerah		
4.1 Pinjaman Dari Pemerintah Pusat	-	-
4.2 Pinjaman Dari Lembaga Keuangan Dalam Negeri	-	-
4.3 Pinjaman Dari Luar Negeri	-	-
B. BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP)	3.436.752	1.322.403

TABEL 1.66. REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TK II
Kota Probolinggo
(000 RUPIAH)

Jenis Penerimaan	1999/2000	2000
(1)	(2)	(3)
A. PENGELUARAN RUTIN	24.054.521	21.596.244
1. Belanja Pegawai	18.365.372	16.445.153
2. Belanja Barang	2.852.294	2.986.274
3. Biaya Pemeliharaan	311.633	260.281
4. Belanja Perjalanan Dinas	92.863	116.177
5. Belanja Lain-lain	1.618.214	1.212.526
6. Angsuran Pinjaman / Hutang Dan Bunga	301.447	118.531
7. Ganjaran/ Subsidi / Sumbangan Kepada Daerah Bawahan	246.652	248.750
8. Pengeluaran Yang Tidak Termasuk Bagian Lain	266.046	208.553
9. Pengeluaran Tidak Tersangka	-	-
B. PENGELUARAN PEMBANGUNAN	14.478.055	11.691.657
1. Industri	50.000	45.000
2. Pertanian Dan Kehutanan	263.860	356.255
3. Sumber Daya Air Dan Irigasi	280.024	105.018
4. Tenaga Kerja	-	5.000
5. Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan daerah dan koperasi	648.830	404.984
6. Transportasi	4.595.322	3.370.448
7. Pertambangan Dan Energi	83.250	50.000
8. Pariwisata Dan Telekomunikasi Daerah	28.906	29.539
9. Pembangunan Daerah Dan Pemukiman	1.744.052	2.149.871
10. Lingkungan Hidup Dan Tata Ruang	2.048.749	235.948
11. Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Thd Tuhan YME, Pemuda & OR	1.175.401	1.529.116
12. Kependudukan Dan Keluarga Sejahtera	75.000	40.000
13. Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan remaja	1.027.854	553.731
14. Perumahan Dan Pemukiman	846.076	1.165.570
15. Agama	103.370	190.000
16. Ilmu Pengetahuan Dan Tehnologi	406.080	179.750
17. Hukum	25.000	29.990
18. Aparatur Pemerintah Dan Pengawasan	779.933	1.115.070
19. Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	151.356	42.734
20. Keamanan Dan Ketertiban Umum	139.992	93.634
21. Subsidi Pembangunan Kepada Daerah Bawahan	-	-
C Jumlah A + B	38.532.576	33.287.901
D. URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP)	3.436.752	1.322.403

TABEL 1.67. REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH TK II
Kota Pasuruan
(000 RUPIAH)

Jenis Penerimaan	1999/2000	2000
(1)	(2)	(3)
A. PENERIMAAN DAERAH	30.144.348	32.657.326
1. Bagian Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu	393.883	200.476
2. Bagian Pendapatan asli daerah	2.997.890	3.299.048
2.1 Pajak Daerah	855.439	844.313
2.2 Retribusi Daerah	1.834.867	2.001.955
2.3 Bagian Laba Usaha Daerah	10.000	
2.4 Penerimaan Lain-lain	297.584	452.780
3. Bagian Pendapatan Yang Berasal dari Pemberian Pemerintah Dan Atau Instansi Yang Lebih Tinggi	26.752.575	29.157.803
3.1 Bagi Hasil Pajak	3.635.191	3.839.111
3.2 Bagi Hasil Bukan Pajak	16.821	19.847
3.3 Subsidi Daerah Otonom	13.995.530	14.966.356
3.4 Bantuan Pembangunan	9.105.033	10.332.489
3.5 Penerimaan Lainnya	-	-
4. Pinjaman Pemerintah Daerah		
4.1 Pinjaman Dari Pemerintah Pusat	-	-
4.2 Pinjaman Dari Lembaga Keuangan Dalam Negeri	-	-
4.3 Pinjaman Dari Luar Negeri	-	-
B. BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP)	10.935.573	1.617.730



TABEL 1.68. REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TK II
Kota Pasuruan
(000 RUPIAH)

Jenis Penerimaan	1999/2000	2000
(1)	(2)	(3)
A. PENGELUARAN RUTIN	19.177.559	20.533.552
1. Belanja Pegawai	14.640.315	15.283.860
2. Belanja Barang	2.318.341	2.651.021
3. Biaya Pemeliharaan	454.388	398.919
4. Belanja Perjalanan Dinas	179.307	352.665
5. Belanja Lain-lain	1.025.659	1.140.183
6. Angsuran Pinjaman / Hutang Dan Bunga	53.300	216.439
7. Ganjaran/ Subsidi / Sumbangan Kepada Daerah Bawahan	274.069	311.693
8. Pengeluaran Yang Tidak Termasuk Bagian Lain	232.180	178.771
9. Pengeluaran Tidak Tersangka	-	-
B. PENGELUARAN PEMBANGUNAN	10.766.312	11.336.872
1. Industri	382.576	85.000
2. Pertanian Dan Kehutanan	195.560	218.408
3. Sumber Daya Air Dan Irigasi	29.301	-
4. Tenaga Kerja	-	15.000
5. Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan daerah dan koperasi	1.087.191	1.730.839
6. Transportasi	2.694.993	2.659.599
7. Pertambangan Dan Energi	-	-
8. Pariwisata Dan Telekomunikasi Daerah	8.000	8.000
9. Pembangunan Daerah Dan Pemukiman	771.624	460.952
10. Lingkungan Hidup Dan Tata Ruang	431.661	149.455
11. Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Thd Tuhan YME, Pemuda & OR	1.768.433	1.139.709
12. Kependudukan Dan Keluarga Sejahtera	18.620	29.248
13. Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan remaja	505.546	346.152
14. Perumahan Dan Pemukiman	1.364.890	3.338.335
15. Agama	78.779	80.693
16. Ilmu Pengetahuan Dan Tehnologi	167.160	127.240
17. Hukum	45.160	38.675
18. Aparatur Pemerintah Dan Pengawasan	1.038.378	772.498
19. Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	79.940	43.980
20. Keamanan Dan Ketertiban Umum	98.500	93.090
21. Subsidi Pembangunan Kepada Daerah Bawahan	-	-
C Jumlah A + B	29.943.871	31.870.424
D. URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP)	10.513.212	1.625.561

TABEL 1.69. REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH TK II
Kota Mojokerto
(000 RUPIAH)

Jenis Penerimaan	1999/2000	2000
(1)	(2)	(3)
A. PENERIMAAN DAERAH	29.112.678	32.167.218
1. Bagian Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu	690.932	593.279
2. Bagian Pendapatan asli daerah	3.036.547	3.464.791
2.1 Pajak Daerah	1.154.112	1.283.152
2.2 Retribusi Daerah	1.802.168	1.918.305
2.3 Bagian Laba Usaha Daerah	7.750	5.999
2.4 Penerimaan Lain-lain	72.517	257.335
3. Bagian Pendapatan Yang Berasal dari Pemberian Pemerintah Dan Atau Instansi Yang Lebih Tinggi	25.385.199	28.109.148
3.1 Bagi Hasil Pajak	3.774.326	4.164.637
3.2 Bagi Hasil Bukan Pajak	164.392	19.415
3.3 Subsidi Daerah Otonom	14.858.672	14.876.889
3.4 Bantuan Pembangunan	6.587.809	9.048.206
3.5 Penerimaan Lainnya	-	-
4. Pinjaman Pemerintah Daerah		
4.1 Pinjaman Dari Pemerintah Pusat	-	-
4.2 Pinjaman Dari Lembaga Keuangan Dalam Negeri	-	-
4.3 Pinjaman Dari Luar Negeri	-	-
B BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP)	2.896.015	1.190.645

TABEL 1.70. REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TK II
Kota Mojokerto
(000 RUPIAH)

Jenis Penerimaan	1999/2000	2000
(1)	(2)	(3)
A. PENGELUARAN RUTIN	20.842.915	21.166.909
1. Belanja Pegawai	14.699.442	14.165.048
2. Belanja Barang	2.741.949	3.018.604
3. Biaya Pemeliharaan	670.485	485.917
4. Belanja Perjalanan Dinas	260.983	226.956
5. Belanja Lain-lain	1.762.131	1.664.155
6. Angsuran Pinjaman / Hutang Dan Bunga	-	895.353
7. Ganjaran/ Subsidi / Sumbangan Kepada Daerah Bawahan	146.290	93.124
8. Pengeluaran Yang Tidak Termasuk Bagian Lain	561.635	617.753
9. Pengeluaran Tidak Tersangka	-	-
B. PENGELUARAN PEMBANGUNAN	8.602.991	9.512.339
1. Industri	1.000.000	100.000
2. Pertanian Dan Kehutanan	255.100	140.465
3. Sumber Daya Air Dan Irigasi	159.850	-
4. Tenaga Kerja	20.000	-
5. Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan daerah dan koperasi	125.000	-
6. Transportasi	3.180.666	3.285.000
7. Pertambangan Dan Energi	522.840	399.982
8. Pariwisata Dan Telekomunikasi Daerah	174.740	20.000
9. Pembangunan Daerah Dan Pemukiman	1.810.091	1.022.940
10. Lingkungan Hidup Dan Tata Ruang	168.334	-
11. Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Thd Tuhan YME, Pemuda & OR	42.906	1.081.161
12. Kependudukan Dan Keluarga Sejahtera	4.000	5.000
13. Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan remaja	57.327	184.942
14. Perumahan Dan Pemukiman	24.860	2.646.920
15. Agama	30.000	50.000
16. Ilmu Pengetahuan Dan Tehnologi	285.000	115.000
17. Hukum	10.000	20.000
18. Aparatur Pemerintah Dan Pengawasan	605.277	395.930
19. Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	85.000	20.000
20. Keamanan Dan Ketertiban Umum	42.000	25.000
21. Subsidi Pembangunan Kepada Daerah Bawahan	-	-
C. Jumlah A + B	29.445.906	30.679.248
D. URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP)	3.008.415	1.190.645

TABEL 1.71. REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH TK II
Kota Madiun
(000 RUPIAH)

Jenis Penerimaan	1999/2000	2000
(1)	(2)	(3)
A. PENERIMAAN DAERAH	49.822.890	47.501.493
1. Bagian Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu	1.084.739	3.093.312
2. Bagian Pendapatan asli daerah	4.884.345	4.729.786
2.1 Pajak Daerah	1.758.318	1.664.096
2.2 Retribusi Daerah	2.478.332	2.098.591
2.3 Bagian Laba Usaha Daerah	22.291	25.000
2.4 Penerimaan Lain-lain	625.404	942.099
3. Bagian Pendapatan Yang Berasal dari Pemberian Pemerintah Dan Atau Instansi Yang Lebih Tinggi	42.863.806	39.678.395
3.1 Bagi Hasil Pajak	4.572.000	4.782.465
3.2 Bagi Hasil Bukan Pajak	53.153	39.730
3.3 Subsidi Daerah Otonom	26.361.969	23.415.441
3.4 Bantuan Pembangunan	11.826.684	11.440.759
3.5 Penerimaan Lainnya	-	-
4. Pinjaman Pemerintah Daerah	990.000	-
4.1 Pinjaman Dari Pemerintah Pusat	-	-
4.2 Pinjaman Dari Lembaga Keuangan Dalam Negeri	990.000	-
4.3 Pinjaman Dari Luar Negeri	-	-
B. BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP)	4.484.154	2.687.033

TABEL 1.72. REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TK II
Kota Madiun
(000 RUPIAH)

Jenis Penerimaan	1999/2000	2000
(1)	(2)	(3)
A. PENGELUARAN RUTIN	32.969.254	31.075.917
1. Belanja Pegawai	25.642.394	22.886.201
2. Belanja Barang	2.209.829	2.600.071
3. Biaya Pemeliharaan	239.668	334.831
4. Belanja Perjalanan Dinas	171.957	149.446
5. Belanja Lain-lain	3.349.294	3.490.687
6. Angsuran Pinjaman / Hutang Dan Bunga	511.137	888.553
7. Ganjaran/ Subsidi / Sumbangan Kepada Daerah Bawahan	345.200	65.573
8. Pengeluaran Yang Tidak Termasuk Bagian Lain	499.775	660.555
9. Pengeluaran Tidak Tersangka	-	-
B. PENGELUARAN PEMBANGUNAN	13.760.324	12.945.534
1. Industri	-	-
2. Pertanian Dan Kehutanan	52.790	45.464
3. Sumber Daya Air Dan Irigasi	-	-
4. Tenaga Kerja	-	-
5. Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan daerah dan koperasi	1.386.352	620.795
6. Transportasi	767.093	5.348.660
7. Pertambangan Dan Energi	-	-
8. Pariwisata Dan Telekomunikasi Daerah	25.000	-
9. Pembangunan Daerah Dan Pemukiman	-	49.974
10. Lingkungan Hidup Dan Tata Ruang	156.915	-
11. Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Thd Tuhan YME, Pemuda & OR	1.623.120	949.588
12. Kependudukan Dan Keluarga Sejahtera	-	-
13. Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan remaja	1.090.909	2.619.628
14. Perumahan Dan Pemukiman	5.173.169	732.063
15. Agama	194.748	-
16. Ilmu Pengetahuan Dan Tehnologi	119.257	58.755
17. Hukum	15.000	71.429
18. Aparatur Pemerintah Dan Pengawasan	3.086.141	2.434.178
19. Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	10.574	10.000
20. Keamanan Dan Ketertiban Umum	59.256	5.000
21. Subsidi Pembangunan Kepada Daerah Bawahan	-	-
C Jumlah A + B	46.729.578	44.021.451
D. URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP)	4.329.748	2.273.635

TABEL 1.73. REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH TK II

Kota Surabaya

(000 RUPIAH)

Jenis Penerimaan	1999/2000	2000
(1)	(2)	(3)
A. PENERIMAAN DAERAH	383.726.904	420.668.772
1. Bagian Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu	10.223.373	20.786.796
2. Bagian Pendapatan asli daerah	138.684.846	131.115.000
2.1 Pajak Daerah	77.136.860	69.185.152
2.2 Retribusi Daerah	46.397.581	48.041.068
2.3 Bagian Laba Usaha Daerah	7.921.410	8.859.654
2.4 Penerimaan Lain-lain	7.228.995	5.029.126
3. Bagian Pendapatan Yang Berasal dari Pemberian Pemerintah Dan Atau Instansi Yang Lebih Tinggi	234.818.685	221.784.385
3.1 Bagi Hasil Pajak	80.807.318	87.071.865
3.2 Bagi Hasil Bukan Pajak	4.049.827	3.125.259
3.3 Subsidi Daerah Otonom	93.910.608	86.372.882
3.4 Bantuan Pembangunan	31.619.521	40.764.379
3.5 Penerimaan Lainnya	24.431.411	4.450.000
4. Pinjaman Pemerintah Daerah	-	46.982.591
4.1 Pinjaman Dari Pemerintah Pusat	-	46.982.591
4.2 Pinjaman Dari Lembaga Keuangan Dalam Negeri	-	-
4.3 Pinjaman Dari Luar Negeri	-	-
B BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP)	47.249.569	23.650.534

TABEL 1.74. REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TK II
Kota Surabaya
(000 RUPIAH)

Jenis Penerimaan	1999/2000	2000
(1)	(2)	(3)
A. PENGELUARAN RUTIN	260.013.774	255.332.656
1. Belanja Pegawai	99.611.248	93.358.190
2. Belanja Barang	40.054.201	39.152.610
3. Biaya Pemeliharaan	12.408.560	12.194.853
4. Belanja Perjalanan Dinas	658.642	805.062
5. Belanja Lain-lain	61.025.549	76.111.296
6. Angsuran Pinjaman / Hutang Dan Bunga	29.729.042	20.933.760
7. Ganjaran/ Subsidi / Sumbangan Kepada Daerah Bawahan	3.234.500	3.182.625
8. Pengeluaran Yang Tidak Termasuk Bagian Lain	13.286.467	8.469.260
9. Pengeluaran Tidak Tersangka	5.565	1.125.000
B. PENGELUARAN PEMBANGUNAN	102.926.334	125.804.371
1. Industri	383.600	101.900
2. Pertanian Dan Kehutanan	1.832.085	1.121.691
3. Sumber Daya Air Dan Irigasi	3.192.849	16.025.532
4. Tenaga Kerja	44.974	299.937
5. Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan daerah dan koperasi	7.797.224	9.473.905
6. Transportasi	16.968.804	25.512.604
7. Pertambangan Dan Energi	-	-
8. Pariwisata Dan Telekomunikasi Daerah	3.105.943	1.275.776
9. Pembangunan Daerah Dan Pemukiman	34.857.732	29.606.122
10. Lingkungan Hidup Dan Tata Ruang	5.522.360	8.270.003
11. Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Thd Tuhan YME, Pemuda & OR	2.760.577	5.288.787
12. Kependudukan Dan Keluarga Sejahtera	803.144	907.476
13. Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan remaja	2.596.500	7.906.906
14. Perumahan Dan Pemukiman	5.166.267	3.748.415
15. Agama	387.150	485.000
16. Ilmu Pengetahuan Dan Tehnologi	3.468.154	2.131.047
17. Hukum	481.600	417.500
18. Aparatur Pemerintah Dan Pengawasan	13.437.171	12.618.443
19. Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	120.200	159.997
20. Keamanan Dan Ketertiban Umum	-	-
21. Subsidi Pembangunan Kepada Daerah Bawahan	-	453.330
C Jumlah A + B	362.940.108	381.137.027
D. URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN (UKP)	38.006.091	10.682.451

**TABEL 2.1. SUMBER PENERIMAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000
BERDASARKAN DAERAH TINGKAT II SE JAWA TIMUR**

Kabupaten/Kota	Bagian Sisa lebih	PAD	Pendapatan dari Pemerintah	Pinjaman Pemerintah Daerah	Penerimaan Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01 Pacitan	2.689.132	4.133.847	75.326.808	-	82.149.787
02 Ponorogo	840.369	4.519.087	120.025.928	1.248.750	126.634.134
03 Trenggalek	5.383.040	4.170.670	84.105.779	-	93.659.489
04 Tulungagung	2.746.399	6.855.722	101.459.558	-	111.061.679
05 Blitar	5.461.659	6.513.609	129.470.652	-	141.445.921
06 Kediri	5.876.886	12.458.409	128.187.656	-	146.522.951
07 Malang	1.333.603	13.149.269	172.136.956	-	186.619.828
08 Lumajang	10.373.187	8.034.134	87.737.422	-	106.144.742
09 Jember	7.191.395	16.981.627	186.754.484	655.415	211.582.921
10 Banyuwangi	3.931.933	10.352.777	148.021.149	169.224	162.475.083
11 Bondowoso	2.194.867	4.162.785	71.813.189	-	78.170.841
12 Situbondo	2.814.442	4.628.037	83.942.746	-	91.385.225
13 Probolinggo	2.238.147	5.138.918	89.589.746	-	96.966.811
14 Pasuruan	8.102.282	18.383.630	114.606.220	-	141.092.132
15 Sidoarjo	12.487.442	41.662.147	121.492.906	-	175.642.495
16 Mojokerto	6.405.246	11.623.278	78.660.075	-	96.688.599
17 Jombang	3.345.842	13.359.845	89.089.029	-	105.794.716
18 Nganjuk	4.674.834	7.918.060	97.783.502	-	110.376.396
19 Madiun	1.234.346	3.995.786	78.277.341	-	83.507.473
20 Magetan	4.167.332	7.862.143	90.448.260	-	102.477.735
21 Ngawi	4.712.505	4.969.000	95.823.010	-	105.504.515
22 Bojonegoro	4.346.189	6.723.317	96.177.828	-	107.247.334
23 Tuban	13.477.961	17.853.442	96.473.456	-	127.804.859
24 Lamongan	2.328.970	6.340.258	114.560.076	-	123.729.305
25 Gresik	5.998.089	19.219.730	84.807.961	-	110.025.780
26 Bangkalan	1.828.395	4.976.207	74.479.756	1.673.204	82.957.562
27 Sampang	2.710.874	2.485.167	60.608.020	-	65.804.061
28 Pamekasan	2.456.679	6.361.692	79.393.907	-	88.212.278
29 Sumenep	1.013.179	3.001.770	104.788.892	-	108.803.841
71 Kediri	2.655.380	7.871.025	45.258.589	-	55.784.995
72 Blitar	602.529	3.285.031	31.249.584	-	35.137.144
73 Malang	3.778.193	16.542.143	75.866.313	-	96.186.649
74 Probolinggo	1.381.412	3.457.389	30.370.417	-	35.709.218
75 Pasuruan	200.476	3.299.048	29.157.803	-	32.657.326
76 Mojokerto	593.279	3.464.791	28.109.148	-	32.167.218
77 Madiun	3.093.312	4.729.786	39.678.395	-	47.501.493
78 Surabaya	20.786.796	131.115.000	221.784.385	46.982.591	420.668.772
Jawa Timur	166.456.602	451.598.576	3.457.516.946	50.729.184	4.126.301.308

TABEL 2.2. SUMBER PENERIMAAN PAD TAHUN ANGGARAN 2000
BERDASARKAN DAERAH TINGKAT II SE JAWA TIMUR

Kabupaten/Kota		Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Laba Usaha Daerah	Penerimaan Lain-lain	P A D
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	Pacitan	701.663	2.544.082	3.000	885.102	4.133.847
02	Ponorogo	1.221.829	2.662.034	115.701	519.523	4.519.087
03	Trenggalek	828.662	1.390.530	-	1.951.478	4.170.670
04	Tulungagung	1.932.543	4.381.917	20.160	521.102	6.855.722
05	Blitar	1.348.387	1.572.616	53.900	3.538.706	6.513.609
06	Kediri	3.959.350	7.772.735	264.080	462.244	12.458.409
07	Malang	7.289.508	5.518.352	75.000	266.409	13.149.269
08	Lumajang	2.100.015	4.714.080	64.025	1.156.013	8.034.134
09	Jember	4.015.314	9.736.271	2.262.638	967.404	16.981.627
10	Banyuwangi	3.773.181	5.915.442	125.000	539.154	10.352.777
11	Bondowoso	1.240.275	2.525.347	-	397.163	4.162.785
12	Situbondo	2.450.980	1.472.185	245.699	459.173	4.628.037
13	Probolinggo	2.475.462	1.997.775	13.350	652.331	5.138.918
14	Pasuruan	13.565.088	4.035.924	-	782.618	18.383.630
15	Sidoarjo	18.910.540	18.912.361	526.500	3.312.746	41.662.147
16	Mojokerto	6.550.725	3.837.254	79.000	1.155.299	11.623.278
17	Jombang	2.502.988	2.316.339	234.000	8.306.518	13.359.845
18	Nganjuk	1.845.684	5.034.994	174.271	863.111	7.918.060
19	Madiun	1.197.073	2.638.499	12.500	147.713	3.995.786
20	Magetan	1.484.802	4.173.823	95.000	2.108.518	7.862.143
21	Ngawi	1.559.475	2.287.989	50.811	1.070.725	4.969.000
22	Bojonegoro	960.457	4.314.759	60.896	1.387.205	6.723.317
23	Tuban	12.418.816	4.051.401	146.050	1.237.175	17.853.442
24	Lamongan	2.801.740	2.497.088	167.488	873.942	6.340.258
25	Gresik	12.171.239	2.587.452	2.000	4.459.039	19.219.730
26	Bangkalan	659.424	4.033.027	53.569	230.187	4.976.207
27	Sampang	413.372	1.832.711	3.988	235.096	2.485.167
28	Pamekasan	1.133.512	4.878.898	12.821	336.461	6.361.692
29	Sumenep	872.599	1.462.578	23.000	643.594	3.001.770
71	Kediri	2.498.038	1.735.212	-	3.637.775	7.871.025
72	Blitar	932.074	1.862.911	-	490.046	3.285.031
73	Malang	7.030.318	6.004.283	2.014.146	1.493.396	16.542.143
74	Probolinggo	1.333.884	1.929.327	55.000	139.178	3.457.389
75	Pasuruan	844.313	2.001.955	-	452.780	3.299.048
76	Mojokerto	1.283.152	1.918.305	5.999	257.335	3.464.791
77	Madiun	1.664.096	2.098.591	25.000	942.099	4.729.786
78	Surabaya	69.185.152	48.041.068	8.859.654	5.029.126	131.115.000
Jawa Timur		197.155.729	186.690.117	15.844.246	51.908.485	451.598.576

**TABEL 2.3. SUMBER PENERIMAAN PENDAPATAN DARI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2000
BERDASARKAN DAERAH TINGKAT II SE JAWA TIMUR**

Kabupaten/Kota		Bagi Hasil Pajak	Bagi Hasil Bukan Pajak	Subsidi Daerah Otonomi	Bantuan Pembangunan	Penerimaan Lainnya	Pendapatan dari Pemerintah
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	Pacitan	5.664.480	32.845	47.604.044	21.826.040	199.399	75.326.808
02	Ponorogo	8.372.106	83.170	66.582.619	44.753.786	234.247	120.025.928
03	Trenggalek	7.704.228	23.942	58.904.924	16.933.322	539.363	84.105.779
04	Tulungagung	9.186.649	60.923	77.139.365	15.072.621	-	101.459.558
05	Blitar	9.504.351	46.221	84.989.139	34.930.942	-	129.470.652
06	Kediri	16.248.933	79.156	92.673.075	19.186.492	-	128.187.656
07	Malang	17.749.388	186.208	125.556.506	28.501.354	143.500	172.136.956
08	Lumajang	9.092.986	107.146	62.763.578	15.756.972	16.740	87.737.422
09	Jember	15.836.878	140.725	123.805.821	46.938.060	33.000	186.754.484
10	Banyuwangi	12.667.699	188.249	94.444.036	40.271.829	449.336	148.021.149
11	Bondowoso	7.522.581	24.075	51.333.902	12.073.394	859.237	71.813.189
12	Situbondo	7.800.880	22.601	47.763.079	28.356.186	-	83.942.746
13	Probolinggo	10.667.873	53.079	63.813.983	15.054.811	-	89.589.746
14	Pasuruan	15.125.819	54.033	71.337.159	28.089.209	-	114.606.220
15	Sidoarjo	26.197.746	19.415	77.639.919	17.635.826	-	121.492.906
16	Mojokerto	10.543.273	19.415	54.499.427	13.597.960	-	78.660.075
17	Jombang	8.496.958	38.831	65.501.968	15.051.272	-	89.089.029
18	Nganjuk	10.453.320	55.043	70.584.895	16.482.369	207.875	97.783.502
19	Madiun	8.369.533	175.516	58.864.484	10.867.808	-	78.277.341
20	Magetan	9.715.254	19.416	63.785.750	16.927.840	-	90.448.260
21	Ngawi	5.236.793	53.500	74.004.994	16.527.723	-	95.823.010
22	Bojonegoro	10.254.004	373.645	69.898.694	15.349.531	301.954	96.177.828
23	Tuban	12.090.125	186.223	63.874.940	20.322.168	-	96.473.456
24	Lamongan	10.484.129	319.417	71.531.493	32.225.038	-	114.560.076
25	Gresik	14.597.732	33.687	52.773.998	17.402.544	-	84.807.961
26	Bangkalan	6.043.853	25.432	54.370.741	14.039.730	-	74.479.756
27	Sampang	6.930.550	20.114	38.012.801	15.644.555	-	60.608.020
28	Pamekasan	7.107.929	24.671	57.612.228	14.649.079	-	79.393.907
29	Sumenep	17.772.185	20.386	68.830.383	18.165.938	-	104.788.892
71	Kediri	6.899.614	77.080	24.400.684	13.881.211	-	45.258.589
72	Blitar	4.566.924	19.415	14.847.087	8.159.897	-	27.593.323
73	Malang	12.481.743	19.415	50.018.758	12.900.537	445.860	75.866.313
74	Probolinggo	4.356.415	36.803	16.667.980	9.309.219	-	30.370.417
75	Pasuruan	3.839.111	19.847	14.966.356	10.332.489	-	29.157.803
76	Mojokerto	4.164.637	19.415	14.876.889	9.048.206	-	28.109.148
77	Madiun	4.782.465	39.730	23.415.441	11.440.759	-	39.678.395
78	Surabaya	87.071.865	3.125.259	86.372.882	40.764.379	4.450.000	221.784.385
Jawa Timur		445.601.009	5.844.047	2.256.064.022	738.471.095	7.880.511	3.453.860.685

**TABEL 2.4. SUMBER PENERIMAAN PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000
BERDASARKAN DAERAH TINGKAT II SE JAWA TIMUR**

Kabupaten/Kota		Dr Pemerintah Pusat	Lembaga Dalam Negeri	Dari Luar Negeri	Pinjaman Pemerintah Daerah
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
01	Pacitan	-	-	-	-
02	Ponorogo	-	1.248.750	-	1.248.750
03	Trenggalek	-	-	-	-
04	Tulungagung	-	-	-	-
05	Blitar	-	-	-	-
06	Kediri	-	-	-	-
07	Malang	-	-	-	-
08	Lumajang	-	-	-	-
09	Jember	655.415	-	-	655.415
10	Banyuwangi	169.224	-	-	169.224
11	Bondowoso	-	-	-	-
12	Situbondo	-	-	-	-
13	Probolinggo	-	-	-	-
14	Pasuruan	-	-	-	-
15	Sidoarjo	-	-	-	-
16	Mojokerto	-	-	-	-
17	Jombang	-	-	-	-
18	Nganjuk	-	-	-	-
19	Madiun	-	-	-	-
20	Magetan	-	-	-	-
21	Ngawi	-	-	-	-
22	Bojonegoro	-	-	-	-
23	Tuban	-	-	-	-
24	Lamongan	-	-	-	-
25	Gresik	-	-	-	-
26	Bangkalan	1.673.204	-	-	1.673.204
27	Sampang	-	-	-	-
28	Pamekasan	-	-	-	-
29	Sumenep	-	-	-	-
71	Kediri	-	-	-	-
72	Blitar	-	-	-	-
73	Malang	-	-	-	-
74	Probolinggo	-	-	-	-
75	Pasuruan	-	-	-	-
76	Mojokerto	-	-	-	-
77	Madiun	-	-	-	-
78	Surabaya	46.982.591	-	-	46.982.591
Jawa Timur		49.480.434	1.248.750	-	50.729.184

**TABEL 2.5. PERSENTASE SUMBER PENERIMAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000
BERDASARKAN DAERAH TINGKAT II SE JAWA TIMUR**

Kabupaten/Kota		Bagian Sisa lebih	PAD	Pendapatan dari Pemerintah	Pinjaman Pemerintah Daerah	Penerimaan Daerah
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	Pacitan	3,27	5,03	91,69	0,00	100,00
02	Ponorogo	0,66	3,57	94,78	0,99	100,00
03	Trenggalek	5,75	4,45	89,80	0,00	100,00
04	Tulungagung	2,47	6,17	91,35	0,00	100,00
05	Blitar	3,86	4,61	91,53	0,00	100,00
06	Kediri	4,01	8,50	87,49	0,00	100,00
07	Malang	0,71	7,05	92,24	0,00	100,00
08	Lumajang	9,77	7,57	82,66	0,00	100,00
09	Jember	3,40	8,03	88,27	0,31	100,00
10	Banyuwangi	2,42	6,37	91,10	0,10	100,00
11	Bondowoso	2,81	5,33	91,87	0,00	100,00
12	Situbondo	3,08	5,06	91,86	0,00	100,00
13	Probolinggo	2,31	5,30	92,39	0,00	100,00
14	Pasuruan	5,74	13,03	81,23	0,00	100,00
15	Sidoarjo	7,11	23,72	69,17	0,00	100,00
16	Mojokerto	6,62	12,02	81,35	0,00	100,00
17	Jombang	3,16	12,63	84,21	0,00	100,00
18	Nganjuk	4,24	7,17	88,59	0,00	100,00
19	Madiun	1,48	4,78	93,74	0,00	100,00
20	Magetan	4,07	7,67	88,26	0,00	100,00
21	Ngawi	4,47	4,71	90,82	0,00	100,00
22	Bojonegoro	4,05	6,27	89,68	0,00	100,00
23	Tuban	10,55	13,97	75,48	0,00	100,00
24	Lamongan	2,29	5,12	92,59	0,00	100,00
25	Gresik	5,45	17,47	77,08	0,00	100,00
26	Bangkalan	2,20	6,00	89,78	2,02	100,00
27	Sampang	4,12	3,78	92,10	0,00	100,00
28	Pamekasan	2,78	7,21	90,00	0,00	100,00
29	Sumenep	0,93	2,76	96,31	0,00	100,00
71	Kediri	4,76	14,11	81,13	0,00	100,00
72	Blitar	1,71	9,35	88,94	0,00	100,00
73	Malang	3,93	17,20	78,87	0,00	100,00
74	Probolinggo	5,27	9,68	85,05	0,00	100,00
75	Pasuruan	0,61	10,10	89,28	0,00	100,00
76	Mojokerto	1,84	10,77	87,38	0,00	100,00
77	Madiun	6,51	9,96	83,53	0,00	100,00
78	Surabaya	4,94	31,17	52,72	11,17	100,00
Jawa Timur		4,03	10,94	83,79	1,23	100,00

TABEL 2.6. PERSENTASE SUMBER PAD TAHUN ANGGARAN 2000
BERDASARKAN DAERAH TINGKAT II SE JAWA TIMUR

Kabupaten/Kota		Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Laba Usaha Daerah	Penerimaan Lain-lain	P A D
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	Pacitan	16,97	61,54	0,07	21,41	100,00
02	Ponorogo	27,04	58,91	2,56	11,50	100,00
03	Trenggalek	19,87	33,34	0,00	46,79	100,00
04	Tulungagung	28,19	63,92	0,29	7,60	100,00
05	Blitar	20,70	24,14	0,83	54,33	100,00
06	Kediri	31,78	62,39	2,12	3,71	100,00
07	Malang	55,44	41,97	0,57	2,03	100,00
08	Lumajang	26,14	58,68	0,80	14,39	100,00
09	Jember	23,65	57,33	13,32	5,70	100,00
10	Banyuwangi	36,45	57,14	1,21	5,21	100,00
11	Bondowoso	29,79	60,66	0,00	9,54	100,00
12	Situbondo	52,96	31,81	5,31	9,92	100,00
13	Probolinggo	48,17	38,88	0,26	12,69	100,00
14	Pasuruan	73,79	21,95	0,00	4,26	100,00
15	Sidoarjo	45,39	45,39	1,26	7,95	100,00
16	Mojokerto	56,36	33,01	0,68	9,95	100,00
17	Jombang	18,74	17,34	1,75	62,18	100,00
18	Nganjuk	23,31	63,59	2,20	10,90	100,00
19	Madiun	29,96	66,03	0,31	3,70	100,00
20	Magetan	18,89	53,09	1,21	26,82	100,00
21	Ngawi	31,38	46,05	1,02	21,55	100,00
22	Bojonegoro	14,29	64,18	0,91	20,63	100,00
23	Tuban	69,56	22,69	0,82	6,93	100,00
24	Lamongan	44,19	39,38	2,64	13,78	100,00
25	Gresik	63,33	13,46	0,01	23,20	100,00
26	Bangkalan	13,25	81,05	1,08	4,63	100,00
27	Sampang	16,63	73,75	0,16	9,46	100,00
28	Pamekasan	17,82	76,69	0,20	5,29	100,00
29	Sumenep	29,07	48,72	0,77	21,44	100,00
71	Kediri	31,74	22,05	0,00	46,22	100,00
72	Blitar	28,37	56,71	0,00	14,92	100,00
73	Malang	42,50	36,30	12,18	9,03	100,00
74	Probolinggo	38,58	55,80	1,59	4,03	100,00
75	Pasuruan	25,59	60,68	0,00	13,72	100,00
76	Mojokerto	37,03	55,37	0,17	7,43	100,00
77	Madiun	35,18	44,37	0,53	19,92	100,00
78	Surabaya	52,77	36,64	6,76	3,84	100,00
Jawa Timur		43,66	41,34	3,51	11,49	100,00

**TABEL 2.7. PERSENTASE SUMBER PENDAPATAN DARI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2000
BERDASARKAN DAERAH TINGKAT II SE JAWA TIMUR**

Kabupaten/Kota		Bagi Hasil Pajak	Bagi Hasil Bukan Pajak	Subsidi Daerah Otonomi	Bantuan Pembangunan	Penerimaan Lainnya	Pendapatan dari Pemerintah
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	Pacitan	7,52	0,04	63,20	28,98	0,26	100,00
02	Ponorogo	6,98	0,07	55,47	37,29	0,20	100,00
03	Trenggalek	9,16	0,03	70,04	20,13	0,64	100,00
04	Tulungagung	9,05	0,06	76,03	14,86	0,00	100,00
05	Blitar	7,34	0,04	65,64	26,98	0,00	100,00
06	Kediri	12,68	0,06	72,29	14,97	0,00	100,00
07	Malang	10,31	0,11	72,94	16,56	0,08	100,00
08	Lumajang	10,36	0,12	71,54	17,96	0,02	100,00
09	Jember	8,48	0,08	66,29	25,13	0,02	100,00
10	Banyuwangi	8,56	0,13	63,80	27,21	0,30	100,00
11	Bondowoso	10,48	0,03	71,48	16,81	1,20	100,00
12	Situbondo	9,29	0,03	56,90	33,78	0,00	100,00
13	Probolinggo	11,91	0,06	71,23	16,80	0,00	100,00
14	Pasuruan	13,20	0,05	62,25	24,51	0,00	100,00
15	Sidoarjo	21,56	0,02	63,90	14,52	0,00	100,00
16	Mojokerto	13,40	0,02	69,28	17,29	0,00	100,00
17	Jombang	9,54	0,04	73,52	16,89	0,00	100,00
18	Nganjuk	10,69	0,06	72,18	16,86	0,21	100,00
19	Madiun	10,69	0,22	75,20	13,88	0,00	100,00
20	Magetan	10,74	0,02	70,52	18,72	0,00	100,00
21	Ngawi	5,47	0,06	77,23	17,25	0,00	100,00
22	Bojonegoro	10,66	0,39	72,68	15,96	0,31	100,00
23	Tuban	12,53	0,19	66,21	21,07	0,00	100,00
24	Lamongan	9,15	0,28	62,44	28,13	0,00	100,00
25	Gresik	17,21	0,04	62,23	20,52	0,00	100,00
26	Bangkalan	8,11	0,03	73,00	18,85	0,00	100,00
27	Sampang	11,44	0,03	62,72	25,81	0,00	100,00
28	Pamekasan	8,95	0,03	72,57	18,45	0,00	100,00
29	Sumenep	16,96	0,02	65,68	17,34	0,00	100,00
71	Kediri	15,24	0,17	53,91	30,67	0,00	100,00
72	Blitar	16,55	0,07	53,81	29,57	0,00	100,00
73	Malang	16,45	0,03	65,93	17,00	0,59	100,00
74	Probolinggo	14,34	0,12	54,88	30,65	0,00	100,00
75	Pasuruan	13,17	0,07	51,33	35,44	0,00	100,00
76	Mojokerto	14,82	0,07	52,93	32,19	0,00	100,00
77	Madiun	12,05	0,10	59,01	28,83	0,00	100,00
78	Surabaya	39,26	1,41	38,94	18,38	2,01	100,00
Jawa Timur		12,90	0,17	65,32	21,38	0,23	100,00

**TABEL 2.8. PERSENTASE SUMBER PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000
BERDASARKAN DAERAH TINGKAT II SE JAWA TIMUR**

Kabupaten/Kota		Dr Pemerintah Pusat	Lembaga Dalam Negeri	Dari Luar Negeri	Pinjaman Pemerintah Daerah
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
01	Pacitan	-	-	-	-
02	Ponorogo	0,00	100,00	0,00	100,00
03	Trenggalek	-	-	-	-
04	Tulungagung	-	-	-	-
05	Blitar	-	-	-	-
06	Kediri	-	-	-	-
07	Malang	-	-	-	-
08	Lumajang	-	-	-	-
09	Jember	100,00	0,00	0,00	100,00
10	Banyuwangi	100,00	0,00	0,00	100,00
11	Bondowoso	-	-	-	-
12	Situbondo	-	-	-	-
13	Probolinggo	-	-	-	-
14	Pasuruan	-	-	-	-
15	Sidoarjo	-	-	-	-
16	Mojokerto	-	-	-	-
17	Jombang	-	-	-	-
18	Nganjuk	-	-	-	-
19	Madiun	-	-	-	-
20	Magetan	-	-	-	-
21	Ngawi	-	-	-	-
22	Bojonegoro	-	-	-	-
23	Tuban	-	-	-	-
24	Lamongan	-	-	-	-
25	Gresik	-	-	-	-
26	Bangkalan	100,00	0,00	0,00	100,00
27	Sampang	-	-	-	-
28	Pamekasan	-	-	-	-
29	Sumenep	-	-	-	-
71	Kediri	-	-	-	-
72	Blitar	-	-	-	-
73	Malang	-	-	-	-
74	Probolinggo	-	-	-	-
75	Pasuruan	-	-	-	-
76	Mojokerto	-	-	-	-
77	Madiun	-	-	-	-
78	Surabaya	100,00	0,00	0,00	100,00
Jawa Timur		97,54	2,46	0,00	100,00

**TABEL 2.9. PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2000
BERDASARKAN DAERAH TINGKAT II SE JAWA TIMUR**

Kabupaten/Kota		Pengeluaran Rutin	Persen (%)	Pengeluaran Pembangunan	Persen (%)	Total Pengeluaran
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	Pacitan	53.874.793	68,60	24.665.254	31,40	78.540.047
02	Ponorogo	75.982.983	61,60	47.356.302	38,40	123.339.285
03	Trenggalek	65.932.930	77,11	19.574.792	22,89	85.507.722
04	Tulungagung	91.062.445	84,22	17.057.895	15,78	108.120.340
05	Blitar	98.166.517	71,82	38.511.712	28,18	136.678.229
06	Kediri	110.045.650	80,04	27.440.197	19,96	137.485.847
07	Malang	147.119.515	79,09	38.888.802	20,91	186.008.317
08	Lumajang	74.026.353	74,62	25.176.570	25,38	99.202.923
09	Jember	148.762.932	73,22	54.396.329	26,78	203.159.261
10	Banyuwangi	113.891.307	72,14	43.979.182	27,86	157.870.489
11	Bondowoso	59.801.389	81,98	13.147.471	18,02	72.948.860
12	Situbondo	55.684.542	65,24	29.670.317	34,76	85.354.859
13	Probolinggo	70.766.207	76,04	22.299.677	23,96	93.065.884
14	Pasuruan	93.387.453	71,88	36.539.851	28,12	129.927.304
15	Sidoarjo	119.349.742	76,14	37.390.556	23,86	156.740.298
16	Mojokerto	66.360.631	72,47	25.207.299	27,53	91.567.930
17	Jombang	81.138.364	80,86	19.211.277	19,14	100.349.641
18	Nganjuk	82.479.968	78,90	22.055.474	21,10	104.535.442
19	Madiun	66.557.331	81,77	14.840.010	18,23	81.397.341
20	Magetan	73.797.736	75,91	23.419.796	24,09	97.217.532
21	Ngawi	86.876.588	82,34	18.627.927	17,66	105.504.515
22	Bojonegoro	79.156.145	80,69	18.941.830	19,31	98.097.975
23	Tuban	79.054.079	74,67	26.823.598	25,33	105.877.677
24	Lamongan	81.168.843	69,01	36.448.614	30,99	117.617.457
25	Gresik	74.403.028	77,43	21.681.645	22,57	96.084.673
26	Bangkalan	62.331.944	78,54	17.035.592	21,46	79.367.536
27	Sampang	44.395.417	74,15	15.478.124	25,85	59.873.541
28	Pamekasan	65.200.381	79,95	16.353.015	20,05	81.553.396
29	Sumenep	82.357.178	79,78	20.868.627	20,22	103.225.805
71	Kediri	37.244.383	71,29	14.996.747	28,71	52.241.130
72	Blitar	19.629.796	67,66	9.383.152	32,34	29.012.949
73	Malang	74.570.904	82,42	15.908.469	17,58	90.479.373
74	Probolinggo	21.596.244	64,88	11.691.657	35,12	33.287.901
75	Pasuruan	20.533.552	64,43	11.336.872	35,57	31.870.424
76	Mojokerto	21.166.909	68,99	9.512.339	31,01	30.679.248
77	Madiun	31.075.917	70,59	12.945.534	29,41	44.021.451
78	Surabaya	255.332.656	66,99	125.804.371	33,01	381.137.027
Jawa Timur		2.884.282.753	74,55	984.666.876	25,45	3.868.949.629

TABEL 3.1. SUMBER PENERIMAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 1999/2000
BERDASARKAN DAERAH TINGKAT II SE JAWA TIMUR

Kabupaten/Kota		Bagian Sisa lebih	PAD	Pendapatan dari Pemerintah	Pinjaman Pemerintah Daerah	Penerimaan Daerah
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	Pacitan	3.308.973	3.399.391	73.340.127	-	80.048.491
02	Ponorogo	1.583.626	5.257.005	104.636.296	3.746.250	115.223.177
03	Trenggalek	4.003.546	3.767.084	85.187.845	-	92.958.476
04	Tulungagung	2.733.867	7.801.870	112.255.545	886.229	123.677.511
05	Blitar	2.388.450	6.302.183	144.778.510	288.373	153.757.516
06	Kediri	3.242.281	9.633.889	135.844.731	-	148.720.901
07	Malang	206.495	18.478.925	196.349.423	-	215.034.843
08	Lumajang	1.868.762	9.214.932	91.556.335	-	102.640.029
09	Jember	6.344.071	24.974.914	172.027.637	-	203.346.622
10	Banyuwangi	4.445.872	12.353.227	150.328.151	-	167.127.250
11	Bondowoso	2.896.349	4.176.604	77.530.844	-	84.603.797
12	Situbondo	3.259.396	4.476.013	71.912.323	-	79.647.732
13	Probolinggo	2.390.939	5.223.292	93.583.311	-	101.197.542
14	Pasuruan	8.403.768	17.584.860	108.728.533	-	134.717.161
15	Sidoarjo	10.672.562	40.533.588	128.657.501	-	179.863.650
16	Mojokerto	5.516.957	11.784.034	93.601.159	781.441	111.683.591
17	Jombang	2.520.489	15.030.165	88.049.202	-	105.599.856
18	Nganjuk	4.382.369	7.237.409	114.432.895	-	126.052.673
19	Madiun	400.057	4.341.793	88.186.804	1.708.220	94.636.875
20	Magetan	1.464.619	5.609.579	91.557.320	169.745	98.801.263
21	Ngawi	3.149.835	3.690.346	96.786.251	-	103.626.432
22	Bojonegoro	3.775.211	6.681.933	105.054.339	960.089	116.471.572
23	Tuban	7.039.997	14.108.312	101.180.999	-	122.329.309
24	Lamongan	3.122.112	6.573.908	115.475.201	300.000	125.471.221
25	Gresik	400.174	16.696.426	86.844.333	-	103.940.933
26	Bangkalan	3.507.900	4.245.928	80.125.163	-	87.878.991
27	Sampang	2.898.625	2.584.699	56.313.218	-	61.796.542
28	Pamekasan	2.129.651	4.160.626	69.431.680	-	75.721.957
29	Sumenep	1.174.733	2.919.117	124.969.460	496.980	129.560.291
71	Kediri	2.802.191	7.775.510	45.748.125	285.255	56.611.081
72	Blitar	1.626.536	3.166.692	31.249.584	-	36.042.812
73	Malang	4.890.180	17.580.349	80.586.130	3.101.546	106.158.205
74	Probolinggo	2.122.109	3.133.499	35.158.380	-	40.413.988
75	Pasuruan	393.883	2.997.890	26.752.575	-	30.144.348
76	Mojokerto	690.932	3.036.547	25.385.199	-	29.112.678
77	Madiun	1.084.739	4.884.345	42.863.806	990.000	49.822.890
78	Surabaya	10.223.373	138.684.846	234.818.685	-	383.726.904
Jawa Timur		123.065.630	460.101.730	3.581.287.621	13.714.128	4.178.169.109

**TABEL 3.2. SUMBER PENERIMAAN PAD TAHUN ANGGARAN 1999/2000
BERDASARKAN DAERAH TINGKAT II SE JAWA TIMUR**

Kabupaten/Kota		Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Laba Usaha Daerah	Penerimaan Lain-lain	P A D
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	Pacitan	648.667	2.381.006	3.000	366.718	3.399.391
02	Ponorogo	1.533.754	2.974.766	98.820	649.665	5.257.005
03	Trenggalek	829.948	1.779.703	-	1.157.434	3.767.084
04	Tulungagung	2.078.482	4.893.306	8.685	821.397	7.801.870
05	Blitar	1.249.621	1.756.041	49.859	3.246.661	6.302.183
06	Kediri	3.584.064	5.556.146	164.992	328.687	9.633.889
07	Malang	9.187.667	8.295.063	223.000	773.195	18.478.925
08	Lumajang	2.653.837	5.587.269	43.000	930.826	9.214.932
09	Jember	4.723.027	11.276.673	8.177.515	797.699	24.974.914
10	Banyuwangi	3.578.874	8.183.931	90.950	499.472	12.353.227
11	Bondowoso	1.357.357	2.475.299	-	343.948	4.176.604
12	Situbondo	2.128.979	1.662.011	151.475	533.548	4.476.013
13	Probolinggo	3.049.870	1.735.597	15.100	422.724	5.223.292
14	Pasuruan	12.289.357	4.527.883	-	767.620	17.584.860
15	Sidoarjo	18.054.913	19.898.817	28.929	2.550.929	40.533.588
16	Mojokerto	6.250.729	4.777.421	89.723	666.161	11.784.034
17	Jombang	3.150.746	2.706.559	131.200	9.041.660	15.030.165
18	Nganjuk	1.738.480	4.603.745	187.948	707.236	7.237.409
19	Madiun	1.378.264	1.583.136	15.396	1.364.998	4.341.793
20	Magetan	1.229.853	2.296.211	225.000	1.858.514	5.609.579
21	Ngawi	1.575.726	2.016.893	-	97.727	3.690.346
22	Bojonegoro	1.579.346	3.511.537	62.960	1.528.090	6.681.933
23	Tuban	9.632.999	3.291.056	150.735	1.033.522	14.108.312
24	Lamongan	3.123.224	2.656.614	138.827	655.243	6.573.908
25	Gresik	8.135.000	3.477.738	5.276	5.078.412	16.696.426
26	Bangkalan	628.572	3.292.649	50.000	274.707	4.245.928
27	Sampang	383.637	1.754.431	3.469	443.162	2.584.699
28	Pamekasan	886.183	2.639.909	366.011	268.523	4.160.626
29	Sumenep	785.792	1.855.044	-	278.282	2.919.117
71	Kediri	2.332.316	1.896.620	50.000	3.496.574	7.775.510
72	Blitar	768.402	2.097.087	-	301.204	3.166.692
73	Malang	7.905.628	6.553.740	2.240.000	880.981	17.580.349
74	Probolinggo	1.372.310	1.505.153	55.000	201.036	3.133.499
75	Pasuruan	855.439	1.834.867	10.000	297.584	2.997.890
76	Mojokerto	1.154.112	1.802.168	7.750	72.517	3.036.547
77	Madiun	1.758.318	2.478.332	22.291	625.404	4.884.345
78	Surabaya	77.136.860	46.397.581	7.921.410	7.228.995	138.684.846
Jawa Timur		200.710.351	188.012.002	20.788.321	50.591.055	460.101.730

**TABEL 3.3. SUMBER PENERIMAAN PENDAPATAN DARI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 1999/2000
BERDASARKAN DAERAH TINGKAT II SE JAWA TIMUR**

Kabupaten/Kota		Bagi Hasil Pajak	Bagi Hasil Bukan Pajak	Subsidi Daerah Otonomi	Bantuan Pembangunan	Penerimaan Lainnya	Pendapatan dari Pemerintah
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	Pacitan	5.292.354	95.814	51.733.929	15.914.398	303.632	73.340.127
02	Ponorogo	7.522.111	86.634	71.795.719	25.231.832	-	104.636.296
03	Trenggalek	6.045.459	19.924	64.514.108	12.823.083	1.785.271	85.187.845
04	Tulungagung	8.735.237	84.447	86.226.013	17.209.848	-	112.255.545
05	Blitar	10.705.881	52.883	92.709.208	41.310.539	-	144.778.510
06	Kediri	14.527.948	64.084	99.915.992	21.336.707	-	135.844.731
07	Malang	17.660.048	164.451	134.353.709	43.313.215	858.000	196.349.423
08	Lumajang	8.886.795	156.562	68.241.107	14.001.161	270.710	91.556.335
09	Jember	13.849.591	770.340	134.099.118	23.308.588	-	172.027.637
10	Banyuwangi	13.126.327	206.946	103.307.549	33.413.079	274.250	150.328.151
11	Bondowoso	6.403.660	20.512	54.880.480	15.558.142	668.050	77.530.844
12	Situbondo	7.482.994	22.467	51.359.816	13.047.046	-	71.912.323
13	Probolinggo	9.725.027	42.278	65.462.890	18.353.116	-	93.583.311
14	Pasuruan	14.104.682	66.760	74.565.257	19.991.835	-	108.728.533
15	Sidoarjo	25.286.656	16.542	85.061.309	18.292.994	-	128.657.501
16	Mojokerto	10.103.331	16.542	58.865.363	24.615.923	-	93.601.159
17	Jombang	9.041.456	33.084	58.269.146	20.705.516	-	88.049.202
18	Nganjuk	10.376.630	38.064	77.458.615	26.271.586	288.000	114.432.895
19	Madiun	9.160.987	149.539	63.374.270	15.502.009	-	88.186.804
20	Magetan	9.799.127	17.802	68.397.248	13.343.144	-	91.557.320
21	Ngawi	8.665.391	79.376	72.543.366	15.498.118	-	96.786.251
22	Bojonegoro	10.037.317	338.908	75.142.872	18.587.880	947.362	105.054.339
23	Tuban	12.539.090	152.232	69.077.990	19.411.687	-	101.180.999
24	Lamongan	9.556.279	54.871	77.469.113	28.394.938	-	115.475.201
25	Gresik	11.330.000	63.000	56.759.767	18.691.566	-	86.844.333
26	Bangkalan	5.653.709	26.579	57.029.142	17.415.733	-	80.125.163
27	Sampang	6.522.082	17.483	34.342.706	15.430.947	-	56.313.218
28	Pamekasan	6.638.077	17.728	50.448.324	12.016.301	311.250	69.431.680
29	Sumenep	17.029.815	17.369	74.243.577	33.678.699	-	124.969.460
71	Kediri	6.258.565	62.736	26.105.330	13.321.494	-	45.748.125
72	Blitar	3.464.400	16.542	16.085.860	11.682.782	-	31.249.584
73	Malang	11.359.396	16.542	54.396.542	14.188.650	625.000	80.586.130
74	Probolinggo	3.897.995	39.884	19.494.864	11.725.637	-	35.158.380
75	Pasuruan	3.635.191	16.821	13.995.530	9.105.033	-	26.752.575
76	Mojokerto	3.774.326	164.392	14.858.672	6.587.809	-	25.385.199
77	Madiun	4.622.000	53.153	26.361.969	11.826.684	-	42.863.806
78	Surabaya	80.807.318	4.049.827	93.910.608	31.619.521	24.431.411	234.818.685
Jawa Timur		423.627.250	7.313.117	2.396.857.077	722.727.241	30.762.936	3.581.287.621

**TABEL 3.4. SUMBER PENERIMAAN PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 1999/2000
BERDASARKAN DAERAH TINGKAT II SE JAWA TIMUR**

Kabupaten/Kota		Dr Pemerintah Pusat	Lembaga Dalam Negeri	Dari Luar Negeri	Pinjaman Pemerintah Daerah
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
01	Pacitan	-	-	-	-
02	Ponorogo	-	3.746.250	-	3.746.250
03	Trenggalek	-	-	-	-
04	Tulungagung	886.229	-	-	886.229
05	Blitar	-	288.373	-	288.373
06	Kediri	-	-	-	-
07	Malang	-	-	-	-
08	Lumajang	-	-	-	-
09	Jember	-	-	-	-
10	Banyuwangi	-	-	-	-
11	Bondowoso	-	-	-	-
12	Situbondo	-	-	-	-
13	Probolinggo	-	-	-	-
14	Pasuruan	-	-	-	-
15	Sidoarjo	-	-	-	-
16	Mojokerto	-	-	781.441	781.441
17	Jombang	-	-	-	-
18	Nganjuk	-	-	-	-
19	Madiun	1.708.220	-	-	1.708.220
20	Magetan	169.745	-	-	169.745
21	Ngawi	-	-	-	-
22	Bojonegoro	960.089	-	-	960.089
23	Tuban	-	-	-	-
24	Lamongan	300.000	-	-	300.000
25	Gresik	-	-	-	-
26	Bangkalan	-	-	-	-
27	Sampang	-	-	-	-
28	Pamekasan	-	-	-	-
29	Sumenep	496.980	-	-	496.980
71	Kediri	285.255	-	-	285.255
72	Blitar	-	-	-	-
73	Malang	3.101.546	-	-	3.101.546
74	Probolinggo	-	-	-	-
75	Pasuruan	-	-	-	-
76	Mojokerto	-	-	-	-
77	Madiun	-	990.000	-	990.000
78	Surabaya	-	-	-	-
Jawa Timur		7.908.064	5.024.623	781.441	13.714.128

**TABEL 3.5. PERSENTASE SUMBER PENERIMAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 1999/2000
BERDASARKAN DAERAH TINGKAT II SE JAWA TIMUR**

Kabupaten/Kota		Bagian Sisa lebih	PAD	Pendapatan dari Pemerintah	Pinjaman Pemerintah Daerah	Penerimaan Daerah
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	Pacitan	4,13	4,25	91,62	0,00	100,00
02	Ponorogo	1,37	4,56	90,81	3,25	100,00
03	Trenggalek	4,31	4,05	91,64	0,00	100,00
04	Tulungagung	2,21	6,31	90,76	0,72	100,00
05	Blitar	1,55	4,10	94,16	0,19	100,00
06	Kediri	2,18	6,48	91,34	0,00	100,00
07	Malang	0,10	8,59	91,31	0,00	100,00
08	Lumajang	1,82	8,98	89,20	0,00	100,00
09	Jember	3,12	12,28	84,60	0,00	100,00
10	Banyuwangi	2,66	7,39	89,95	0,00	100,00
11	Bondowoso	3,42	4,94	91,64	0,00	100,00
12	Situbondo	4,09	5,62	90,29	0,00	100,00
13	Probolinggo	2,36	5,16	92,48	0,00	100,00
14	Pasuruan	6,24	13,05	80,71	0,00	100,00
15	Sidoarjo	5,93	22,54	71,53	0,00	100,00
16	Mojokerto	4,94	10,55	83,81	0,70	100,00
17	Jombang	2,39	14,23	83,38	0,00	100,00
18	Nganjuk	3,48	5,74	90,78	0,00	100,00
19	Madiun	0,42	4,59	93,18	1,81	100,00
20	Magetan	1,48	5,68	92,67	0,17	100,00
21	Ngawi	3,04	3,56	93,40	0,00	100,00
22	Bojonegoro	3,24	5,74	90,20	0,82	100,00
23	Tuban	5,75	11,53	82,71	0,00	100,00
24	Lamongan	2,49	5,24	92,03	0,24	100,00
25	Gresik	0,39	16,06	83,55	0,00	100,00
26	Bangkalan	3,99	4,83	91,18	0,00	100,00
27	Sampang	4,69	4,18	91,13	0,00	100,00
28	Pamekasan	2,81	5,49	91,69	0,00	100,00
29	Sumenep	0,91	2,25	96,46	0,38	100,00
71	Kediri	4,95	13,73	80,81	0,50	100,00
72	Blitar	4,51	8,79	86,70	0,00	100,00
73	Malang	4,61	16,56	75,91	2,92	100,00
74	Probolinggo	5,25	7,75	87,00	0,00	100,00
75	Pasuruan	1,31	9,95	88,75	0,00	100,00
76	Mojokerto	2,37	10,43	87,20	0,00	100,00
77	Madiun	2,18	9,80	86,03	1,99	100,00
78	Surabaya	2,66	36,14	61,19	0,00	100,00
Jawa Timur		2,95	11,01	85,71	0,33	100,00

**TABEL 3.6. PERSENTASE SUMBER PAD TAHUN ANGGARAN 1999/2000
BERDASARKAN DAERAH TINGKAT II SE JAWA TIMUR**

Kabupaten/Kota		Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Laba Usaha Daerah	Penerimaan Lain-lain	P A D
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	Pacitan	19,08	70,04	0,09	10,79	100,00
02	Ponorogo	29,18	56,59	1,88	12,36	100,00
03	Trenggalek	22,03	47,24	0,00	30,72	100,00
04	Tulungagung	26,64	62,72	0,11	10,53	100,00
05	Blitar	19,83	27,86	0,79	51,52	100,00
06	Kediri	37,20	57,67	1,71	3,41	100,00
07	Malang	49,72	44,89	1,21	4,18	100,00
08	Lumajang	28,80	60,63	0,47	10,10	100,00
09	Jember	18,91	45,15	32,74	3,19	100,00
10	Banyuwangi	28,97	66,25	0,74	4,04	100,00
11	Bondowoso	32,50	59,27	0,00	8,24	100,00
12	Situbondo	47,56	37,13	3,38	11,92	100,00
13	Probolinggo	58,39	33,23	0,29	8,09	100,00
14	Pasuruan	69,89	25,75	0,00	4,37	100,00
15	Sidoarjo	44,54	49,09	0,07	6,29	100,00
16	Mojokerto	53,04	40,54	0,76	5,65	100,00
17	Jombang	20,96	18,01	0,87	60,16	100,00
18	Nganjuk	24,02	63,61	2,60	9,77	100,00
19	Madiun	31,74	36,46	0,35	31,44	100,00
20	Magetan	21,92	40,93	4,01	33,13	100,00
21	Ngawi	42,70	54,65	0,00	2,65	100,00
22	Bojonegoro	23,64	52,55	0,94	22,87	100,00
23	Tuban	68,28	23,33	1,07	7,33	100,00
24	Lamongan	47,51	40,41	2,11	9,97	100,00
25	Gresik	48,72	20,83	0,03	30,42	100,00
26	Bangkalan	14,80	77,55	1,18	6,47	100,00
27	Sampang	14,84	67,88	0,13	17,15	100,00
28	Pamekasan	21,30	63,45	8,80	6,45	100,00
29	Sumenep	26,92	63,55	0,00	9,53	100,00
71	Kediri	30,00	24,39	0,64	44,97	100,00
72	Blitar	24,27	66,22	0,00	9,51	100,00
73	Malang	44,97	37,28	12,74	5,01	100,00
74	Probolinggo	43,79	48,03	1,76	6,42	100,00
75	Pasuruan	28,53	61,21	0,33	9,93	100,00
76	Mojokerto	38,01	59,35	0,26	2,39	100,00
77	Madiun	36,00	50,74	0,46	12,80	100,00
78	Surabaya	55,62	33,46	5,71	5,21	100,00
Jawa Timur		43,62	40,86	4,52	11,00	100,00

**TABEL 3.7. PERSENTASE SUMBER PENDAPATAN DARI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 1999/2000
BERDASARKAN DAERAH TINGKAT II SE JAWA TIMUR**

Kabupaten/Kota		Bagi Hasil Pajak	Bagi Hasil Bukan Pajak	Subsidi Daerah Otonomi	Bantuan Pembangunan	Penerimaan Lainnya	Pendapatan dari Pemerintah
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	Pacitan	7,22	0,13	70,54	21,70	0,41	100,00
02	Ponorogo	7,19	0,08	68,61	24,11	0,00	100,00
03	Trenggalek	7,10	0,02	75,73	15,05	2,10	100,00
04	Tulungagung	7,78	0,08	76,81	15,33	0,00	100,00
05	Blitar	7,39	0,04	64,04	28,53	0,00	100,00
06	Kediri	10,69	0,05	73,55	15,71	0,00	100,00
07	Malang	8,99	0,08	68,43	22,06	0,44	100,00
08	Lumajang	9,71	0,17	74,53	15,29	0,30	100,00
09	Jember	8,05	0,45	77,95	13,55	0,00	100,00
10	Banyuwangi	8,73	0,14	68,72	22,23	0,18	100,00
11	Bondowoso	8,26	0,03	70,79	20,07	0,86	100,00
12	Situbondo	10,41	0,03	71,42	18,14	0,00	100,00
13	Probolinggo	10,39	0,05	69,95	19,61	0,00	100,00
14	Pasuruan	12,97	0,06	68,58	18,39	0,00	100,00
15	Sidoarjo	19,65	0,01	66,11	14,22	0,00	100,00
16	Mojokerto	10,79	0,02	62,89	26,30	0,00	100,00
17	Jombang	10,27	0,04	66,18	23,52	0,00	100,00
18	Nganjuk	9,07	0,03	67,69	22,96	0,25	100,00
19	Madiun	10,39	0,17	71,86	17,58	0,00	100,00
20	Magetan	10,70	0,02	74,70	14,57	0,00	100,00
21	Ngawi	8,95	0,08	74,95	16,01	0,00	100,00
22	Bojonegoro	9,55	0,32	71,53	17,69	0,90	100,00
23	Tuban	12,39	0,15	68,27	19,19	0,00	100,00
24	Lamongan	8,28	0,05	67,09	24,59	0,00	100,00
25	Gresik	13,05	0,07	65,36	21,52	0,00	100,00
26	Bangkalan	7,06	0,03	71,18	21,74	0,00	100,00
27	Sampang	11,58	0,03	60,99	27,40	0,00	100,00
28	Pamekasan	9,56	0,03	72,66	17,31	0,45	100,00
29	Sumenep	13,63	0,01	59,41	26,95	0,00	100,00
71	Kediri	13,68	0,14	57,06	29,12	0,00	100,00
72	Blitar	11,09	0,05	51,48	37,39	0,00	100,00
73	Malang	14,10	0,02	67,50	17,61	0,78	100,00
74	Probolinggo	11,09	0,11	55,45	33,35	0,00	100,00
75	Pasuruan	13,59	0,06	52,31	34,03	0,00	100,00
76	Mojokerto	14,87	0,65	58,53	25,95	0,00	100,00
77	Madiun	10,78	0,12	61,50	27,59	0,00	100,00
78	Surabaya	34,41	1,72	39,99	13,47	10,40	100,00
Jawa Timur		11,83	0,20	66,93	20,18	0,86	100,00

**TABEL 3.8. PERSENTASE SUMBER PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 1999/2000
BERDASARKAN DAERAH TINGKAT II SE JAWA TIMUR**

Kabupaten/Kota		Dr Pemerintah Pusat	Lembaga Dalam Negeri	Dari Luar Negeri	Pinjaman Pemerintah Daerah
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
01	Pacitan	-	-	-	-
02	Ponorogo	-	100,00	-	100,00
03	Trenggalek	-	-	-	-
04	Tulungagung	100,00	-	-	100,00
05	Blitar	-	100,00	-	100,00
06	Kediri	-	-	-	-
07	Malang	-	-	-	-
08	Lumajang	-	-	-	-
09	Jember	-	-	-	-
10	Banyuwangi	-	-	-	-
11	Bondowoso	-	-	-	-
12	Situbondo	-	-	-	-
13	Probolinggo	-	-	-	-
14	Pasuruan	-	-	-	-
15	Sidoarjo	-	-	-	-
16	Mojokerto	-	-	100,00	100,00
17	Jombang	-	-	-	-
18	Nganjuk	-	-	-	-
19	Madiun	100,00	-	-	100,00
20	Magetan	100,00	-	-	100,00
21	Ngawi	-	-	-	-
22	Bojonegoro	100,00	-	-	100,00
23	Tuban	-	-	-	-
24	Lamongan	100,00	-	-	100,00
25	Gresik	-	-	-	-
26	Bangkalan	-	-	-	-
27	Sampang	-	-	-	-
28	Pamekasan	-	-	-	-
29	Sumenep	100,00	-	-	100,00
71	Kediri	100,00	-	-	100,00
72	Blitar	-	-	-	-
73	Malang	100,00	-	-	100,00
74	Probolinggo	-	-	-	-
75	Pasuruan	-	-	-	-
76	Mojokerto	-	-	-	-
77	Madiun	-	100,00	-	100,00
78	Surabaya	-	-	-	-
Jawa Timur		57,66	36,64	5,70	100,00

TABEL 3.9. PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 1999/2000
BERDASARKAN DAERAH TINGKAT II SE JAWA TIMUR

Kabupaten/Kota		Pengeluaran Rutin	Persen (%)	Pengeluaran Pembangunan	Persen (%)	Total Pengeluaran
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	Pacitan	58.724.169	75,91	18.632.189	24,09	77.356.358
02	Ponorogo	82.069.858	71,75	32.312.950	28,25	114.382.808
03	Trenggalek	72.011.497	82,23	15.563.038	17,77	87.574.536
04	Tulungagung	99.424.728	82,04	21.770.933	17,96	121.195.661
05	Blitar	102.433.970	69,07	45.861.866	30,93	148.295.837
06	Kediri	113.113.004	79,33	29.474.132	20,67	142.587.136
07	Malang	155.031.690	72,55	58.668.797	27,45	213.700.487
08	Lumajang	80.083.988	81,91	17.690.217	18,09	97.774.205
09	Jember	162.524.086	82,85	33.631.142	17,15	196.155.228
10	Banyuwangi	122.483.501	75,05	40.711.836	24,95	163.195.337
11	Bondowoso	65.984.740	78,13	18.468.112	21,87	84.452.852
12	Situbondo	58.956.826	76,92	17.694.526	23,08	76.651.352
13	Probolinggo	72.339.981	73,10	26.619.413	26,90	98.959.395
14	Pasuruan	95.983.789	76,27	29.862.774	23,73	125.846.562
15	Sidoarjo	125.377.155	74,91	41.999.101	25,09	167.376.256
16	Mojokerto	67.699.932	64,31	37.578.413	35,69	105.278.345
17	Jombang	75.478.623	69,41	33.263.897	30,59	108.742.520
18	Nganjuk	89.812.668	73,99	31.565.172	26,01	121.377.840
19	Madiun	71.677.010	76,40	22.135.716	23,60	93.812.726
20	Magetan	75.834.737	80,13	18.799.193	19,87	94.633.931
21	Ngawi	78.892.815	79,76	20.021.115	20,24	98.913.930
22	Bojonegoro	86.659.014	77,67	24.909.428	22,33	111.568.442
23	Tuban	84.266.911	77,42	24.583.409	22,58	108.850.320
24	Lamongan	88.208.333	71,92	34.433.916	28,08	122.642.249
25	Gresik	78.088.742	76,92	23.432.486	23,08	101.521.228
26	Bangkalan	65.716.618	75,92	20.838.311	24,08	86.554.929
27	Sampang	42.667.700	72,21	16.417.968	27,79	59.085.668
28	Pamekasan	58.723.139	80,55	14.176.128	19,45	72.899.267
29	Sumenep	90.563.947	70,45	37.983.165	29,55	128.547.112
71	Kediri	38.000.502	70,43	15.955.199	29,57	53.955.701
72	Blitar	20.688.725	58,59	14.624.886	41,41	35.313.612
73	Malang	79.902.927	78,05	22.477.085	21,95	102.380.012
74	Probolinggo	24.054.521	62,43	14.478.055	37,57	38.532.576
75	Pasuruan	19.177.559	64,05	10.766.312	35,95	29.943.871
76	Mojokerto	20.842.915	70,78	8.602.991	29,22	29.445.906
77	Madiun	32.969.254	70,55	13.760.324	29,45	46.729.578
78	Surabaya	260.013.774	71,64	102.926.334	28,36	362.940.108
Jawa Timur		2.884.282.753	71,58	984.666.876	28,42	4.029.173.880

TABEL 3.9. PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 1999/2000
BERDASARKAN DAERAH TINGKAT II SE JAWA TIMUR

Kabupaten/Kota		Pengeluaran Rutin	Persen (%)	Pengeluaran Pembangunan	Persen (%)	Total Pengeluaran
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	Pacitan	58.724.169	75,91	18.632.189	24,09	77.356.358
02	Ponorogo	82.069.858	71,75	32.312.950	28,25	114.382.808
03	Trenggalek	72.011.497	82,23	15.563.038	17,77	87.574.536
04	Tulungagung	99.424.728	82,04	21.770.933	17,96	121.195.661
05	Blitar	102.433.970	69,07	45.861.866	30,93	148.295.837
06	Kediri	113.113.004	79,33	29.474.132	20,67	142.587.136
07	Malang	155.031.690	72,55	58.668.797	27,45	213.700.487
08	Lumajang	80.083.988	81,91	17.690.217	18,09	97.774.205
09	Jember	162.524.086	82,85	33.631.142	17,15	196.155.228
10	Banyuwangi	122.483.501	75,05	40.711.836	24,95	163.195.337
11	Bondowoso	65.984.740	78,13	18.468.112	21,87	84.452.852
12	Situbondo	58.956.826	76,92	17.694.526	23,08	76.651.352
13	Probolinggo	72.339.981	73,10	26.619.413	26,90	98.959.395
14	Pasuruan	95.983.789	76,27	29.862.774	23,73	125.846.562
15	Sidoarjo	125.377.155	74,91	41.999.101	25,09	167.376.256
16	Mojokerto	67.699.932	64,31	37.578.413	35,69	105.278.345
17	Jombang	75.478.623	69,41	33.263.897	30,59	108.742.520
18	Nganjuk	89.812.668	73,99	31.565.172	26,01	121.377.840
19	Madiun	71.677.010	76,40	22.135.716	23,60	93.812.726
20	Magetan	75.834.737	80,13	18.799.193	19,87	94.633.931
21	Ngawi	78.892.815	79,76	20.021.115	20,24	98.913.930
22	Bojonegoro	86.659.014	77,67	24.909.428	22,33	111.568.442
23	Tuban	84.266.911	77,42	24.583.409	22,58	108.850.320
24	Lamongan	88.208.333	71,92	34.433.916	28,08	122.642.249
25	Gresik	78.088.742	76,92	23.432.486	23,08	101.521.228
26	Bangkalan	65.716.618	75,92	20.838.311	24,08	86.554.929
27	Sampang	42.667.700	72,21	16.417.968	27,79	59.085.668
28	Pamekasan	58.723.139	80,55	14.176.128	19,45	72.899.267
29	Sumenep	90.563.947	70,45	37.983.165	29,55	128.547.112
71	Kediri	38.000.502	70,43	15.955.199	29,57	53.955.701
72	Blitar	20.688.725	58,59	14.624.886	41,41	35.313.612
73	Malang	79.902.927	78,05	22.477.085	21,95	102.380.012
74	Probolinggo	24.054.521	62,43	14.478.055	37,57	38.532.576
75	Pasuruan	19.177.559	64,05	10.766.312	35,95	29.943.871
76	Mojokerto	20.842.915	70,78	8.602.991	29,22	29.445.906
77	Madiun	32.969.254	70,55	13.760.324	29,45	46.729.578
78	Surabaya	260.013.774	71,64	102.926.334	28,36	362.940.108
Jawa Timur		2.884.282.753	71,58	984.666.876	28,42	4.029.173.880